

**BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)
SEBAGAI INOVASI KELEMBAGAAN UNTUK PEMBERDAYAAN
MENUJU KEMANDIRIAN PETANI**

DISERTASI

Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan mencapai Derajat Doktor

Program Studi: Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

Minat Utama: Pemberdayaan Usaha Mikro/Bisnis Kecil



Oleh:

**SUGENG EDI WALUYO
T 62020 8018**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

**BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)
SEBAGAI INOVASI KELEMBAGAAN UNTUK PEMBERDAYAAN
MENUJU KEMANDIRIAN PETANI**

DISERTASI

	Oleh:		
	Sugeng Edi Waluyo		
	T 620208018		
Komisi Pembimbing	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Promotor	Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS NIP. 19470713.1981.03.1.001	-----	
Co-Promotor	Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi NIP. 19660611.199103.1.002	-----	
	Dr. Mahendra Wijaya, MS NIP. 19600723.198702.1.001	-----	
Telah dinyatakan memenuhi syarat Pada tanggal.....September 2012			

Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Program Pascasarjana UNS

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS
NIP. 19470713.1981.03.1.001

**BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)
SEBAGAI INOVASI KELEMBAGAAN UNTUK PEMBERDAYAAN
MENUJU KEMANDIRIAN PETANI**

DISERTASI

Oleh:

Sugeng Edi Waluyo
T 620208018

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS NIP. 19570707.198103.1.006	_____
Sekretaris	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS NIP. 19610717.198601.0.001	_____
Anggota Penguji	Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS NIP. 19470713.1981.03.1.001	_____
	Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi NIP. 19660611.199103.1.002	_____
	Dr. Mahendra Wijaya, MS NIP. 19600723.198702.1.001	_____
	Prof. Dr. Tulus Haryono SE, M.Ek NIP. 19550801.198103.1.006	_____
	Prof. Dr. Ir. Moch. Maksun, MS NIP. 19540623.197803.1.002	_____
	Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS NIP. 19591223.198903.1.002	_____
	Dr. Ir. Rany Mutiara Chaidirsyah, MS NIP. 19620821198703 2 001	_____

Telah dipertahankan di depan penguji
pada sidang Senat Terbuka Terbatas
Universitas Sebelas Maret
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal, 25 September 2012

Mengetahui,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS
NIP. 19570707.198103.1.006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sugeng Edi Waluyo
NIM : T 620208018
Program : Pascasarjana (S-3) UNS
Program Studi : Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 21 Maret 1961
Alamat Rumah : Jl. Onta No. 9 Rt. 03 Rw. 03 Kedung Ombo,
Baturetno, Wonogiri
Telepon : 0273-462141
Alamat e-mail : edi.pm.uns@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa disertasi yang berjudul **“Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai Inovasi Kelembagaan Untuk Pemberdayaan Menuju Kemandirian Petani”** ini adalah asli (bukan jiplakan) dan betul-betul karya saya sendiri serta belum pernah diajukan oleh penulis lain untuk memperoleh gelar akademik tertentu.

Semua temuan, pendapat, atau gagasan orang lain yang dikutip dalam disertasi ini saya tempuh melalui tradisi akademik yang berlaku dan saya cantumkan dalam sumber rujukan dan atau saya tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Surakarta, September 2012
Yang membuat pernyataan,

Sugeng Edi Waluyo
NIM. T 620208018

KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan karunia-Nya akhirnya Disertasi ini dapat terselesaikan. Pada hakikatnya, disertasi ini ditulis berdasarkan sebuah keprihatinan terkait dengan nasib petani yang tidak semakin sejahtera, bahkan sebaliknya. Padahal menurut Mubyarto bahwa pembangunan pertanian harus meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Penulis juga merasakan kegundahan melihat berbagai kelemahan kelembagaan petani yang ada selama ini, antara lain: (1) mekanisme pembentukan yang relatif bersifat top-down; (2) landasan lembaga yang kurang berbasis pada profesionalitas (bisnis) maupun pemberdayaan; (3) kontinuitas kegiatan yang berbasis pada program pemerintah; (4) sikap kerja yang kurang profesional. Sehingga penulis berharap, disertasi mengenai Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai inovasi kelembagaan pertanian ini mampu memberikan sumbangan kepada penguatan kelembagaan pertanian di Indonesia, sehingga akan mewujudkan petani yang sejahtera dan mandiri.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselesaikannya disertasi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memperkenankan penulis belajar di Program Pascasarjana, Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, selaku Direktur Pascasarjana UNS, yang sudah memberi kesempatan penulis untuk melaksanakan studi di Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana UNS.
3. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS, selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Program Doktor Pascasarjana UNS dan sekaligus sebagai Promotor, yang telah memberikan ijin dan memperkenankan penulis belajar di Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, dan terus menerus memberikan motivasi, masukan, arahan yang tiada henti, dan terus menerus mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan dan selesainya penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, selaku co-promotor I, ditengah kesibukannya selalu menyempatkan waktu untuk konsultasi sehingga terselesaikannya disertasi ini.
5. Dr. Mahendra Wijaya, MS, selaku co-promotor II, yang dengan tekun dan penuh kesabarannya memberikan wawasan dan nasehat, motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya disertasi ini.
6. Prof. Dr. Moch. Maksun Machfoedz, MS, selaku penguji eksternal UNS-Solo, dan atas ketulusannya memberikan motivasi.

7. Prof. Dr. Tulus Haryono, MEk, selaku penguji internal UNS-Solo, yang telah memberikan kritik dan masukan untuk lebih sempurnanya penulisan hasil penelitian sebagai karya ilmiah.
8. Dr. Ir. Rahmad Pambudy, M.S; selaku penguji eksternal UNS-Solo yang telah meluangkan waktunya untuk mencermati, mengkritisi, dan memberikan masukan demi sempurnanya disertasi ini.
9. Dr. Ir. Rany Mutiara Chaidirsyah; selaku penguji eksternal UNS-Solo yang secara teliti mencermati tulisan karya ilmiah ini.
10. Segenap pengurus program studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Program Pascasarjana UNS
11. Teman-teman konsultan FEATI (*Farmer Empowerment through Agricultural Technology & Information*) yang telah setia menemani penulis untuk senantiasa berdiskusi dalam mengembangkan BUMP di Indonesia
12. Teman-teman pengelola BUMP di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
13. Teman-teman *Indonesia China Small & Medium Int' Trade* (ICMIT) di Jakarta
14. Lembaga Perekonomian dan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPNU-LPPNU) Soloraya
15. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sukoharjo
16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo
17. Kelompok tani/Gapoktan, pengelola RMU, PPL di Kabupaten Sukoharjo
18. Segenap Pengelola Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Sukoharjo
19. Rekan-rekan FACILITATOR, Himpunan Mahasiswa Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat Program pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS-Solo)
20. Orang tua, mertua, istri dan anak-anak tercinta.

Tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan disertasi ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya karya ini.

Surakarta, September 2012

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis model kelembagaan yang dibangun oleh BUMP; (2) menganalisis dinamika pengembangan BUMP; dan (3) merumuskan model pengembangan BUMP di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif (qualitative approach)*, dengan informasi yang bersifat subyektif dan historis. Strategi yang digunakan adalah *studi kasus*. Pengumpulan data menggunakan teknik: (1) Observasi; (2) pengamatan partisipatif, (3) wawancara mendalam, (4) analisis dokumen, dan (5) FGD. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan metoda dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: BUMP di Kabupaten Sukoharjo mengalami dinamika dilihat mulai dari tataran konseptual hingga kemanfaatannya bagi pemangku kepentingan. Sebagai inovasi kelembagaan ekonomi petani, dapat dilihat pada: (1) Perbedaan BUMP dan Catur Sarana Unit Desa; (2) BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional, (3) BUMP sebagai hybrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, (4) BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, dan (5) BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya). Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada rumusan model pengembangan BUMP di masa mendatang, yang mencakup: (1) BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional, (2) BUMP sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, (3) BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, (4) BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya).

Kata Kunci: BUMP, inovasi kelembagaan, pemberdayaan

ABSTRACT

The goals of this research are: (1) to analyze institutional models which is built by BUMP; (2) to analyze the BUMP development; and (3) to formulate future BUMP development model. This research designed as a *case study* strategy of *qualitative approach*, by subjective information and hystorical studies. Data collected by taking such techniques: (1) Observation; (2) participatory observation, (3) in-depth interviews, (4) document analysis, and FGD (Focus Group Discussion). All data validated by source and method triangulation and analyzed by qualitative data analysis, in the following order: data reduction, data presentation, and drawing conclusion with its verification.

The result of research shows BUMP in Sukoharjo Regency is experiencing the dynamics of conceptual level to its utilization for stakeholders. Meanwhile, BUMP in Sukoharjo Regency as institutional innovation models of farmers economy, can be seen at: (1) the difference of BUMP and Four Agri Support Activities (Catur Sarana Unit Desa); (2) BUMP as farmers professional economics institution, (3) BUMP as hybrid institution of business and community empowerment; (4) BUMP as business institution based on morality, and (5) BUMP as an non-governmental extension (private and self-reliance extension) development. So, the future model of BUMP development are (1) BUMP as farmers economics professional institution, (2) BUMP as hybrid institution of business and community empowerment, (3) BUMP as an corporate based on morality, (4) BUMP as non-governmental extension (private counseling and self-reliance extension).

Key words: BUMP, institutional innovation, empowerment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keterbaruan Penelitian.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI.....	18
A. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Pembangunan	18
a. Sejarah, Konsep dan Strategi Pembangunan.....	18
b. Etika Pembangunan.....	22
2. Pembangunan Pertanian.....	25
a. Pengertian.....	25
b. Arah Pembangunan Pertanian.....	26
c. Tujuan Pembangunan pertanian.....	29
d. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.....	30
3. Penyuluhan Pertanian/ Pemberdayaan Masyarakat.....	40
4. Penyuluhan Pertanian Sebagai Suatu Sistem.....	49
5. Kelembagaan	52
a. Pengertian Kelembagaan.....	52
b. Dimensi Kelembagaan.....	56
c. Kelembagaan Pembangunan Pertanian.....	56
6. Kelembagaan Petani.....	58
a. Kelompok Tani sebagai Kelembagaan Petani.....	58
b. Alasan di bentuknya Kelompok Tani.....	59
c. Perkembangan Kelompok Tani di Indonesia.....	61
d. Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani.....	64
7. Badan Usaha Milik Petani (BUMP).....	65
a. Alur Pikir Pembentukan BUMP.....	65
b. Pengertian dan Alasan Pembentukan.....	71
c. Bentuk Usaha.....	72
d. BUMP sebagai Kekuatan Pembangunan Pertanian.....	73
e. BUMP Sebagai Inovasi Kelembagaan.....	74

	f. Badan Usaha Milik Petani Sebagai Inovasi kelembagaan Pembangunan Pertanian.....	77
	B. Kerangka Pemikiran.....	81
	1. Hasil Penelitian Pendahuluan	81
	2. Kerangka Berpikir	89
BAB III	DIMENSI PENELITIAN.....	92
BAB IV.	METODE PENELITIAN.....	105
	A. Tempat dan Waktu Penelitian	105
	B. Jenis Penelitian.....	105
	1. Pilihan Paradigma Penelitian	105
	2. Pendekatan dan Tahap-tahap Penelitian	106
	C. Teknik Sampling/Cuplikan.....	107
	D. Data dan Sumber Data.....	108
	E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen.....	109
	F. Validitas Data	115
	G. Teknik Analisis Data.....	117
BAB V.	KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	120
	A. Letak Geografis.....	120
	B. Luas Wilayah	120
	C. Kependudukan	121
	D. Mata Pencaharian.....	122
	E. Tingkat Pendidikan	123
	F. Kelembagaan Pertanian.....	125
	G. Ikhtisar	126
BAB VI.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	128
	A. Hasil Penelitian	128
	1. Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo.....	128
	2. BUMP di Kabupaten Sukoharjo	139
	B. Pembahasan	192
	1. BUMP sebagai Inovasi Kelembagaan Pertanian	192
	2. Strategi Pengembangan BUMP kedepan.....	210
	3. Model Pengembangan BUMP	227
BAB VII.	KESIMPULAN DAN SARAN	232
	A. Kesimpulan	232
	B. Implikasi Penelitian	232
	1. Implikasi Teoritis	232
	2. Implikasi Praktis	233
	C. Saran	233

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.1.	Beberapa Kajian tentang Kelembagaan Petani.....	13
2.1.	Upaya Memberdayakan Kelompok Lemah.....	48
3.1.	Lingkup Kegiatan BUMP.....	99
4.1.	Data yang akan dikumpulkan, sifat data, dan sumber data.....	107
4.2.	Data yang akan dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan.....	114
5.1.	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2009	120
5.2.	Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, berdasarkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	121
5.3.	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009	122
5.4.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009	123
5.5.	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009	124
5.6.	Kelembagaan Petani di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010	125
6.1.	Jumlah Kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo	130
6.2.	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Sukoharjo	132
6.3.	Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Sukoharjo	133
6.4.	Kebutuhan, alokasi, dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Januari s.d. Desember tahun 2011	134
6.5.	Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Sukoharjo	134
6.6.	Penyelenggaraan Demplot	150
6.7.	Kegiatan BUMP yang sudah berjalan dan Harapan Pemangku Kepentingan.....	180

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1.	Hubungan antar Kelembagaan Lokal dan Regional/Nasional.	9
2.1.	Skema Strategi Pembangunan.....	21
2.2.	Segitiga Pilar Pembangunan (Pertanian Berkelanjutan).....	35
2.3.	Kerangka Pemberdayaan.....	46
2.4.	Sistem Penyuluhan Pertanian sebagai Proses Pendidikan....	49
2.5.	Sistem Penyuluhan Pertanian sebagai Proses Alih Teknologi..	51
2.6.	Alur Pikir Pembentukan BUMP.....	71
2.7.	Kerangka Berpikir.....	91
4.1.	Triangulasi Data/Sumber.....	116
4.2.	Triangulasi Metode.....	117
4.3.	Triangulasi Teori.....	117
4.4.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	119
5.1.	Jenis Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 (%).....	123
5.2.	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009	124
6.1.	Kemitraan Petani (Gapoktan), RMU, Penebas sebelum bekerjasama dengan BUMP.....	147
6.2.	Kelembagaan yang dibangun BUMP	148
6.3.	Pola Hubungan BUMP dengan RMU.....	182
6.4.	Pola Hubungan Dinas dan Gapoktan.....	182
6.5.	Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani	199
6.6.	Proses Pengembangan BUMP.....	231

ABSTRACT

SUGENG EDI WALUYO. T 620208018. 2012. **Badan Usaha Milik Petani/BUMP (Farmer Owned Enterprises) as Institutional Innovation for Empowering Farmers Self-reliance**. Dissertation, Sebelas Maret University Post Graduate Programme. Guided by Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS (Promotor), Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi (1st co-promotor); and Dr. Mahendra Wijaya, MS (2nd co-promotor).

The goals of this research are: (1) to analyze institutional models which is built by BUMP; (2) to analyze the BUMP development; and (3) to formulate future BUMP development model. This research designed as a *case study* strategy of *qualitative approach*, by subjective information and hystorical studies. Data collected by taking such techniques: (1) Observation; (2) participatory observation, (3) in-depth interviews, (4) document analysis, and FGD (Focus Group Discussion). All data validated by source and method triangulation and analyzed by qualitative data analysis, in the following order: data reduction, data presentation, and drawing conclusion with its verification.

The result of research shows BUMP in Sukoharjo Regency is experiencing the dynamics of conceptual level to its utilization for stakeholders. Meanwhile, BUMP in Sukoharjo Regency as institutional innovation models of farmers economy, can be seen at: (1) the difference of BUMP and Four Agri Support Activities (Catur Sarana Unit Desa); (2) BUMP as farmers professional economics institution, (3) BUMP as hybrid institution of business and community empowerment; (4) BUMP as business institution based on morality, and (5) BUMP as an non-governmental extension (private and self-reliance extension) development. So, the future model of BUMP development are (1) BUMP as farmers economics professional institution, (2) BUMP as hybrid institution of business and community empowerment, (3) BUMP as an corporate based on morality, (4) BUMP as non-governmental extension (private counseling and self-reliance extension).

Key words: BUMP, institutional innovation, empowerment

ABSTRAK

SUGENG EDI WALUYO. T 620208018. 2012. **Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Inovasi Kelembagaan Pemberdayaan Menuju Kemandirian Petani**. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS (Promotor), Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi (co-promotor I); dan Dr. Mahendra Wijaya, MS (co-promotor II).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis model kelembagaan yang dibangun oleh BUMP; (2) menganalisis dinamika pengembangan BUMP; dan (3) merumuskan model pengembangan BUMP di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif (qualitative approach)*, dengan informasi yang bersifat subyektif dan historis. Strategi yang digunakan adalah *studi kasus*. Pengumpulan data menggunakan teknik: (1) Observasi; (2) pengamatan partisipatif, (3) wawancara mendalam, (4) analisis dokumen, dan (5) FGD. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan metoda dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: BUMP di Kabupaten Sukoharjo mengalami dinamika dilihat mulai dari tataran konseptual hingga kemanfaatannya bagi pemangku kepentingan. Sebagai inovasi kelembagaan ekonomi petani, dapat dilihat pada: (1) Perbedaan BUMP dan Catur Sarana Unit Desa; (2) BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional, (3) BUMP sebagai hybrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, (4) BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, dan (5) BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya). Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada rumusan model pengembangan BUMP di masa mendatang, yang mencakup: (1) BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional, (2) BUMP sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, (3) BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, (4) BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya).

Kata Kunci: BUMP, inovasi kelembagaan, pemberdayaan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian, sejak dulu merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peranan atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang vital sekali. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor berikut (Indranada dalam Mardikanto, 1990):

- (1) Sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara.
- (2) Tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang sering disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Jika kebutuhan ini tak dapat dipenuhi maka kekurangannya harus diimpor yang berarti akan mengurangi *foreign-exchange* yang dibutuhkan untuk input pembangunan.
- (3) Sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sekali sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah.
- (4) Sektor pertanian merupakan basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting yang dapat menciptakan *spread-effect* dalam proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan *forward* dan *backward linkage* yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan.

(5) Sektor ini merupakan sumber *foreign-exchange* yang diperlukan untuk *input* pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan.

Ingersent (1984) yang dikutip Mardikanto (2010) menyatakan bahwa peranan pembangunan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dapat disampaikan beragam kontribusi pembangunan pertanian yang meliputi:

- (1) *Kontribusi Produk*, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan bahan-mentah dan bahan-baku industri.
- (2) *Kontribusi pasar*, baik pasar produsen maupun pasar konsumen produk industri di dalam negeri.
- (3) *Kontribusi faktor*, yang berupa transfer modal dan tenaga-kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan non-pertanian yang lainnya.
- (4) *Kontribusi valuta asing* baik yang berasal dari semakin meningkatnya nilai ekspor produk pertanian maupun substitusi impor produk pertanian. Kontribusi valuta-asing ini, secara implisit juga tercakup dalam bentuk kontribusi pasar, khususnya pasar internasional.

Kajian beberapa ahli membuktikan bahwa pembangunan pertanian di negara-negara Dunia Ketiga (*Less Developing Country/LDC's*) telah menunjukkan kontribusi yang sangat vital, yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- (1). Sebagian terbesar penduduk LDC's masih bekerja atau menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian.

- (2). LDC's yang pada umumnya tergolong sebagai negara berpenghasilan sedang atau rendah itu, umumnya masih menghadapi masalah pangan; baik sekarang maupun untuk masa-masa mendatang. Padahal, pangan tidak hanya memiliki arti ekonomi sebagai komoditi yang diperdagangkan, tetapi juga dapat dijadikan komoditi politik (*political commodity*). Kelangkaan tersedianya pangan tidak saja berakibat kepada kerawanan gizi yang mengganggu stabilitas perekonomian dan kelangsungan pembangunan, melainkan dapat pula berakibat pada terganggunya keamanan dan ketahanan nasional, yang pada akhirnya akan menghambat proses dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.
- (3). Ketidakmampuan LDC's untuk mengejar dan bersaing dengan negara-negara industri yang sudah maju, karena:
- a) Kelangkaan modal untuk melakukan investasi maupun untuk melakukan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mutlak sangat dibutuhkan oleh pembangunan industri.
 - b) Kelangkaan modal untuk melakukan investasi maupun penelitian dan pengembangan, berakibat lebih lanjut pada ketidakefisienan teknologi yang diterapkan. Produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar internasional, baik mutu maupun harganya.
 - c) Diberlakukannya kebijakan-kebijakan proteksi oleh negara-negara maju melalui: kebijakan tarif dan bea masuk, pembatasan jumlah kuota impor, serta adanya kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara-negara maju.

- d) Sektor pertanian terbukti memiliki ketegaran tinggi menghadapi gejolak perekonomian dunia dibanding sektor-sektor perekonomian yang lainnya.
- e) Sektor pertanian memiliki pautan (*linkages*) yang luas dengan sektor industri, baik pautan kedepan (*forward linkage*) dan pautan kebelakang (*backward linkage*); terutama pada awal tahapan pembangunan industri, yaitu sebagai penyedia bahan mentah, bahan baku, dan pemasok tenaga kerja yang murah.

Posisi penting pertanian dalam kaitannya dengan dukungan pembangunan pertanian terhadap pembangunan industri antara lain:

- (1). Akibat langsung dari keberhasilan pembangunan pertanian adalah: peningkatan produksi (pangan, bahan mentah, dan bahan baku untuk industri) dan peningkatan pendapatan masyarakat (petani). Meningkatnya produksi pangan, akan mendukung pembangunan industri dalam negeri yang berupa tersedianya tenaga kerja yang mau dibayar murah, karena harga pangan tersedia cukup dengan harga yang relatif rendah. Pada sisi yang lain peningkatan produksi bahan mentah dan bahan baku juga akan mendorong pembangunan industri, karena bahan mentah dan bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang relatif murah dibanding produk impor.
- (2) Peningkatan produksi pangan, bahan mentah, dan bahan baku, secara bersama-sama juga akan meningkatkan nilai ekspor dan menekan nilai impor, yang pada gilirannya akan menambah besarnya devisa negara yang sangat dibutuhkan untuk membeli barang-barang modal dari luar negeri.

- (3) Kenaikan pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan pertanian, akan membawa akibat lanjutan pada: a) meningkatnya tabungan masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber modal pembangunan industri; dan b) meningkatnya investasi, konsumsi rumahtangga, dan konsumsi input pertanian (sarana produksi, peralatan, dan mesin pertanian) yang secara bersama-sama akan meningkatkan konsumsi produk industri dalam negeri.
- (4) Semakin bertambahnya cadangan devisa, modal pembangunan yang berasal dari tabungan masyarakat, semakin mendorong pembangunan industri yang telah didukung oleh tersedianya: bahan mentah, bahan baku, dan tenaga kerja yang murah.
- (5) Pertumbuhan pembangunan industri akan dapat diharapkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produk industri dalam negeri, serta menurunnya harga produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.
- (6) Jumlah produksi industri dalam negeri yang terus meningkat dengan mutu dan harga jual yang relatif rendah, akan memperkuat daya saingnya di pasar domestik maupun di pasar internasional. Keadaan ini akan semakin merangsang pertumbuhan industri dalam negeri, karena produknya memiliki pangsa pasar yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, semakin luasnya pasar permintaan produk industri dalam negeri tersebut akan semakin menambah besarnya cadangan devisa dan pemupukan modal dalam negeri yang dapat digunakan untuk melanjutkan pembangunan industri.

- (7) Dengan semakin meningkatnya ragam, jumlah, dan mutu produk industri dalam negeri, akan memberikan pengaruh balik terhadap pembangunan pertanian, karena input-input (sarana produksi, alat, dan mesin pertanian) semakin tersedia dalam ragam, jumlah, dan mutu yang semakin baik dan pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat petani (yang penghasilannya juga semakin meningkat) itu.

Indonesia sejak lama telah dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki luas lahan dan agroklimat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian. Indonesia juga sejak lama dikenal sebagai penghasil beragam produk pertanian yang sangat dibutuhkan dan laku di pasar dunia, utamanya yang termasuk kelompok produk-produk perkebunan, rempah-rempah, kayu, dan perikanan. Sumbangan sektor pertanian terhadap serapan tenaga kerja, pendapatan nasional dan devisa juga masih sangat tinggi. Selain itu, keterkaitan kegiatan pertanian terhadap pertumbuhan sektor lain (industri, konstruksi, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa lain) sangat tinggi.

Selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kesatu (1970-1995), usaha-usaha pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan telah memprioritaskan pembangunan sektor pertanian sebagai titik berat pembangunan nasional. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian adalah tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat (petani) yang hidup di pedesaan. Kenaikan pendapatan itu, jumlah dan ragam serta mutu konsumsi masyarakat terus bertambah, baik konsumsi bahan pokok (khususnya

pangan) maupun konsumsi terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor nonpertanian.

Selama pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-2008), pembangunan pertanian semakin memperoleh perhatian, utamanya terkait dengan perannya untuk mendukung pembangunan industri. Dimulai dengan program BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada Bahan Makanan) pada 1967, program BIMAS terus dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong, BIMAS Nasional Yang Disempurnakan (BNYD), Intensifikasi Masal (INMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS), dan SUPRA INSUS (Mardikanto, 2009a).

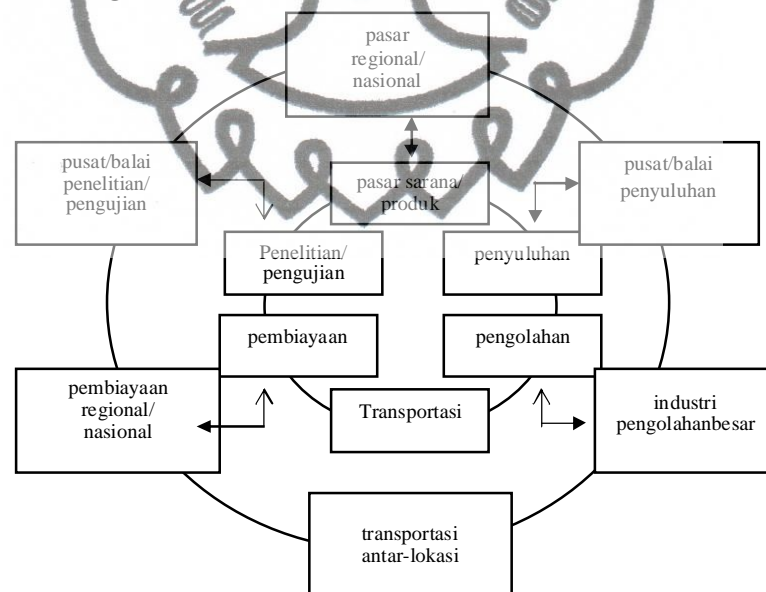
Keberhasilan pembangunan pertanian semenjak itu dilaporkan semakin menunjukkan kesuksesannya, seperti dicapainya swasembada beras pada tahun 2008 (meskipun tercatat masih mengimpor beras hampir sebanyak 300.000 ton) dan swasembada jagung pada 2009. Prestasi petani seperti itu, belum memperbaiki apresiasi pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain terhadap kehidupan petani. Kehidupan petani justru semakin menurun dan terkesan dijadikan “tumbal” pembangunan industri. Nilai tukar produk-produk pertanian terhadap kebutuhan petani semakin menurun, bahkan beragam insentif dan subsidi yang pernah diberikan kepada petani sejak awal dasawarsa 1970-an, berangsur-angsur semakin menurun dan sebagian telah ada yang dihapuskan. Petani selalu kesulitan memperoleh pupuk pada saat dibutuhkan, demikian juga dengan pemasaran produknya, mereka selalu dalam

kedudukan posisi tawar yang lemah terhadap pedagang dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain.

Meskipun gerakan reformasi telah berhasil mengubah sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi, tetapi keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik belum juga menunjukkan kebangkitannya, sehingga posisi tawar petani terhadap pemangku kepentingan yang lain selalu kalah. Akibatnya sejak 40 tahun terakhir, kehidupan petani di Indonesia tidak lebih baik dari yang digambarkan oleh Scott (1976), yaitu seperti orang yang terendam air, yang airnya sampai ke bibir. Sedikit saja bergerak, airnya akan masuk ke mulut, dan membawanya tenggelam, sehingga mereka lebih baik diam saja, agar tetap selamat. Petani-petani yang dalam kondisi termarginalkan seperti itu, sadar betul untuk lebih baik tetap diam demi keselamatannya. Sebab, jika (ketahuan) bergerak, pasti akan ditindas dan mereka pasti akan kalah, bahkan dihabisi seperti yang pernah dialami oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) di masa Orde Baru.

Era reformasi yang bergulir sejak awal 1998 menunjukkan kondisi pertanian di Indonesia semakin menunjukkan penurunan. GEMA PALAGUNG (Gerakan Menanam Padi, Palawija dan Jagung) yang bersamaan dengan penyaluran Kredit Usahatani (KUT) tidak banyak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan yang terjadi adalah membengkaknya tunggakan KUT karena diselewengkan oleh sementara pihak yang terkait dalam penyalurannya. Semakin memburuknya pembangunan pertanian, menyadarkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendeklarasikan *Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan* (RPPK) pada tahun 2005.

Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani telah dilakukan melalui penerapan inovasi teknologi dan inovasi sosial. Di pihak lain, inovasi kelembagaan juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian (Mardikanto, 2009a). Berkaitan dengan hal tersebut, Mosher (1969) menyatakan bahwa untuk membangun struktur perdesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan: (1) sarana produksi dan peralatan pertanian, (2) kredit produksi, (3) pemasaran produksi, (4) percobaan/pengujian lokal, (5) penyuluhan, dan (6) transportasi. Keenam jenis kelembagaan tersebut, harus tersedia di setiap lokalitas usahatani dan memiliki keterkaitannya dengan lembaga sejenis di tingkat nasional sebagaimana tergambar dalam Gambar 1 (Mosher, 1983).



Gambar 1.1. Hubungan Antar Kelembagaan Lokal dan Regional/Nasional

Konsep Mosher (1969) tersebut menginspirasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang untuk pertama kali ditawarkan oleh Pakpahan (2007). FACILITATOR¹ (Himpunan Mahasiswa Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta) bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2009 telah mengembangkan BUMP yang merupakan hibrid dari lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan masyarakat (petani).

Kajian Mardikanto *et al* (2010) keberadaan BUMP telah memperoleh respon positif dari Pengurus GAPOKTAN, pengelola RMU yang menjadi mitra-kerja BUMP, maupun dari Penyuluh Pertanian (PPL) dan Dinas Pertanian setempat. Meskipun demikian, BUMP juga mengalami beberapa tantangan dan masalah, yang terkait dengan SDM dan manajemen maupun pengembangan usahanya.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari adanya berbagai respon positif dari pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo, maka ada prospek untuk mengembangkan BUMP, tetapi harus diakui bahwa untuk mengembangkannya banyak menghadapi masalah dan tantangan yang memerlukan kajian khusus dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹ FACILITATOR merupakan akronim dari *Facilitating Capacity Building, Institution, Legal, Investment, Trading and Marketing, for Public and Private Sector*

1. Bagaimana model kelembagaan yang dibangun oleh BUMP?
2. Bagaimana dinamika pengembangan BUMP?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan BUMP?

C. Tujuan Penelitian

Mendasarkan diri pada latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis model kelembagaan yang dibangun oleh BUMP.
2. Menganalisis dinamika pengembangan BUMP.
3. Merumuskan model pengembangan BUMP di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengeksplorasi BUMP sebagai inovasi kelembagaan di pedesaan; sehingga dapat berkontribusi kepada:

1. Pengambil kebijakan, diharapkan dapat mengenalkan BUMP sebagai model kelembagaan baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Implikasinya, BUMP dapat dikembangkan secara luas di Indonesia.
2. Dunia akademik, diharapkan dapat menyumbangkan referensi baru dalam khasanah penelitian tentang kelembagaan dalam mendukung pembangunan pertanian.

E. Keterbaruan Penelitian

Berbagai kajian tentang kelembagaan telah dilakukan, namun masih terbatas pada aspek-aspek produksi, tata niaga, kemitraan, yang bersifat parsial dan kurang holistik melihat kelembagaan petani. BUMP merupakan kelembagaan petani yang berlandaskan pada aspek pemberdayaan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Kajian tentang BUMP ini menjadi sangat diperlukan sebagai inovasi kelembagaan baru yang berorientasi kepada kesejahteraan petani. Beberapa kajian mengenai kelembagaan petani dapat dilihat pada tabel 1.1.



Tabel 1.1. Beberapa Kajian tentang Kelembagaan Petani

No	Penulis	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Adri	Analisis kelembagaan dan ekonomi usahatani Kopi Arabika organik di Propinsi Daerah Istimewa Aceh	1999	Menganalisis keragaan kelembagaan dan keadaan ekonomi usahatani Kopi Arabika	Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif	Kelembagaan kemitraan mampu meningkatkan pendapatan petani
2.	Amry Rakhman	Analisis Kelembagaan dan Ekonomi Usaha Pertambakan Udang Pola Tambak Inti Rakyat Transmigrasi di Kab. Sumbawa NTB	1999	Menganalisis keragaan kelembagaan dan keadaan ekonomi inti dan plasma	Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif	Perlu nya perubahan bentuk kelembagaan antara inti dan plasma dari “integrasi vertikal” menjadi sistem kontrak
3.	Frits Wally	Analisis ekonomi tataniaga kakao rakyat dan faktor-faktor yang mempengaruhi opsi kelembagaan tataniaga petani kakao di kabupaten Jayapura	2001	Menganalisis struktur dan sistem tata niaga kakao dan mempelajari bentuk-bentuk kelembagaan tataniaga kakao rakyat	Pendekatan kuantitatif (survei)	Kelembagaan tradisional menjadi pilihan menarik karena ternyata margin tataniaga kelembagaan kemitraan jauh lebih rendah dibandingkan pada kelembagaan tradisional
4.	Justinus Kay	Analisis tata guna lahan dan ekonomi kelembagaan mengarah kepada pengelolaan hutan berkelanjutan (kasus hutan sesaot di kawasan Hulu DAS Babak NTB)	2001	Menganalisis optimum desain sehingga DAS dapat menunjang fungsi ekonomi, hutan, dan lingkungan dengan mewujudkan kelembagaan pengelolaan hutan berkelanjutan	Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif	Untuk mewujudkan kelembagaan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilakukan melalui penegasan peran kelembagaan lokal
5.	Marintan R. Sinurat	Analisis kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di wilayah pesisir timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan	2002	Menganalisis fungsi dan wewenang lembaga dalam pengelolaan sumberdaya pesisir	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Perlu nya sinergitas semua komponen lembaga yang ada di pesisir dalam pengelolaan sumberdaya yang ada sehingga menghindari berbagai konflik yang akan muncul
6.	Dwi Yani Prasetyanti	Analisis kelembagaan dan keragaan ekonomi industri kecil	2002	Menganalisis sistem kelembagaan keuangan pada industri kecil dan	Pendekatan kuantitatif (Multinomial Logistik,	Lembaga keuangan non-bank lebih berperan dibandingkan lembaga bank

No	Penulis	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
		di Kab. Bogor		faktor yang mempengaruhi pilihan pengrajin terhadap kelembagaan yang ada	Analisis entropy dan Cobb Douglas)	
7.	Zuriaty Rifai	Analisis kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Perairan Umum Labak lebung Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan	2002	Menganalisis sistem kelembagaan pengelola lelang, peranan lembaga lokal, Pemda, dan kelembagaan pemasaran	Pendekatan kuantitatif (LQ, analisis <i>revenue function</i> , analisis QM)	Peran pemerintah belum optimal, perlunya kewenangan lebih pada lembaga lokal dalam pengelolaan perairan umum Labak lebung
8.	Sumadyo Djoko Sutandar	Analisis kelembagaan irigasi dalam rangka desentralisasi pengelolaan irigasi di Kab. Banyuwangi	2002	Meneleah Kinerja kelembagaan irigasi	Pendekatan kuantitatif	Kinerja kelembagaan irigasi tidak efisien
9.	Yoisye Lopulalan	Analisis ekonomi kelembagaan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan kecil di Pulau Saparua	2003	Menelaah konsep kemitraan pola modal ventura dalam pemberdayaan nelayan kecil dan menganalisis pola koordinasi kelembagaan kemitraan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Pola kemitraan belum menguntungkan dan kurang memberdayakan nelayan karena polanya yang bersifat <i>top down</i>
10.	Annas Zubair	Analisis kelembagaan dan kelayakan usaha sistem kontrak tani informal (<i>contract farming</i>) pada tataniaga sayuran	2003	Menganalisis sistem kelembagaan <i>contract farming</i> pada tata niaga sayuran	Pendekatan kuantitatif	Sistem kelembagaan <i>contract farming</i> masih belum menguntungkan petani, margin lebih dimikmati oleh pedagang besar/pengumpul
11.	Puji Iswari	Peranan kelembagaan penyuluhan terhadap perilaku masyarakat desa hutan dalam pembangunan hutan tanaman industri lestari	2004	Mengkaji keterkaitan antara faktor individu dan lingkungan, peran kelembagaan dengan sikap dan perilaku partisipasi masyarakat dalam pembangunan HTI lestari	Pendekatan kuantitatif (penelitian deskriptif korelasional)	Faktor individu, lingkungan dan peran kelembagaan berhubungan nyata dengan sikap dan perilaku partisipasi. Kelembagaan penyuluhan lebih berperan besar dibandingkan Pemda dan LSM

No	Penulis	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
12.	M. Rubiansyah	Analisis ekonomi dan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	2004	Menganalisis permasalahan yang dihadapi perkebunan kelapa sawit rakyat dari aspek ekonomi dan kelembagaan	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Perkebunan kelapa sawit rakyat akan efisien pada luasan lahan 2,1-4 ha. Kelembagaan belum secara maksimal mendorong kesejahteraan petani
13.	Chandra Gustiar	Analisis kelembagaan dan peranannya dalam penataan ruang di Teluk Pangpang	2005	Menganalisis kondisi kelembagaan dan peran masing-masing kelembagaan dalam penataan ruang	Pendekatan kuantitatif (J.C. SSA) dan kualitatif	Beberapa kelembagaan yang berperan penting dalam tata ruang adalah: Bappeda, DKP, dan nelayan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam penataan ruang adalah kependudukan dan SDM, infrastruktur, lingkungan, kelembagaan dan ekonomi
14.	Pinondang Poltak Marganda	Analisis ekonomi kelembagaan informal contract farming dalam usahatani nenas di Kabupaten Subang	2006	Mengidentifikasi dan mengkaji sistem "kontrak pertanian" dan bagaimana peran lembaga tataniaga	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Kontrak farming menguntungkan bagi petani, namun demikian penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan petani dalam meningkatkan posisi tawar
15.	Ahmad Yani	Analisis ekonomi kelembagaan usaha budidaya ikan dalam keramba jaring apung (<i>floating cage net</i>) di wilayah kepulauan Riau	2009	Menganalisis bentuk kelembagaan pasar ikan kerapu di Kepri	Pendekatan kuantitatif-kualitatif	Kelembagaan kontrak informal dapat digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan biaya transaksi
16.	Dian Sahor Fonna	Analisis kelembagaan dan keragaman usaha industri pengolahan ikan di Kabupaten Bangka	2009	Menganalisis kondisi kelembagaan modal dalam pengembangan industri pengolahan ikan	Pendekatan kuantitatif	Kelembagaan modal belum berperan optimal dibandingkan kelembagaan lain yang ada
17.	Totok Mardikanto, Edi Waluyo <i>et al</i>	Respon petani terhadap BUMP sebagai inovasi kelembagaan pertanian	2010	Menganalisis mengenai bagaimana respon masyarakat (petani, penyuluh, RMU) terhadap BUMP	Pendekatan kualitatif	Respon masyarakat cukup positif, namun demikian perlu adanya model kelembagaan yang bisa disepakati oleh semua pihak

BUMP sebagai sistem kelembagaan baru, sehingga penelitian mengenai kelembagaan ini belum banyak dilakukan. Penelitian dasar yang dilakukan oleh Mardikanto *et al* (2010) lebih berfokus kepada respon pemangku kepentingan mengenai keberadaan BUMP. Berdasarkan penelitian tersebut, memunculkan kesimpulan bahwa BUMP dinilai perlu di kembangkan (mendapatkan respon yang baik). Semua GAPOKTAN, sebagian RMU, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berminat untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan BUMP, baik dalam kegiatan *on-farm* (budidaya-padi), maupun *off-farm* (pemasaran produk).

Penelitian ini akan berusaha menelisik lebih mendalam mengenai sistem kelembagaan yang ada di dalam BUMP. Pemahaman mengenai kelembagaan BUMP akan membantu sistem kerja BUMP dalam menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan. Muaranya adalah tercapainya tujuan BUMP sebagai lembaga yang berorientasi pada bisnis dan pemberdayaan

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena memiliki keunikan yang menunjukkan orisinalitas penelitian, yaitu dalam hal:

- **Lingkup penelitian:** lebih holistik dalam melihat berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial. Pada umumnya penelitian-penelitian terdahulu hanya melihat salah satu aspek tersebut, misalnya: hanya aspek sosial, ekonomi, *on-farm*, *off-farm*, sehingga tidak secara komprehensif menganalisis kelembagaan petani secara utuh.

- **Tujuan penelitian:** tidak sekedar melihat sistem kelembagaannya saja, akan tetapi juga berusaha mendalami bagaimana kemanfaatan lembaga bagi kesejahteraan petani dan daya dukung kelembagaan agribisnis lainnya dalam mendukung keberlangsungan BUMS.
- **Metoda penelitian:** pada penelitian-penelitian terdahulu, metode yang dipergunakan beragam baik kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini lebih cenderung bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus.



BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

a. Sejarah, Konsep, dan Strategi Pembangunan

Budiman (1995), Suwarsono dan Alvin (2006) dan Djojohadikusumo (1994) menyatakan bahwa istilah pembangunan (*development*) dan *undevelopment* muncul pada tanggal 20 Januari 1949 pada saat presiden Amerika Harry S. Truman mengumumkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Para kalangan ilmuwan sosial pada saat itu sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori pembangunan dan modernisasi. Walaupun pada hakikatnya teori-teori pembangunan yang digunakan merupakan pandangan para ahli sebelumnya. Adam Smith menyatakan bahwa proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*) antara lain Malthus dan Ricardo. Malthus, dan Ricardo yang disebut sebagai aliran klasik, mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya

akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Salah satu pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar. Pada intinya model ini berpijak pada pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Berbeda dengan Harrod-Domar yang memberikan tekanan kepada pentingnya peranan modal, Arthur Lewis dengan model *surplus of labor*-nya memberikan tekanan kepada peranan jumlah penduduk.

Teori pertumbuhan neoklasik mulai memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonom seperti Rostow menemukan "*Growth theory*"-nya, dan waktu itu pula McClelland dan Inkeles menemukan teori modernisasi mereka. Salah satu hasil penting studi mereka adalah bahwa gagasan *development* dan modernisasi harus menjadi pilar utama bagi kebijaksanaan program bantuan dan politik luar negeri Amerika. Meskipun teori modernisasi bermacam-macam, namun mereka meyakini satu hal yang sama yaitu faktor manusia (bukan struktur dan sistem) menjadi fokus utama perhatian mereka. Pertama, yang menggunakan metafora pertumbuhan yakni tumbuh sebagai organisme. Mereka melihat *development* sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran ini dapat dijumpai dalam teori pertumbuhan yang sangat terkenal yaitu "*the five-stage scheme*" yang dikembangkan W.W. Rostow. Asumsinya adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami "tradisional" dan akhirnya

“modern”. Fokus utama Rostow adalah perlunya elite wiraswasta yang menjadi motor proses perubahan dari tradisional menjadi modern.

Menurut Rostow, transformasi dari negara yang terkebelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu tahap *Traditional Society*, *Preconditions for Growth*, *The Take-off*, *The Drive to Maturity*, dan *The Age of High Mass Consumption*

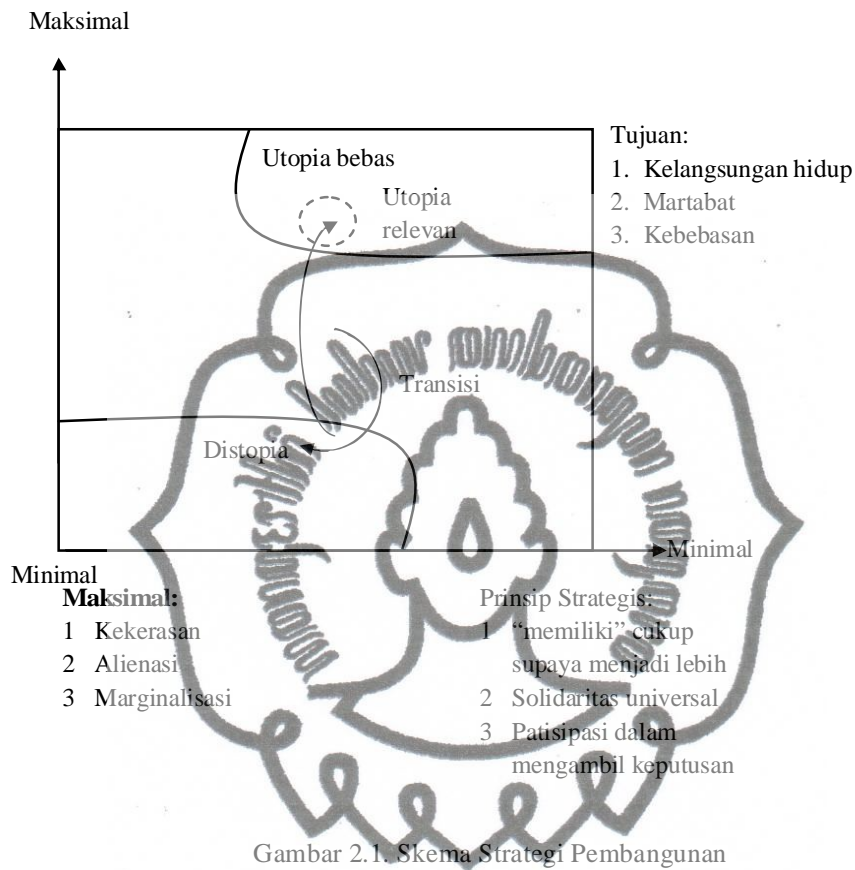
Pandangan lain didasarkan pemikiran Mc Clelland, Inkeles, dan Smith. Berdasarkan tafsiran Mc Clelland atas Max Weber, jika etika protestant menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber tentang Etika Protestan menurutnya adalah “*the need for achievement*” (NAch). Alasan mengapa rakyat dunia ketiga terbelakang disebabkan karena rendahnya “*Need For Achievement*”.

Salah satu harapan atau anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah. Namun, pengalaman pembangunan dalam tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat di lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan itu. Bahkan di banyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Hal ini disebabkan oleh karena meskipun pendapatan dan konsumsi makin meningkat, kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih mampu, lebih dapat memanfaatkan kesempatan, antara lain karena posisinya yang

menguntungkan (*privileged*), sehingga akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan. Dengan demikian, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin.

Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalah-masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi pembicaraan pula dalam kajian-kajian pembangunan. Goulet, (1997) yang mengkaji falsafah dan etika pembangunan, misalnya, mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan (1) terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (*grassroots oriented*), (2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan (3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan perlu diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Istilah pembangunan juga seringkali diidentikkan pertumbuhan (*growth*), modernisasi, perubahan, demokrasi, produktivitas, industrialisasi, perubahan sosial, *westernisasi*, *evolusi socio-kultural*. Pembangunan merupakan maksimalisasi nilai yang dicita-citakan dan minimalisasi kekerasan dalam segala bentuknya. Prinsip strategis memberi petunjuk bagaimana proses ini bisa dilaksanakan.



Gambar 2.1. Skema Strategi Pembangunan (sumber: Sastrapratedja, 1986a)

b. Etika Pembangunan

Setelah perang dunia ke-2 pembangunan diterjemahkan sebagai permasalahan ekonomi. Sehingga target pertumbuhan harus direncanakan, perlunya mobilisasi sumberdaya, peningkatan fungsi kelembagaan untuk melakukan investasi, manajemen, dan produksi. Pembangunan diukur sebagai pendapatan nasional yang tinggi dan out put yang besar. Sehingga pada awalnya pembangunan diidentikkan sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan

ekonomi menggunakan metodologi “ekonomi positif” atau ekonomi konvensional yang mengabaikan etika lain yang sebenarnya juga eksis di dalam masyarakat.

Proses-proses pembangunan yang dijalankan penuh dengan kontradiksi dan konflik. Kontradiksi tersebut menyangkut: (1) apa yang baik dan bagaimana cara meraihnya; dan (2) apa biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat sebagai akibat aktivitas pembangunan. Selain itu pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat (Goulet, 1997).

Berbagai pendapat publik mengenai konsep dan praktik pembangunan yang menimbulkan konflik tersebut memunculkan berbagai etika pembangunan. Paling tidak sebelum menjalankan pembangunan, ada hal penting yang harus menjadi pertanyaan dasar yaitu: (1) Apa makna hidup yang baik bagi masyarakat?; (2) Hal apa yang mendasari keadilan dalam masyarakat?; (3) Bagaimana manusia menempatkan diri dengan lingkungan alamnya (eksploitatif atau menyelaraskan diri)? Menurut Goulet (1974) yang dikutip Sastrapratedja, (1986b), etika pembangunan memiliki tugas:

- (1) mengolah sikap yang sadar dan kritis mengenai tujuan-tujuan pembangunan, tidak hanya tujuan yang secara formal dirumuskan, tetapi juga yang de facto terjadi dalam proses pembangunan,
- (2) etika pembangunan menganalisis proses pembangunan “dari dalam” dan mengisolasi nilai dari anti nilai yang tersembunyi di balik proses pembangunan tersebut,

- (3) etika pembangunan merumuskan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip dasar sebagai orientasi dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan,
- (4) etika pembangunan bertugas membangun kerangka teoritis yang terpadu,
- (5) etika pembangunan harus berdialog dengan ilmu-ilmu lainnya, setiap disiplin ilmu memberikan definisi pembangunan yang berbeda,
- (6) menyadarkan manusia akan tanggungjawab dan kewajiban baru,
- (7) membantu manusia untuk melihat implikasi dari kekuatan-kekuatan yang dibangunnya sendiri yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan manusia (teknologi, ilmu, struktur-struktur dan sebagainya),
- (8) menyadarkan manusia akan tanggung jawab dalam mengendalikan dan mengelola kekuatan-kekuatan yang telah dibangunnya.

Ada dua setting norma yang mendasari etika pembangunan yaitu: (1) memandang bahwa etika pembangunan adalah landasan pijak dan panduan ke arah mana pembangunan akan dievaluasi; (2) memandang bahwa etika pembangunan menjadi dasar pembenaran akan hak, kebutuhan, dan cara mengukur jumlah “korban” yang termarginalkan oleh aktivitas perubahan.

Perkembangan selanjutnya, paling tidak ada 3 model teori etika dalam pembangunan yaitu (1) model Yugoslavia; (2) model Amerika Tengah; dan (3) model USA. Ketiga model tersebut akan membantu dalam: (1) mendiagnosa masalah vital yang dihadapi masyarakat; (2) membantu memberikan arah kepada publik dalam memilih kebijakan; dan (3) menjelaskan bagaimana dilema yang terjadi antara masalah dan kebijakan yang diambil.

2. Pembangunan Pertanian

a. Pengertian

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya (Saragih, 2002). Sementara menurut Riyadi *dalam* Mardikanto (1997) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Van Den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa pembangunan pertanian memiliki makna perubahan dalam teknik produksi pertanian dan sistem usaha tani menuju ke situasi yang diinginkan, biasanya situasi yang memungkinkan petani dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian pertanian. Tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian di kebanyakan negara adalah untuk meningkatkan produksi pangan dalam jumlah yang sama dengan permintaan akan bahan pangan yang semakin meningkat, dengan harga yang bersaing di pasar dunia melalui produksi yang efisien.

Saragih dan Krisnamurti *dalam* Mardikanto (2009a) menyatakan bahwa konsep pembangunan pertanian tidak akan terlepas dari sistem agribisnis, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan tumbuhan dan hewan (komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan) yang berorientasi pasar (bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pengusaha sendiri) dan perolehan nilai tambah. Paling tidak bahwa pembangunan pertanian yang terlekat dalam sistem agribisnis memuat dua aspek, yaitu: pertama, agribisnis merupakan

konsep dari suatu sistem yang integratif. Kedua, agribisnis menempatkan kegiatan pertanian sebagai kegiatan yang utuh dan komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan pertanian harus memperhatikan berbagai sub-sistem yang ada, yaitu sub-sistem pengadaan sarana produksi pertanian, budidaya usaha tani, pengolahan dan industri hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan sistem kelembagaan penunjang.

b. Arah Pembangunan Pertanian

Sejak awal 1970-an pembangunan pertanian diarahkan pada pencapaian tingkat swasembada pangan, dengan dukungan berbagai kebijakan pemerintah melalui subsidi (air, bibit, pupuk dan obat-obatan) disamping subsidi harga dasar (Winarno, 1999). Pembangunan pertanian yang bersifat *top-down* yang dilakukan dengan revolusi hijau melalui intensifikasi pertanian untuk menyukseskan program swasembada pangan ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan watak dan persepsi ditingkat bawah. Pembangunan hanya diarahkan untuk peningkatan produksi sementara kesejahteraan petani diabaikan. Pada era reformasi pembangunan di segala bidang telah terjadi perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional. Secara garis besar, arah pembangunan sesuai amanat UU. No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: **Pertama**, mewujudkan bangsa yang berdaya saing; **kedua**, mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan; **ketiga**, mewujudkan Indonesia asri dan lestari; dan **keempat**, mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Perwujudan dari cita-cita tersebut dapat dilalui melalui pembangunan pada sector pertanian, perikanan,

kelautan, pertambangan, kehutanan, energy dan pertambangan, maupun lingkungan hidup.

Perwujudan pemerataan dan pembangunan berkeadilan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan: (a) mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri; (b) mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau; dan (c) mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Perwujudan bangsa yang berdaya saing dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestic dengan orientasi dan berdaya saing global. Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumberdaya alam tropis yang unik dan khas melalui: (1) diversifikasi produk dan inovasi pengolahan sumberdaya alam agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global; dan (2) industry berbasis SDA sekaligus menekankan pada pemeliharaan SDA dan meningkatkan kuantitas serta kualitasnya.

Sajogyo (2000) merumuskan delapan upaya dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, yaitu:

- (1) Mengembangkan praktek mengelola sumberdaya alam yang menjamin keberlanjutan.

- (2) Menciptakan teknologi tepatguna yang hasilnya punya pasaran baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (pendapatan).
- (3) Mengembangkan keterampilan manajemen yang mesti dikuasai dalam bidang pasaran dan jasa-jasa pendukungnya
- (4) Mengembangkan sistem pasaran yang dinamis dan pelayanan prasarana yang mendukung.
- (5) Mengembangkan pasar keuangan dipedesaan secara lengkap.
- (6) Mengembangkan kerangka kebijakan yang sesuai dalam keterkaitan saling dukung dengan sektor-sektor lain demi dampak maksimum dalam pembangunan (pertanian dan pedesaan).
- (7) Mengembangkan aliansi-aliansi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lain lembaga yang punya kepentingan.
- (8) Mengembangkan strategi-strategi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan di desa secara meluas.

Delapan butir isu-isu itu dapat dikelompokkan dalam tiga gugus. Gugus pertama mencakup dua isu (potensi sumberdaya alam dan teknologi unggul-tepatguna) sedangkan gugus kedua mencakup 3 isu berikutnya (perihal manajemen dan pasaran) yang bersama gugus pertama mengisi paradigma pembangunan wilayah (daerah/lokal) dimana "*farming district*" (Mosher) adalah satuan wilayah terkecil dalam menggerakkan pertanian (Sajogyo, 2000).

c. Tujuan Pembangunan Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian selama Pembangunan Jangka Panjang I hingga awal Pembangunan Jangka Panjang II relatif tidak banyak berubah, yakni tetap di seputar: (a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani kecil dan nelayan, (b) meningkatkan perluasan lapangan kerja, (c) meningkatkan daya saing pertanian dan pemanfaatan serta perluasan pasar di dalam dan di luar negeri, (d) memelihara pemantapan swasembada pangan dan kualitas gizi masyarakat, (e) meningkatkan kemampuan petani dalam menguasai dan menerapkan teknologi pertanian, dan (f) meningkatkan kemampuan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan agribisnis dan agroindustri (Sutrisno,1999). Sedangkan RPJN 2005-2025 mengamanatkan bahwa tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui system pertanian industrial, sehingga pembangunan jangka panjang sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian.

Nikmatullah (1995) menambahkan bahwa pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat tani yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia dan tinggal di pedesaan. Meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat petani dan masyarakat pedesaan dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas usaha tani. Untuk dapat mengelola usahatani secara efisien diperlukan adanya perubahan perilaku petani untuk mampu bertani dengan baik dan berusaha tani lebih menguntungkan.

Mubyarto (1989) berpendapat serupa bahwa pembangunan pertanian diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh.

Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.

Pendapat berbagai para ahli tersebut apabila disimpulkan, maka pengertian pembangunan pertanian yaitu, pembangunan pertanian pada dasarnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta pengembangan pola usaha tani yang berbasis agribisnis dan agroindustri.

d. Pembangunan pertanian berkelanjutan

Istilah *sustainability*² pertama kali digunakan pada *United Nations World Commission on the Environment and Development Report* yang dipublikasikan pada tahun 1987. *Sustainability* dimaknai sebagai “*meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Definisi ini berimplikasi pada komitmen untuk masa depan. Generasi pada saat ini seharusnya bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka dengan menjaga keseimbangan ekologi, karena kegagalan dalam menjaga lingkungan akan mengorbankan generasi berikutnya.

² Kata *sustainable* mengandung dua makna, yaitu *maintenance* dan *prolong*. Artinya pertanian berkelanjutan harus mampu merawat atau menjaga (*maintenance*) untuk jangka waktu yang panjang (*prolong*). Dalam bahasa Indonesia, *sustainable* diterjemahkan dengan kata berkelanjutan. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah yang lebih tepat, yaitu pertanian *lumintu* (terus-menerus), *sempulur* (lestari, langgeng), atau *milimintir*. Karena lahir sebagai solusi alternatif untuk mengatasi kegagalan pertanian modern di masa lalu, pertanian berkelanjutan juga dapat disebut pertanian *pascamodern* atau pertanian posmo (Salikin, 2003).

Fokus perhatian pada masa depan keturunan menjadi hal yang penting, namun demikian pada hakikatnya *Sustainability* di *drive* oleh dua filosofi mendasar: (1) alam memiliki nilai yang sudah melekat dan kadang-kadang keinginan manusia harus dikorbankan untuk menjaga nilai-nilai ekologi dan lingkungan tersebut; (2) keseimbangan ekologi sangat penting untuk kepentingan manusia pada saat ini dan yang akan datang.

The International Alliance for Sustainable Agriculture mengadakan konferensi pada tahun 1990 di *Asilomar Conference Center* di California. Deklarasi *Asilomar* untuk *sustainable agriculture* disetujui oleh lebih dari 800 delegasi yang menghadiri konferensi tersebut. Pertemuan tersebut di mulai dengan pernyataan: "*the present system of American Agriculture cannot long endure*". Paling tidak ada tujuh hal penting dalam Deklarasi *Asilomar*, yaitu: (1) mempromosikan dan mendukung komunitas pedesaan yang sehat, (2) memperluas kesempatan kepada petani yang baru dan yang sudah ada untuk menggunakan sistem yang berkelanjutan, (3) memberikan inspirasi kepada public mengenai pangan sehat, (4) memantau perkembangan etika penggunaan lahan, (5) memperluas pengetahuan dan akses mengenai informasi pertanian berkelanjutan, (6) *me-reform* keterkaitan antara pemerintah, industry dan pertanian, dan (7) meredefinisi peran *U.S. Agriculture* dalam komunitas global.

Ketujuh hal tersebut merupakan tujuan komprehensif dalam bidang sosial, lingkungan, agronomi, dan ekonomi. Pertanian didefinisikan lebih dari sekedar aktifitas produktif. *The US. Alliance for Sustainability* (2004) menyatakan bahwa *sustainable agriculture* harus mencakup empat criteria: (1) *ecologically sound*,

mampu menjaga keanekaragaman hayati dan menggunakan sumberdaya secara efisien, menghindari sistem yang merusak; (2) *economically viable*, harus bersifat menguntungkan; (3) *socially just*, sumberdaya dan kekuasaan harus didistribusikan secara adil sehingga kebutuhan dasar dan hak-hak semua orang dapat terjamin. Mereka harus diberdayakan untuk mengendalikan hidupnya. Inilah yang disebut Sen (1999) sebagai “*development as freedom*”; dan (4) *Humane*-petani dan praktisi yang baik adalah yang memiliki rasa penayang, menjaga keseimbangan antara lahan, tumbuhan, hewan piaraan, lingkungan dalam kondisi yang harmoni (Zimdahl, 2006).

Kata “berkelanjutan” sekarang ini digunakan secara meluas dalam lingkup program pembangunan. Namun apa arti sesungguhnya kata ini? Keberlanjutan dapat diartikan sebagai “menjaga agar suatu upaya terus berlangsung”, “kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar tidak merosot”. Dalam konteks pertanian, keberlanjutan pada dasarnya berarti kemampuan untuk tetap produktif sekaligus tetap mempertahankan basis sumberdaya. *Technical Advisory Committee of the CGIAR* (TAC/CGIAR 1988) dalam reijntjes menyatakan, “Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam” (Reijntjes, 1999).

WCED (1987) dalam Suryana (2005) menyatakan bahwa Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada sektor pertanian.

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980'an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Konsep pertama dirumuskan dalam *Bruntland Report* yang merupakan hasil kongres Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa : *"Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka"*.

FAO (1989) dalam Suryana (2005) juga menyatakan bahwa berdasarkan definisi pertanian berkelanjutan tersebut, organisasi pangan dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai berikut :

"manajemen dan konservasi basis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpenuhinya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun generasi mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial"

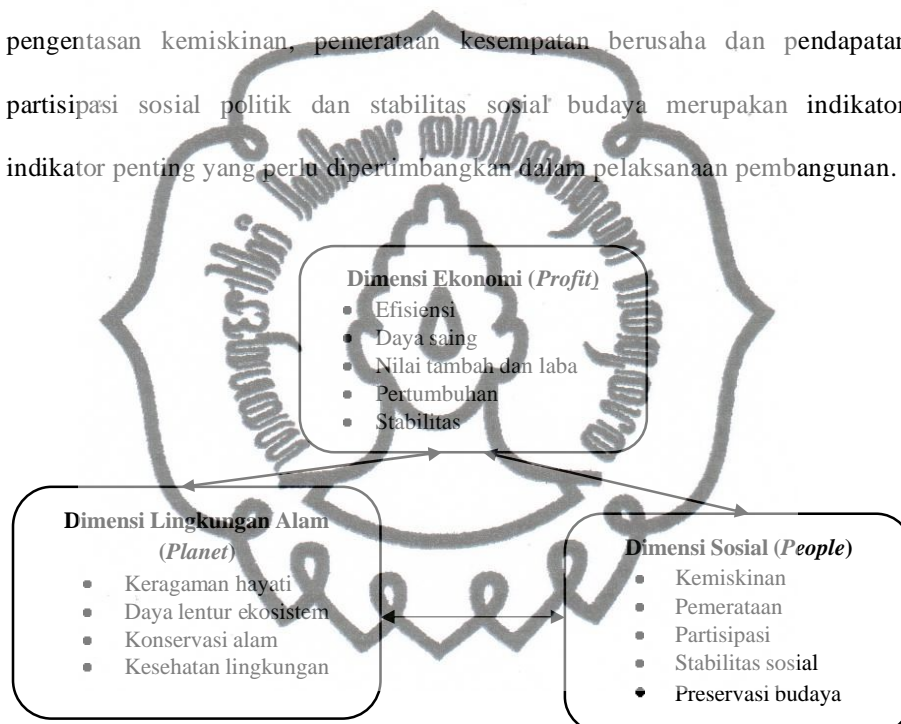
Departemen Pertanian USA SARE (Sustainable Agriculture Research and Education) membagi tiga tujuan utama dari *sustainable agriculture*: (1) meningkatkan pendapatan petani; (2) mempromosikan upaya memelihara lingkungan: melindungi dan meningkatkan kualitas tanah, mengurangi ketergantungan input yang *non-renewable* seperti pupuk dan pestisida sintetis, meminimalkan hal lain yang merusak lingkungan; (3) mempromosikan kesejahteraan keluarga petani dan komunitas.

Douglass (1984) mendeskripsikan tiga hal utama dalam makna *sustainability*, yaitu: (1) *sustainability of production*, mampu menyediakan pangan bagi manusia; (2) *sustainability as stewardship*, mampu menjaga keseimbangan ekologi dan kualitas lingkungan; (3) *sustainability as community*, memelihara organisasi sosial dan budaya kehidupan pedesaan.

Suryana (2005) menyatakan bahwa sejak akhir tahun 1980'an kajian dan diskusi untuk merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan yang operasional dan diterima secara universal terus berlanjut. Pezzy (1992) mencatat, 27 definisi konsep berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan, dan tentunya masih ada banyak lagi yang luput dari catatan tersebut. Walau banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan, yang diterima secara luas ialah yang bertumpu pada tiga pilar: ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe, 1993). Dengan perkataan lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*), keberlanjutan ekologi alam (*planet*), atau pilar Triple-P seperti pada Gambar 2.2.

Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi, dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk laba), dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi (material) manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), preservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.



Gambar 2.2. Segitiga Pilar Pembangunan (Pertanian Berkelanjutan)

Dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya lentur biologis (sumberdaya genetik), sumberdaya tanah, air dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Penekanan dilakukan pada preservasi daya lentur

(*resilience*) dan dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan, bukan pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat diwujudkan.

Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara seimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumberdaya alam dan lingkungan merupakan basis untuk kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial-budaya maupun kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang tidak stabil atau menimbulkan tindakan yang merusak kelestarian sumberdaya alam dan merusak kesehatan lingkungan, sementara ancaman kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (misalnya kelangkaan tanah dan air) dapat mendorong terjadinya kekacauan dan penyakit sosial.

Reijntes *et al* (1999) mengemukakan pertanian bisa dikatakan berkelanjutan jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Mantap secara ekologis, berarti kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Kedua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan kesehatan tanaman, hewan, serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis (regulasi sendiri). Sumber daya lokal dipergunakan sedemikian rupa sehingga kehilangan unsur hara, biomassa, dan energi bisa ditekan serendah mungkin serta mencegah pencemaran. Tekanannya adalah pada penggunaan sumber daya yang bisa diperbarui.
- b. Bisa berlanjut secara ekonomi, yang berarti bahwa petani bisa cukup menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan dan/atau pendapatan sendiri, serta

mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Keberlanjutan ekonomis ini bisa diukur bukan hanya dalam produk usaha tani yang langsung namun juga dalam fungsi seperti melestarikan sumber daya alam dan meminimalkan resiko.

- c. Adil, yang berarti bahwa sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan, modal yang memadai, bantuan teknis serta peluang pemasaran terjamin. Semua orang memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, baik di lapangan maupun di dalam masyarakat.
- d. Manusiawi, yang berarti bahwa semua bentuk kehidupan (tanaman, hewan, dan manusia) dihargai. Martabat dasar semua makhluk hidup dihormati, dan hubungan serta institusi menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar, seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama dan rasa sayang. Integritas budaya dan spiritualitas masyarakat dijaga dan dipelihara.
- e. Luwes, yang berarti bahwa masyarakat pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus, misalnya penambahan penduduk, kebijakan, permintaan pasar, dan lain-lain. Hal ini meliputi bukan hanya pengembangan teknologi yang baru dan sesuai, namun juga inovasi dalam arti sosial dan budaya.

Libuano, 1995 (*dalam* Salikin, 2003) menyatakan bahwa dalam perspektif kelembagaan paling tidak terdapat delapan ciri spesifik agar suatu pertanian dikatakan berkelanjutan, yaitu: (a) bernuansa ekologi (*ecologically sound*), (b)

berjiwa sosial (*socially just*), (c) bernilai ekonomis (*economically viable*), (d) berbasis ilmu holistik (*based on holistic*), (e) berketepatan teknik (*technically appropriate*), (f) berketepatan budaya (*culturally appropriate*), (g) dinamis (*dynamic*), (h) peduli keseimbangan gender (*committed to gender balance*).

Lowrance, Hendrix dan Odum (1986) mengemukakan empat tingkat hirarkhi keberlanjutan sebagai berikut :

- a. *Agronomic sustainability* (tingkat paling rendah) yaitu kemampuan sistem lapangan untuk mempertahankan tingkat produksi yang akseptabel selama mungkin (ini harus dievaluasi sepanjang musim).
- b. *Microeconomic sustainability* yaitu kemampuan usahatani untuk mempertahankan viabilitas (keberlanjutan) ekonomi.
- c. *Ecological sustainability* yaitu kemampuan sistem lahan atau suatu daerah aliran sungai untuk mempertahankan layanan (servis) yang disediakan ekosistem (misalnya udara dan air bersih).
- d. *Macroeconomic sustainability* (tingkat paling tinggi) yaitu kemampuan ekonomi regional atau nasional dan kerangka institusional (*institutional framework*) untuk memenuhi tujuan-tujuan regional dan nasional.

Perspektif dinamis jangka panjang terdapat dua skenario ekstrim yang mungkin terjadi. *Pertama*, skenario malapetaka (*doom scenario*) yakni terjadinya spiral atau lingkungan resesi ekonomi – penyakit sosial – degradasi alam. Resesi ekonomi yang dicirikan oleh pertumbuhan negatif perekonomian dalam waktu yang cukup lama berdampak pada semakin meluasnya prevalensi kemiskinan dan rawan pangan. Tekanan kemiskinan dan ancaman kelaparan mendorong

tumbuhnya berbagai penyakit sosial seperti pencurian dan bahkan kekacauan sosial, selanjutnya mendorong masyarakat melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam sehingga kapasitas produksi sumberdaya alam mengalami degradasi dan kesehatan lingkungan makin memburuk. Menurunnya kualitas sumberdaya manusia, modal sosial dan kapasitas produksi sumberdaya alam menyebabkan resesi ekonomi berlanjut makin parah, dan demikian seterusnya.

Skenario kedua ialah lingkaran kondisi keemasan (*golden state scenario*). Perekonomian yang tumbuh cukup pesat, memungkinkan investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perluasan dan perbaikan modal sosial. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan sosial mendorong terjadinya proses internalisasi kebutuhan akan kenyamanan lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya alam. Sumberdaya manusia, sosial, alam dan lingkungan yang semakin baik selanjutnya akan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sehingga tercipta kondisi ideal yakni zaman keemasan adil dan makmur.

Visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal skenario kondisi zaman keemasan, yang dalam bahasa konstitusi Indonesia disebut adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan

sistem pertanian menuju usahatani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia.

3. Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2001).

Secara konvensional, peran penyuluhan hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran penyuluhan melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (sasaran penyuluhan) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Selain itu penyuluh harus memiliki keahlian tertentu sehingga dapat diandalkan untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan petani (sasaran) untuk menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga penyuluhan yang bersangkutan (Mardikanto, 1994).

Kegunaan dari adanya program penyuluhan antara lain: 1) adanya dokumen tertulis yang berarti dapat digunakan setiap waktu; 2) adanya kelangsungan pelaksanaan program, meskipun terjadi penggantian personalia; 3)

adanya tujuan jelas yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan; 4) apabila petani diikutsertakan dalam merencanakan program, berarti akan dirasakan oleh petani akan kemanfaatan dari program tersebut; 5) dengan ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan berarti menambah pengalaman petani dan kegiatan bersifat mendidik, sebab petani belajar menetapkan kepentingan dan masalah yang sebelumnya tidak mereka rasakan; 6) ikut sertanya petani ke dalam kegiatan perencanaan membantu meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri dan sifat kepemimpinannya (Ibrahim, J.T, *et al*, 2003).

Penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk mempersiapkan petani dan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada petani atau lebih tepatnya, penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk menyadarkan petani tentang adanya alternatif-alternatif baru atau metode-metode lain untuk mengusahakan pertanian mereka ke arah yang lebih baik (Sastraatmadja, 1993). Secara ringkas, Mardikanto (1998) mengemukakan beragam peran atau peran penyuluhan dalam satu kata yaitu edifikasi, yang merupakan akronim dari: 1) Edukasi, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*) dan atau stakeholders pembangunan yang lainnya; 2) Diseminasi informasi atau inovasi, yaitu penyebarluasan informasi atau inovasi dari sumber informasi dari atau penggunanya; 3) Fasilitasi atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh kliennya; 4) Konsultasi, yang tidak jauh beda dengan fasilitasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah; 5) Supervisi, atau pembinaan; 6) Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi

yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung; dan 7) Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif), selama (*on going*, pemantauan) dan setelah kegiatan selesai dilakukan (sumatif *ex-post*) (Mardikanto, 2001).

Konsep pemberdayaan apabila ditelusuri kembali proses kemunculannya maka tidak terlepas dan pergerakan hak perempuan dan *civil society* pada tahun 1960-an. Pemberdayaan juga merupakan isu kunci dalam filosofi pendidikan orang dewasa pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an yang dipelopori oleh Freire. Pemberdayaan merupakan tema pokok dalam Rappaport's "*Community Psychology*" theory dan dalam promosi kesehatan. Untuk kemudian sebagai instrumen (*tool*) dan strategi, pemberdayaan digunakan dalam aplikasi yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih. Pemberdayaan meningkatkan kemampuan individu untuk memprediksi, mengontrol, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Individu dan komunitas dapat menerima pertanggungjawaban dan tindakan secara efektif untuk jaminan keamanan atau mengubah lingkungan mereka. Pemberdayaan adalah jalan keluar dari ketidakberdayaan dan ketidakberharapan (Jentoft, 2005).

Torre (1986) mendefinisikan pemberdayaan sebagai:

"a process through which people become strong enough to participate within, share in the control of and influence, events and institutions affecting their lives". Sementara Rappaport memaknai pemberdayaan sebagai berikut: *"empowerment is a process, a mechanism by which people, organizations, and communities gain mastery over their affairs"*.

Menurut Perkins (1995), definisi mengenai "*empowerment*" sangat banyak dan beragam. Dari berbagai pemahaman pemberdayaan, dapat

dikelompokkan dalam beberapa aspek: (1) pemberian akses dan control kepada masyarakat terhadap sumberdaya melalui partisipasi, kepedulian sosial, *mutual respect* (kelompok Pemberdayaan Cornell, 1989); (2) proses yang sederhana, dimana orang memperoleh control terhadap kehidupan mereka, partisipasi yang demokrasi dalam kehidupan di komunitas mereka (Rappaport, 1987), dan (3) pemahaman secara kritis terhadap lingkungan mereka. (Alsop *et al*, 2006) mencoba merangkum beberapa definisi, ukuran, konsep, dan metode pemberdayaan berdasarkan skop dan lokasi kajian.

Dharmawan (2006) menyampaikan hal yang sama, bahwa konsep pemberdayaan dipahami dalam sudut pandang dan pengertian yang cukup beragam. Namun mengerucut pada satu *focal point* yang jelas. Konsep pemberdayaan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally "taking over power from somebody else" at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, rights, and "voice" as well as financial and material resources (Schneider, 1999).

Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance (Osmani, 2000).

Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening of individual's opportunities (Hacker, 1999).

Dharmawan (2000) yang dikutip Dharmawan (2006) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai:

"a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living"

Teori mengenai pemberdayaan melibatkan proses dan outcome. Perbedaan diantara proses dan dampak dari pemberdayaan harus ditelaah secara kritis agar secara jelas dalam mendefinisikan teori-teori pemberdayaan. Proses pemberdayaan pada level individu akan melibatkan partisipasi dalam organisasi masyarakat. Pada level organisasi, proses pemberdayaan akan melibatkan pembuatan keputusan bersama. Proses pemberdayaan pada level komunitas juga akan berkaitan dengan tindakan kolektif untuk mendapatkan akses kepada pemerintah dan sumberdaya komunitas lainnya (misalnya: media). *Outcome* dari pemberdayaan mengacu pada operasionalisasi pemberdayaan yang merupakan konsekuensi dari proses yang dijalani. Pada level individu dapat berupa meningkatnya kemampuan mobilisasi sumberdaya. Ketika kita belajar mengenai organisasi, dampaknya mungkin berkembangnya jejaring organisasi, pertumbuhan organisasi, dan pemihakan kebijakan kepada komunitas. Dampak lain dari pemberdayaan pada level komunitas adalah adanya meningkatnya pemahaman mengenai *pluralism*, eksistensi koalisi organisasi, dan akses sumberdaya komunitas (Perkins, 1995).

Menurut Moscovits dan Drover (1981) yang dikutip Lord dan Hutchison (1993) mengungkapkan bahwa untuk konsep pemberdayaan dari dimulai dengan memahami konsep *power* dan *powerless*. Kekuasaan (*power*) didefinisikan oleh *Cornell empowerment Group* sebagai “*capacity of some persons and organization to produce intended, foreseen effects on others*”. Ada banyak sumber-sumber dari kekuasaan, seperti: kepribadian, kesejahteraan, dan organisasi yang berpengaruh. Point yang lain adalah adanya dominasi kelas pada masyarakat, dimana sebagian

kecil memiliki kekuasaan dalam politik dan ekonomi, sementara secara mayoritas *powerless*.

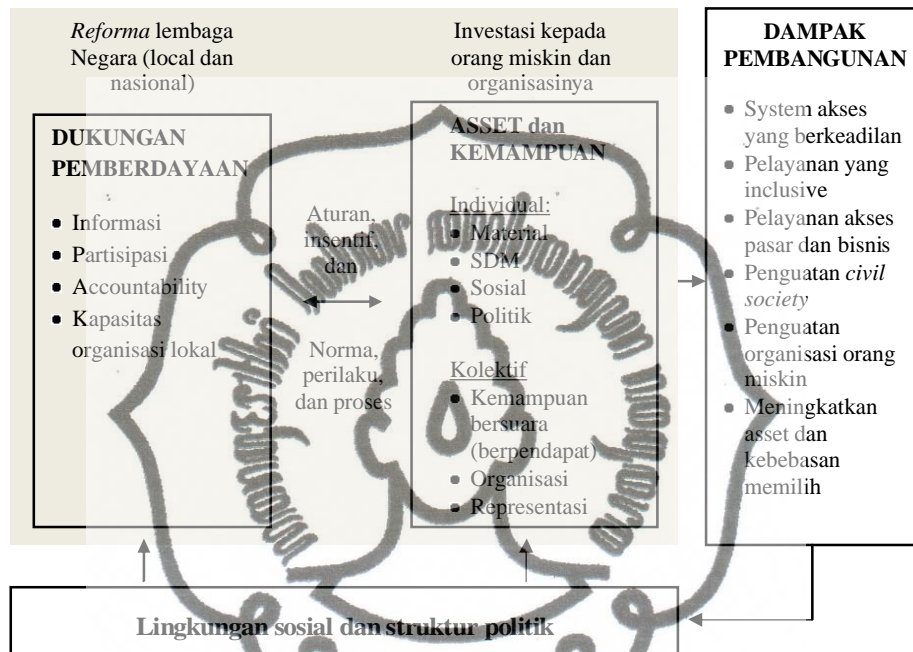
Sadan (1997) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses transisi dari ketidakkuasaan (*powerlessness*) ke arah kekuasaan mengontrol kehidupan, nasib, dan lingkungan mereka sendiri. Pemberdayaan juga merupakan transisi dari situasi pasif menjadi lebih aktif dalam mengendalikan hidupnya. Sementara menurut (Mardikanto, 2009), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yaitu untuk mengembangkan masyarakat (petani) menjadi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, tidak tergantung pada belas kasihan pihak lain. Keberdayaan masyarakat adalah unsur yang memungkinkan masyarakat untuk mampu bertahan dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya.

Narayan (2002: 14) mencoba mendefinisikan pemberdayaan

Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives (Narayan, 2002: 14)

Narayan menyatakan bahwa untuk meningkatkan kebebasan memilih dan bertindak (*freedom of choice and action*) maka pemberdayaan harus mendukung empat elemen penting, yaitu: (1) akses terhadap informasi; (2) partisipasi; (3) accountability; dan (4) kapasitas organisasi local. Melalui keempat elemen pemberdayaan tersebut, akan berdampak kepada akses terhadap asset-asset penting masyarakat dan kemampuan mengelola asset sehingga pada akhirnya akan berdampak pada: (1) perbaikan pada sistem akses yang berkeadilan; (2) pelayanan yang inclusive; (3) pelayanan akses pasar dan bisnis; (4) penguatan

civil society; (5) penguatan organisasi orang miskin; (6) meningkatkan asset dan kebebasan memilih (lihat gambar 2.3).



Sumber: Narayan (2002)

Gambar 2.3. Kerangka Pemberdayaan; dikutip dari Narayan (2002)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya difasilitasi agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, suatu lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penentu kegiatan pembangunan. Usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan baik lokal maupun regional, bahkan semestinya menjadi titik tolak bagi program nasional. Aspek penting dalam suatu

program pemberdayaan antara lain: (1) program yang disusun sendiri oleh masyarakat; (2) menjawab keperluan dasar masyarakat; (3) mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya; (4) dibangun dari sumber daya lokal; (5) sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat; (6) memperlihatkan dampak lingkungan; (7) tidak menciptakan ketergantungan; (8) berbagai pihak terkait saling terlibat; dan (9) berkelanjutan. Menurut Ife (2002) Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan sentral dari strategi keadilan sosial (*social justice*). Kata kunci pemberdayaan adalah meningkatkan kekuatan/kekuasaan (*power*) dan kondisi yang tidak menguntungkan (*the disadvantage*). "*empowerment aims to increase the power of the disadvantage*". Pemberian kekuatan meliputi level individu atau kelompok, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh kekuatan pada dirinya, mendistribusikan kekuatan (*power*) dari yang telah memiliki kepada orang-orang yang lemah. Beberapa kelompok lemah diantaranya adalah orang-orang miskin, penganggur, pekerja dengan pendapatan rendah, perempuan, kelompok minoritas dan lainnya. Beberapa strategi yang dapat meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok lemah antara lain melalui: kebijakan dan perencanaan, pendekatan politik dan sosial, dan pendidikan.

Menurut Friedmann (1991), pemberdayaan (*empowerment*) merupakan alternatif pembangunan yang berpusat kepada orang dan lingkungan mereka dibandingkan produksi dan keuntungan semata. Ada delapan hal yang merupakan basis kekuatan sosial yang akan mampu membuat masyarakat berdaya, yaitu: (1) adanya ruang bertahan hidup, (2) adanya surplus waktu, (3) pengetahuan dan

keterampilan, (4) ketersediaan informasi; (5) organisasi sosial, (6) jejaring sosial, (7) sarana bekerja dan mencari nafkah; dan (8) sumberdaya finansial.

Tabel 2.1. Upaya memberdayakan kelompok lemah

To Increase the power of:	Primary structural disadvantaged groups:	Class: the poor, the unemployed, low-income workers, welfare beneficiaries Gender: women Face/ethnicity: Indigeneous people, ethnic and cultural, minorities
	Other disadvantaged groups:	The aged, children and youth, people with disabilities (physical, mental, and intellectual); gays and lesbians, the isolated (geographically and socially) etc.
	The personally disadvantaged:	Those experiencing, grief, loss, personal and family problems etc
Over:	Personal choices and life, chances, need definition, ideas, institutions, resources, economic activity, reproduction	
Through:	Policy and planning, social and political action, education	

Sumber: Ife, 2002

Prijono dan Pranarka, (1996) dalam konteks pemberdayaan sebaiknya tumahtangga dijadikan sumber utama pemberdayaan. Rumahtangga diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup di bawah satu atap, makan dari panicle yang sama, dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari. Pada hakikatnya, rumahtangga merupakan suatu unit yang proaktif dan produktif, sebagai unit dasar dari masyarakat sipil, masing-masing rumahtangga membentuk pemerintahan dan ekonomi dalam bentuk miniatur.

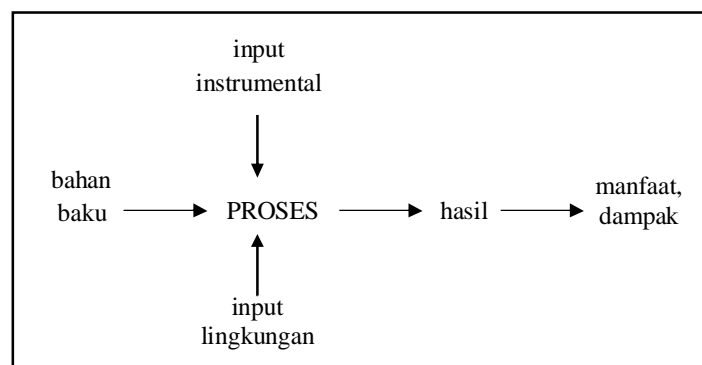
Wijaya (2008) yang dikutip Wijaya (2010), menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan diperlukan berbagai langkah-langkah. Beberapa langkah tersebut antara lain: membangun rasa saling percaya, membangun kesetaraan, menggunakan pendekatan partisipatif, demokrasi, terbuka terhadap

kritik, tidak ada dominasi kelompok, dan upaya pengembangan pengetahuan bersama.

4. Penyuluhan Pertanian sebagai Suatu Sistem

Istilah Sistem Penyuluhan Pertanian itu mulai dikenal banyak kalangan sejak diundangkannya Undang Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tanggal 15 Nopember 2006. Menurut undang-undang tersebut, pengertian sistem penyuluhan mencakup: kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian penyuluhan pertanian

Harjosarosa (1981), menyatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari unsur-unsur yang disebut sub-sistem, yang meliputi: *input*, *proses*, *output (hasil)*, dan *outcome* (dampak, manfaat). Dalam hubungan ini, kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan, dapat dipandang sebagai suatu sistem Jiyono (1971) (Lihat gambar 2.4.).



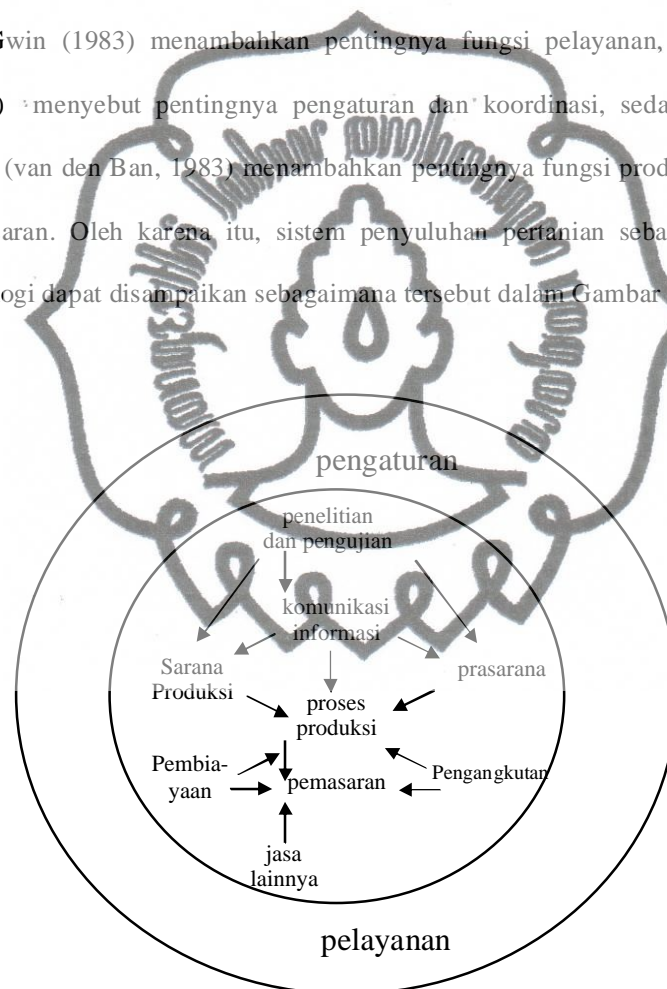
Gambar 2.4. Sistem Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Pendidikan

Gambar 2.4. menunjukkan beberapa komponen penting, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) *Bahan baku*, adalah (calon) penerima manfaat yang terdiri dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penyuluhan pertanian, seperti: petani dan keluarganya, tokoh masyarakat, pelaku bisnis (pengadaan sarana produksi, peralatan dan mesin pertanian, pengolahan hasil dan aneka jasa yang lain), serta aparat pemerintah dan para penyuluhnya sendiri.
- 2) *Input instrumental*, yang mencakup penyuluh, atau fasilitator, materi penyuluhan, perlengkapan penyuluhan, dan program penyuluhan.
- 3) *Input lingkungan*, baik lingkungan fisik, sarana prasarana, kelembagaan, dan lingkungan sosial di tempat penyelenggaraan penyuluhan maupun lingkungan asal penerima manfaat penyuluhan,
- 4) *Proses*, yang merupakan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan,
- 5) *Hasil*, yang berupa perubahan perilaku penerima manfaat,
- 6) *Dampak dan manfaat*, yaitu semua dampak dan manfaat kegiatan penyuluhan, yang berupa perubahan ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan fisik penerima manfaat seperti: kenaikan produksi dan pendapatan, perbaikan dan efektivitas kelembagaan, perbaikan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kepastian hukum, perbaikan indek mutu hidup, meningkatnya kemandirian, dan lainnya.

Proses penyuluhan pertanian, oleh Lionberger dan Gwin (1992) juga dipandang sebagai suatu proses alih-teknologi (*technology transfer*). Di dalam

proses alih teknologi, terdapat beragam fungsi, yang mencakup: pengelolaan kebijakan, modal usaha, penelitian dan pengembangan dan penyuluhan (Jedlicka, 1977). Selain itu, juga dibutuhkan fungsi penelitian, penyuluhan dan penggunaan inovasi (Havelock, 1969; Maunder, 1978; dan Tjitropranoto, 1990). Lionberger dan Gwin (1983) menambahkan pentingnya fungsi pelayanan, dan Mubyarto (1994) menyebut pentingnya pengaturan dan koordinasi, sedang Korten dan Klaus (van den Ban, 1983) menambahkan pentingnya fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Oleh karena itu, sistem penyuluhan pertanian sebagai proses alih teknologi dapat disampaikan sebagaimana tersebut dalam Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Sistem Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Alih Teknologi

Pemahaman penyuluhan sebagai sebuah sistem meliputi : (1) Kebijakan kegiatan penyuluhan, (2) Kelembagaan penyuluhan, (3) Ketenagaan penyuluh, (4) Pembiayaan penyuluhan, (5) Sarana dan Prasarana penyuluhan, (6) Penyelenggaraan penyuluhan, (7) Pengendalian dan Pengawasan penyuluhan.

5. Kelembagaan

a. Pengertian Kelembagaan

Menurut Mardikanto (2010), kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata “*institution*” adalah satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi. Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata-sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

- (1) *Komponen person*, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas
- (2) *Komponen kepentingan*, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- (3) *Komponen aturan*, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

- (4) *Komponen struktur*, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Wiradi (1995) yang dikutip Chotim *et al* (2003) menyatakan bahwa institusi didefinisikan sebagai tata kelakuan yang terorganisir atau mengacu pada pola prosedur. Ada beberapa tekanan yang terkandung dalam istilah institusi, yaitu norma, sistem, proses (berlangsungnya pembentukan pola perilaku), hasil proses -yang menghasilkan pola, hasil proses-yang menghasilkan organisasi. Ragam tekanan dalam pengertian institusi berbeda dengan ragam tekanan yang ada pada pengertian organisasi yang hanya meliputi proses pengorganisasian dan hasil proses dalam bentuk badan/organisasi.

Pakpahan (1990) membedakan kelembagaan sebagai *software* dan organisasi adalah *hardware*-nya dalam suatu bentuk grup sosial. Dalam hal ini ia menganalisis kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumber daya. Beberapa ciri kelembagaan meliputi: (1) batas yurisdiksi; (2) *property rights* (hak kepemilikan), dan (3) aturan representasi. Batas yurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup di dalam organisasi. Implikasi ekonomi dari hal tersebut adalah batas yurisdiksi berarti batas suatu organisasi dapat melakukan perluasan aktivitas ekonomi seperti batas wilayah kerja, batas usaha yang diperbolehkan, jenis usaha yang diperkenankan dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan batas yurisdiksi berimplikasi terhadap kemampuan organisasi menginternalisasikan manfaat atau biaya. Sepanjang tambahan manfaat melebihi tambahan biaya maka organisasi akan memperluas batas yurisdiksi.

Uphoff (1986) menyatakan bahwa antara institusi dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*. Karena ada institusi yang bukan organisasi, organisasi yang dapat sekaligus dipandang sebagai institusi, dan organisasi yang bukan institusi. Definisi yang dikemukakannya adalah: *An organization is a structure of roles formal or informal that are recognized and accepted. An institution is a complex of norms and behaviours that persist over time by serving some socially valued purposes.*

Kasryno (1984) mendefinisikan kelembagaan sebagai "suatu perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat". Menurut Hayami dan Kikuchi (1987) kelembagaan dengan kata dasarnya "lembaga" (atau "pranata") didefinisikan sebagai *aturan-aturan yang diberi sanksi oleh para anggota komunitas*. Dengan pendekatan ekonomi mereka menjelaskan bahwa spesifikasi yang jelas dari aturan-aturan yang mengatur hak-hak untuk memakai sumberdaya-sumberdaya yang terbatas (hak pemilikan) dan tukar-menukar hak-hak tersebut (kontrak), mengakibatkan menurunnya biaya yang tersangkut dalam perundingan, penentuan kebijaksanaan dan pelaksanaan tuntutan dan perjanjian mengenai pemakaian sumberdaya-sumberdaya; dengan demikian, penguatan ketentuan yang diberi sanksi oleh masyarakat itu memudahkan alokasi sumber secara efisien. Kelembagaan (pranata) dianggap sebagai faktor utama penghambat adanya polarisasi. Pranata didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh anggota komunitas. Aturan-aturan tersebut memudahkan koordinasi dan kerjasama di antara penduduk dalam pemakaian sumber-sumber

daya, dengan membantu mereka membangun harapan yang sewajarnya dimiliki setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain.

Pranata dibagi menjadi dua yaitu: (1) lingkungan pranata dasar-seperangkat aturan-aturan keputusan dasar dan hak-hak pemilikan yang dapat dispesifikasi ke dalam hukum formal atau prinsip-prinsip adat kebiasaan yang dianggap suci oleh tradisi; dan (2) susunan pranata sekunder-bentuk persetujuan khusus yang mengatur cara-cara, bagaimana unit-unit ekonomi dapat berkompetisi atau bekerja sama dalam pemakaian sumber-sumber daya. Pranata sekunder lebih mudah berubah dibandingkan pranata dasar. Sedangkan dengan pendekatan antropologi, Tjondronegoro (1999) melihat desa sebagai kelembagaan bukan semata-mata satuan ekonomi, juga mempunyai kaitan erat dengan pemujaan dan agama. Kaitan antara warga desa dahulu juga mungkin lebih *geneologis*, tetapi setelah adanya komunikasi antar satuan masyarakat menjadi lebih terbuka dan menjadi bersifat *territorial* dan pada zaman Belanda menjadi *daerah hukum*.

Scott (2008) memberi definisi konsepsi kelembagaan yang meliputi: *elemen-elemen regulatif, normatif, dan kognitif-kultural yang bersama-sama berdampingan dengan aktivitas dan sumberdaya menyediakan stabilitas dan memberi arti pada kehidupan sosial*. Hal ini dikarenakan proses-proses kelembagaan digerakkan oleh elemen-elemen tersebut yang merupakan blok bangunan pusat dari struktur kelembagaan, menyediakan serat elastis yang mengarahkan tindakan dan melawan perubahan. Meskipun ketiga elemen ini penting, tetapi harus meliputi tindakan-tindakan yang terkait dan sumberdaya-

sumberdaya material. Aturan, norma, dan arti tumbuh dalam interaksi, dilestarikan dan dimodifikasi oleh tindakan manusia.

b. Dimensi Kelembagaan

Sahyuti (2003) menyatakan bahwa kelembagaan (institusi) memberi tekanan pada lima hal, yaitu:

- (1) berkenaan dengan aspek sosial,
- (2) berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial,
- (3) berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam kehidupan masyarakat,
- (4) ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat dan
- (5) pelaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara yang baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu

c. Kelembagaan Pembangunan Pertanian

Mosher (1969) menyatakan bahwa dalam pembangunan pertanian untuk membangun struktur perdesaan yang progresif, dibutuhkan kelembagaan:

- (1) Sarana produksi dan peralatan pertanian
- (2) Kredit produksi
- (3) Pemasaran produksi
- (4) Percobaan/pengujian lokal
- (5) Penyuluhan

Tiap-tiap kelembagaan dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras). Terkait dengan keberadaan beragam kelembagaan pembangunan pertanian tersebut pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa:

- (1) Aksesibilitas petani untuk memperoleh layanan dari kelembagaan-kelembagaan terkait.
- (2) Efektifitasnya yang masih rendah, yang terlihat dalam kebelummampuannya melaksanakan fungsi yang harus diemban untuk mendukung pembangunan pertanian, utamanya untuk melayani kepentingan petani.
- (3) Keberpihakannya kepada kepentingan petani yang masih sangat diragukan, dibanding keberpihakannya kepada kepentingan penguasa dan pelaku bisnis pertanian yang lain.

Keberadaan kelembagaan-kelembagaan tersebut dimasa mendatang harus mudah diakses, mampu melaksanakan fungsinya seefektif mungkin untuk melayani kepentingan petani, serta benar-benar lebih berpihak pada kepentingan petani dibanding keberpihakannya kepada kepentingan penguasa dan pelaku bisnis pertanian yang lain.

Menurut Mardikanto (2009) dalam merancang kelembagaan pembangunan pertanian harus memperhatikan:

- (1) Proses pembentukannya melibatkan (perwakilan) petani
- (2) Bentuk badan usahanya memungkinkan petani untuk (ikut) memilikinya

- (3) Kelembagaan tersebut harus dikelola secara profesional, oleh pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, serta integritas moral untuk berpihak dan berusaha membangun kemandirian petani
- (4) Pada tahap awal, kelembagaan tersebut memusatkan diri pada fungsi-fungsi khusus, tetapi untuk jangka panjang harus mampu mengembangkan diri sebagai *Holding Company* yang memiliki beragam divisi yang menangani semua fungsi-fungsi yang diperlukan oleh petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya.
- (5) Badan Usaha tersebut merupakan hibrid dari lembaga bisnis yang profesional (yang memiliki daya tawar dan mampu membangun kemitraan yang sinergis dengan pelaku usaha yang lain) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (yang mencakup kegiatan-kegiatan: pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan).

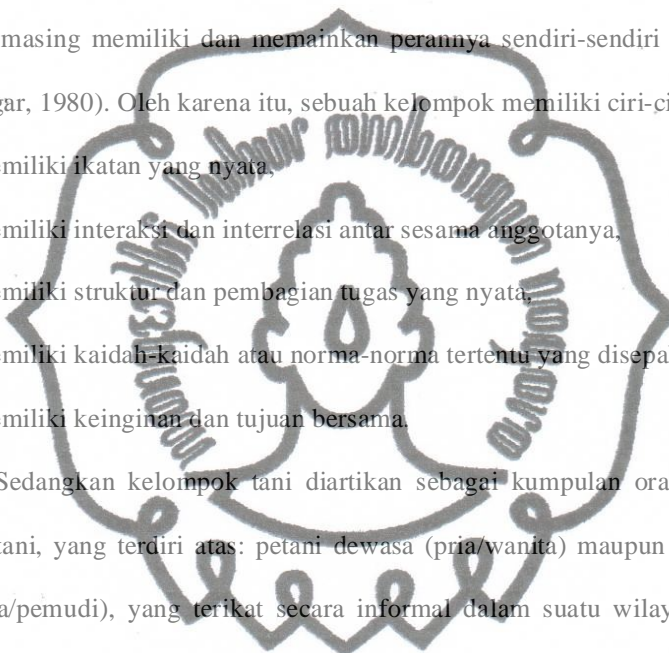
6. Kelembagaan Petani

a. Kelompok tani sebagai kelembagaan petani

Menurut konsepnya, kelompok dapat diartikan sebagai himpunan atau kesatuan individu yang hidup bersama sehingga terbangun hubungan timbalbalik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Dari sudut pandang yang lain, kelompok merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi secara intensif dan teratur, sehingga di antara mereka terbangun pembagian tugas,

struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi keutuhan dan keberlanjutan kesatuan tersebut (Sherif *dalam* Gerungan, 1978).

Ciri terpenting dari kelompok adalah memiliki kepentingan dan tujuan bersama (Tomasoa, 1978), yang dapat dicapai melalui interaksi yang mantab dan masing-masing memiliki dan memainkan perannya sendiri-sendiri (Dahama dan Bhatnagar, 1980). Oleh karena itu, sebuah kelompok memiliki ciri-ciri:

- 
- (a) Memiliki ikatan yang nyata,
 - (b) Memiliki interaksi dan interrelasi antar sesama anggotanya,
 - (c) Memiliki struktur dan pembagian tugas yang nyata,
 - (d) Memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang disepakati bersama,
 - (e) Memiliki keinginan dan tujuan bersama.

Sedangkan kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas: petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada dilingkungan pengaruh dan pimpinan seorang Kontak Tani. Di dalam pengertian Kelompok Tani ini, termasuk juga Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang dibentuk atas Kelompok Tani yang ada dalam suatu wilayah administrasi (pemerintahan) Desa atau yang berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak pengairan tersier (Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1980).

b. Alasan Dibentuknya Kelompok tani

Mosher (1969) mengemukakan bahwa adanya kegiatan kerjasama antar Kelompok tani, merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Berkaitan dengan keberadaan Kelompok Tani, Mokhzani (Wong, 1979) mengemukakan adanya kecenderungan alami dari masyarakat petani untuk melakukan kegiatan kerjasama yang bersifat *cooperative*. Di lain pihak, Sajogya (1978a) memberikan 3 (tiga) alasan utama tentang pentingnya pembentukan Kelompok Tani, yaitu:

- (a) Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumberdaya pertanian yang tersedia dan dapat dimanfaatkan bagi perbaikan usahatani dan kesejahteraan petani,
- (b) Adanya kepentingan pemerintah untuk memanfaatkannya sebagai alat (instrumen) pembangunan, dan
- (c) Adanya idiologi yang “mewajibkan” para petani untuk terikat oleh suatu “amanat suci” yang harus mereka amalkan melalui kelompoknya.

Galeski (Wong, 1979) memandang perlu dibentuknya kelompok Tani “baru” guna menaikkan kemakmuran masyarakat petani dari kenaikan produktivitas dan kenaikan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini penting, karena pembentukan Kelompok Tani terbukti memberikan beragam keuntungan yang mencakup (Torres *dalam* Wong, 1979):

- (a) Semakin eratnya interaksi antar petani, dan terbangunnya kepemimpinan Kelompok Tani,
- (b) Semakin terarahnya peningkatan jiwa kerjasama antar petani,
- (c) Semakin cepatnya proses perembesan inovasi yang berupa teknologi baru,

- (d) Semakin lancarnya tingkat pengembalian pinjaman (hutang) petani,
- (e) Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik kaitannya dengan input usaha tani maupun pemasaran hasilnya.
- (f) Semakin meratanya pembagian air irigasi dan pengawasannya oleh sesama petani.

Keberadaan kelompok tani dalam perkembangan terakhir tidak cukup dilandasi oleh kebutuhan pengembangan kelompok sosial untuk membangun solidaritas dan kekompakan (*cohesiveness*) anggotanya, tetapi sekaligus juga dilandasi oleh kebutuhan untuk mengembangkan unit usaha yang memiliki daya tawar dan mampu membangun kemitraan yang sinergis dengan beragam kelembagaan pembangunan pertanian yang lain.

c. Perkembangan Kelompok Tani di Indonesia

Menurut Mardikanto (1996), seiring dengan dikembangkannya program intensifikasi pertanian melalui Program BIMAS/INMAS pada penghujung dasawarsa 1960-an, telah dikembangkan beragam bentuk Kelompok Tani di Indonesia, seperti: Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan (Kelompen Sipedes), Kelompok Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Pemberantasan Hama, Kelompok Demonstrasi Area.

Kelompok tersebut dilebur dalam Kelompok Tani Hamparan dan atau Kelompok Tani Domisili, sejak dikembangkannya Proyek Penyuluhan Pertanian Pangan (*National Food Crops Extension Projects/NFCEP*) di tahun 1976. Kelompok-kelompok tersebut berubah fungsinya menjadi sekedar merupakan

Kelompok Kegiatan yaitu Kelompok Tani yang dibentuk guna melakukan kegiatan-kegiatan khusus.

Belajar dari pengalaman NFCEP tersebut, keberadaan Kelompok Tani kemudian diresmikan pembentukannya melalui Surat Edaran Menteri Pertanian No. 130/Mentan/II/1979, sehingga Kelompok Tani bukan lagi menjadi kelompok informal, melainkan sudah berubah menjadi Kelompok Formal. Dalam perjalanannya, Kelompok Tani yang semula dikembangkan sebagai instrumen penyuluhan pertanian, sejak dikembangkannya program Intensifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979, keberadaan Kelompok Tani berubah menjadi instrumen pengelolaan usahatani. Sebab, melalui INSUS, usahatani tidak lagi dikelola secara perorangan (individual) melainkan dilaksanakan secara bekerjasama antar petani dalam satu kelompok hamparan.

Keberadaan kelompok tani sebagai instrumen pengelolaan usahatani seperti itu, kemudian dikembangkan lagi pada pelaksanaan SUPRA INSUS, yang memperluas unit pengelolaan usahatani dari Kelompok Tani ke Gabungan Kelompok Tani. Memasuki masa reformasi, keberadaan Kelompok Tani tidak hanya dijadikan instrumen pengelolaan usahatani, melainkan lebih dikembangkan lagi menjadi instrumen ekonomi perdesaan, melalui program *Corporate Farming* di tahun 2000, Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) di tahun 2004, dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di tahun 2008. Berkaitan dengan perkembangan kelompok tani di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Keberadaan kelompok tani sebelum NFCEP, lebih bersifat sebagai kelompok sosial yang bersifat informal
- (2) Memasuki era NFCEP, kelompok tani dikembangkan sebagai instrumen penyuluhan pertanian.
- (3) Pada era INSUS sampai dengan akhir 1990-an, kelompok tani telah dikembangkan sebagai instrumen pengelolaan usahatani, utamanya dalam upaya peningkatan produksi dan pelestarian swasembada beras
- (4) Melalui *Corporate Farming*, diupayakan pengembangan kelompok tani untuk beramalgamasi dalam satu *Corporate* sebagai suatu unit pengelolaan usahatani.
Pengelolaan usahatani tidak lagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing petani sebagai pemilik lahan usahatani, tetapi sepenuhnya dikelola oleh *Corporate Farming*. Petani sebagai pemilik lahan hanya sebagai “buruhtani” di lahannya sendiri, dan akan menerima bagian pendapatan *corporate* secara proporsional berdasarkan luas lahannya.
- (5) Pengembangan LUEP, memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk
- (6) Pengembangan PUAP yang memberikan hibah sebesar Rp. 500.000.000/Gapoktan, lebih memfokuskan pada pemberian pinjaman kepada anggota-anggota Kelompok tani/Gapoktan untuk pengembangan agribisnis

Upaya tersebut belum secara jelas mengarah pada pengembangan Kelompok tani/Gapokatan sebagai lembaga (yang dibentuk, dimiliki, dan

dikelola oleh) petani untuk mengembangkan unit usaha yang memiliki daya tawar dan mampu membangun kemitraan yang sinergis dengan beragam kelembagaan pembangunan pertanian yang lain.

d. Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani

Kehadiran Kelompok tani sebenarnya sudah mulai dikenalkan sejak awal tahun 1970-an, terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pertanian dalam bentuk: kelompok tani pemakai air, kelompok pemberantasan hama, dan lainnya. Tetapi pada saat itu kelompok tani masih bersifat informal sebagai kelompok sosial yang dibentuk dan dikembangkan atas dasar kepentingan bersama.

Pengembangan kelompok tani mulai menemukan bentuknya yang lebih formal, sejak diluncurkannya Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan (*National Food Crops Extension Project*) pada akhir tahun 1976 seiring diadopsinya sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan) atau *Training and Visit* (TV). Pengembangan kelompok tani kemudian terus dikembangkan menjadi kelompok yang lebih formal melalui Surat Edaran Menteri Pertanian No. 130/Mentan/II/1979, yang membagi habis seluruh lahan hamparan di seluruh Indonesia ke dalam Wilayah Kerja Kelompok tani (WILKEL).

Program Intensifikasi Khusus (INSUS) yang dilaksanakan sejak tahun 1979 dikembangkan menjadi SUPRA INSUS pada tahun 1987, keberadaan Kelompok tani dikembangkan lagi menjadi Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN). Pengembangan GAPOKTAN akhir-akhir ini semakin diintensifkan, terkait pelaksanaan program PUAP (Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan) yang memberikan bantuan permodalan sebanyak Rp. 100.000.000 juta/Gapoktan.

Perubahan kelompok tani menjadi GAPOKTAN yang semakin disadari potensinya untuk dikembangkan menjadi kelembagaan agribisnis di perdesaan itu, memberikan inspirasi pengembangan GAPOKTAN menjadi dua bentuk pilihan, yaitu: menjadi Asosiasi Petani, ataukah Korporasi (Badan SDM, 2008).

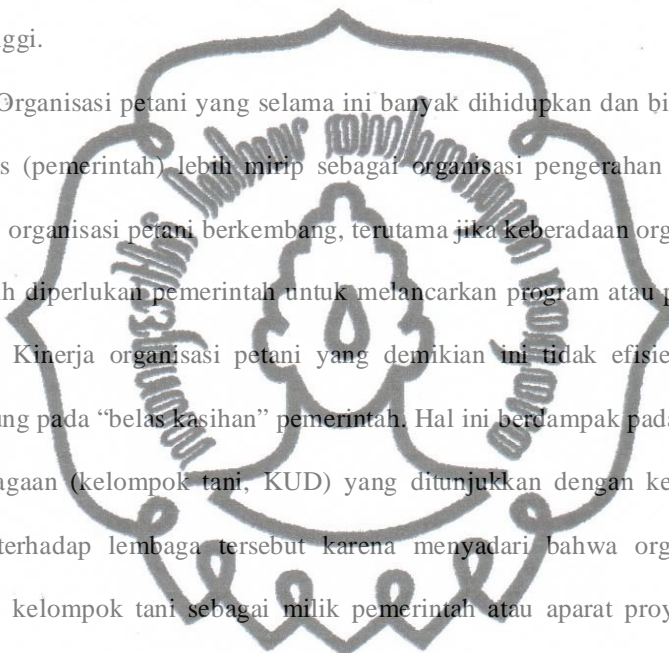
7. Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

a. Alur Pikir Pembentukan BUMP

Menurut Syahyuti (2003), setidaknya terdapat beberapa bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan. Kekeliruan ini datang dari pola pikir bahwa kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki “jiwa” ekonomi yang memadai karena itu harus diganti, menganggap bahwa pertanian gurem adalah permasalahan individual bukan permasalahan kelembagaan, dan permasalahan kelembagaan ada di tingkat petani belaka bukan pada superstrukturnya. Selain itu, kesatuan administrasi pemerintahan dipandang sebagai satu unit interaksi sosial ekonomi pula, dan kelembagaan hanya berorientasi kepada produksi sehingga yang dibangun adalah kelembagaan-kelembagaan yang ada pada kegiatan produksi saja.

Pemahaman yang keliru terhadap konsepsi yang berujung pada kurang tepatnya strategi sehingga program-program maupun kelembagaan yang dibangun baik yang berasal dari masyarakat sendiri (*bottom-up*) maupun *top down* dari pemerintah. Pranadji (2003) mencatat bahwa hampir tidak ada organisasi

(ekonomi) petani, seperti lembaga perkreditan desa, koperasi desa atau lumbung pedukuhan yang tumbuh kuat dari bawah, mampu bertahan hidup dan mengembangkan diri dengan baik. Organisasi ekonomi petani yang dibentuk dari atas (*top down*) hampir tidak ada yang mampu bertahan hidup dengan daya saing yang tinggi.



Organisasi petani yang selama ini banyak dihidupkan dan bisa digerakkan dari atas (pemerintah) lebih mirip sebagai organisasi pengerahan massa. Fakta empiris, organisasi petani berkembang, terutama jika keberadaan organisasi petani ini masih diperlukan pemerintah untuk melancarkan program atau proyek jangka pendek. Kinerja organisasi petani yang demikian ini tidak efisien dan sangat tergantung pada “belas kasihan” pemerintah. Hal ini berdampak pada merapuhnya kelembagaan (kelompok tani, KUD) yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian petani terhadap lembaga tersebut karena menyadari bahwa organisasi KUD maupun kelompok tani sebagai milik pemerintah atau aparat proyek. Mestinya kelembagaan sosial harus memperhatikan berbagai aspek dominan (demokrasi, partisipasi) untuk menjamin sustainability (Budi *et al*, 2009)

Kajian Pranadji (2003) dan Pranadji *et al* (2004) mengenai kelembagaan ekonomi (KUD dan kelompok tani) di beberapa wilayah, antara lain: Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), NTB, dan Jawa Tengah menunjukkan adanya beberapa kelemahan mendasar. Kelemahan *pertama*, berorientasi proyek sehingga “anggota” tidak merasa memiliki sepenuhnya organisasi tersebut. *Kedua*, kurangnya pelibatan petani dalam proses maupun pelaksanaan organisasi. *Ketiga*, tidak dibangunnya sistem akuntabilitas

penyelenggaraan organisasi yang sehat. **Keempat**, dilihat dari keutuhan sistem agribisnis, pembentukan organisasi petani cenderung mengikuti pola bersekat yang rentan terhadap gangguan alam, harga, dan persaingan bisnis yang ketat. **Kelima**, sistem keorganisasian agribisnis dan kegiatan usaha ekonomi lainnya di pedesaan kebanyakan tidak didasarkan pada pembentukan interdependensi yang relatif simetris diantara pada anggotanya.

Mubyarto (1989) menyatakan pembangunan pertanian diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, diperlukan sebuah kelembagaan ekonomi petani yang kuat. Petani pada posisi yang sangat lemah, sehingga perlu menggalang kebersamaan dalam wadah organisasi yang kuat (Supadi, 2004; Saragih *et al*, 1996).

Organisasi petani yang dimaksud adalah organisasi korporasi yang mengelola suatu badan usaha milik petani secara profesional. Hal ini serupa dengan gagasan Pakpahan *et al* (2009), Mardikanto (2009) tentang pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam rangka mewujudkan industrialisasi pertanian Indonesia. Kepemilikan petani atas organisasi korporasi tersebut idealnya bersifat individual dalam bentuk saham (tanah) dan sekaligus kolektif dalam bentuk koperasi. Koperasi adalah pilihan tipe yang tepat untuk organisasi korporasi petani tersebut. Koperasi yang dimaksud bukanlah semacam Koperasi

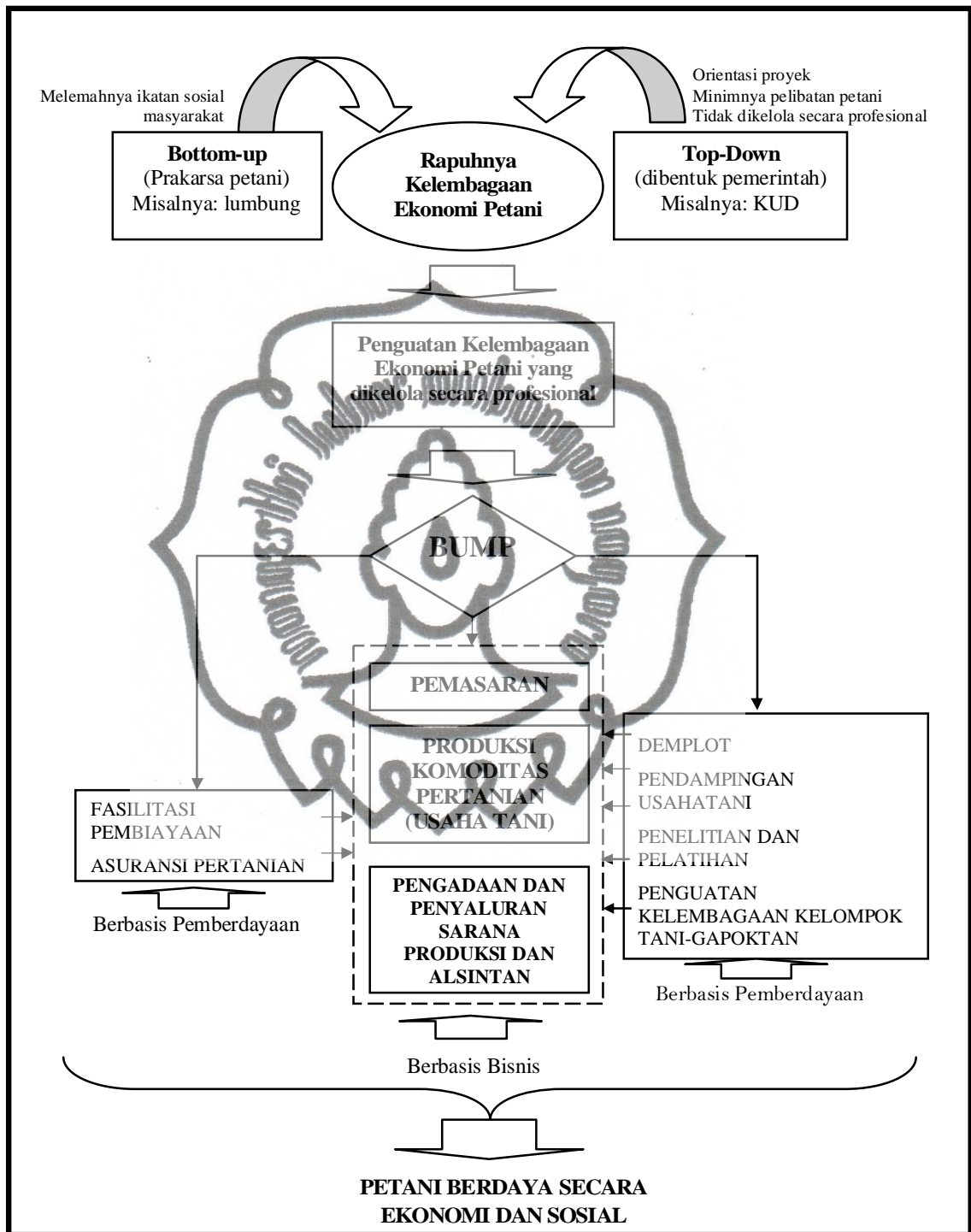
Unit Desa (KUD) yang pada dasarnya hanya perpanjangan tangan negara yang berwatak korporatis.

Menurut Hermanto dan Subowo (2006), secara empiris kelembagaan pertanian dapat dibedakan, antara lain: (1) kelembagaan sosial non-bisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan penerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, dan kelompok tani dan (2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan lainnya.

Pembangunan pertanian yang berhasil harus mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang berbasis pada kegiatan sosial nonbisnis (upaya pemberdayaan, keberpihakan) dan bisnis (upaya peningkatan pendapatan). BUMP adalah inovasi kelembagaan di dalam pembangunan pertanian yang merupakan *Hibrid* dari kelembagaan bisnis dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat. Pada satu sisi bersifat *profit oriented*, profesional dan pada sisi lainnya berorientasi pada upaya pemberdayaan. Upaya pemberdayaan (*empowerment*) dapat dilihat pada empat “pengembangan kapasitas” yang merupakan representasi pada penguatan masyarakat (*community strengthening*) dan pengembangan kapasitas (*capacity development*). Penguatan atau pengembangan kapasitas tidak terbatas pada level individual, tetapi juga kapasitas entitas (level organisasi) serta kapasitas sistem atau jejaring kelembagaan. Dalam perspektif BUMP, dalam upaya pemberdayaan (*empowerment*) “memainkan” peran pada empat “pengembangan kapasitas”, yaitu: pengembangan kapasitas manusia,

pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Pengembangan kapasitas manusia berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan sumberdaya petani. Pengembangan kapasitas Usaha berhubungan dengan bagaimana peningkatan kemampuan ekonomi dengan berbagai usaha produktif. Pengembangan kapasitas lingkungan lebih mengarah kepada keberlangsungan kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas. Sedangkan pengembangan kapasitas kelembagaan bersinggungan dengan organisasi petani yang mampu menjadi wadah yang dapat mendorong kemandirian dan keberdayaan petani.

BUMP dalam konteks agribisnis adalah lembaga yang mencakup keseluruhan kegiatan produksi dan distribusi sarana produksi usahatani, kegiatan produksi usahatani (pertanian primer), kegiatan penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian dan seluruh produksi-produksi olahan dari komoditas pertanian. Selain kegiatan profit, BUMP juga memberikan upaya pemberdayaan dalam aktifitas penyuluhan, demplot, penelitian, fasilitasi asuransi, kredit, penguatan kelembagaan gapoktan, dan lainnya. Agar lebih jelas dapat disimulasikan pada gambar 2.6.



Gambar 2.6. Alur Pikir Pembentukan BUMPU

b. Pengertian dan alasan pembentukan

Badan usaha Milik Petani (BUMP) diartikan sebagai Badan Usaha yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu budidaya dan pengelolaan usahatani demi terwujudnya peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan perbaikan pendapatan usahatani, perbaikan dayatawar dan kemampuan membangun kemitraan yang sinergis, yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

Esensi pengembangan BUMP tersebut, mencakup:

- 1) BUMP dibentuk oleh inisiatif (wakil) petani untuk membangun kelembagaan petani yang benar-benar mampu melayani kebutuhan petani di semua sub-sistem kegiatan agrobisnis.
- 2) BUMP dimiliki oleh petani, wakil (yang diberi mandat) oleh kelompok-tani/Gapoktan, dan atau pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan atau komitmen untuk melakukan pemberdayaan (masyarakat) petani.
- 3) Lingkup kegiatan BUMP mencakup semua bentuk layanan kepada petani, pada keseluruhan sub-sistem kegiatan agrobisnis
- 4) BUMP dikelola oleh pemilik/pemegang saham dan tenaga-tenaga profesional yang dipilih dan ditetapkan oleh pemilik/pemegang saham.
- 5) BUMP merupakan lembaga yang mandiri, bebas dari campurtangan (aparatur) pemerintah. Meskipun demikian, seperti halnya dengan Badan Usaha pada umumnya, BUMP selalu tunduk pada kebijakan pemerintah, utamanya

kebijakan pembangunan pertanian dan kebijakan pembangunan ekonomi perdesaan.

Pemikiran tentang pengembangan BUMP, untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Agus Pakpahan (BRI, 2007) yang terinspirasi dari pembelian *Crystal Sugar Company* oleh sekitar 1.500 petani di Amerika pada 1973, dan sekarang telah berkembang menjadi eksportir gula-bit terbesar. Sedangkan pengembangan BUMP PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera di Sukoharjo, berangkat dari keinginan FACILITATOR (Himpunan Mahasiswa Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta) untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai media penerapan ilmu-ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah.

c. Bentuk Usaha

Secara konseptual, Pakpahan mengemukakan bahwa BUMP merupakan sarana Gotong Royong Modern yang dikembangkan dari gagasan Bung Hatta yang mengembangkan koperasi di Indonesia. Melalui BUMP, diyakini petani akan lebih cepat mencapai kemajuan apabila petani membangun BUMP-nya itu bersinergis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dengan mengambil sudut pandang sinergis maka agar petani bisa menjadi mitra dunia usaha yang tertarik untuk bekerjasama dengan petani, petani perlu bisa dan kuat membangun organisasi ekonominya yang andal dan terpercaya. Badan usaha (BUMN dan BUMS) pun perlu mampu mentransformasikan dirinya agar bisa bermitra dengan petani apabila mereka

ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. BUMN atau BUMS yang menanamkan "modalnya" dalam pengembangan organisasi ekonomi petani (BUMP) akan memetik hasilnya dalam bentuk keuntungan yang besar di kemudian hari.

Bentuk usaha BUMP disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apakah wujudnya berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT) merupakan hal lain yang tidak dapat dipaksakan, tergantung pada keinginan para petani. Yang perlu diingat adalah kelemahan dan kelebihan dari dua struktur badan usaha yang berbeda tersebut. BUMP dapat dikembangkan sebagai **hibrida perseroan dan koperasi**, yang dimaksud adalah semangatnya koperasi tetapi wujudnya adalah PT. Semangat koperasi ini dengan sendirinya akan terwujud melalui struktur kepemilikan perseroan yang melibatkan ribuan orang petani dan sifatnya terbuka. Dengan model ini maka BUMP memiliki kapasitas untuk *meleverage* modal sehingga kapasitasnya bisa meningkat hingga 5 kalinya. Selanjutnya, dengan modal yang bisa diperoleh dari perbankan atau dari pasar modal, maka kapasitas BUMP bisa cukup kuat untuk meningkatkan nilai tambah dan melakukan adu-tawar yang kuat dengan pihak mitra bisnisnya.

d. BUMP Sebagai Kekuatan Ekonomi Perdesaan

Fokus BUMP pada tahap awal adalah di bidang pertanian (*on-farm dan off-farm*). Tetapi, di masa depan, dapat melebarkan usahanya pada bidang-bidang yang lebih luas, seperti:

- (1) Kredit (simpan-pinjam) baik untuk keperluan konsumsi, maupun kegiatan produktif yang lain (*on-farm, off-farm, dan non-farm*)
- (2) Pusat perkulakan/toko SEMBAKO
- (3) Pendidikan dan pelatihan
- (4) Uji coba dan demonstrasi
- (5) Lembaga konsultasi manajemen dan bisnis

BUMP dalam jangka panjang, apabila dikelola secara efisien, dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi perdesaan yang sangat kuat, karena sahamnya dimiliki oleh petani dan warga masyarakat yang lain. Dalam hubungan ini, keberadaan BUMP jangan dilihat sebagai pesaing yang akan mematikan pelaku bisnis yang dimiliki oleh perorangan, tetapi mereka dapat menjalin kemitraan usaha atau sub-kontraktor dari BUMP.

e. BUMP Sebagai Inovasi Kelembagaan

Rogers dan Shoemaker (1962) mengartikan inovasi sebagai: *ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru* oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Sedang Lionberger dan Gwin (1983) mengartikan inovasi tidak sekedar sebagai sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu.

Pengertian “baru” disini, mengandung makna bukan sekedar “baru diketahui” oleh pikiran (*cognitive*), akan tetapi juga baru karena belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat dalam arti sikap (*attitude*),

dan juga baru dalam pengertian belum diterima dan dilaksanakan/diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat. Pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup: ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat.

Pengertian inovasi dapat semakin diperluas menjadi (Mardikanto, 1996):

“Sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan/ dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan”.

Pengertian “baru” yang melekat pada istilah inovasi bukan selalu berarti baru diciptakan, tetapi dapat berupa sesuatu yang sudah “lama” dikenal, diterima, atau digunakan/diterapkan oleh masyarakat di luar sistem sosial yang menganggapnya sebagai sesuatu yang masih “baru”. Pengertian “baru” juga tidak selalu harus datang dari luar, tetapi dapat berupa teknologi setempat (*indegenuous technology*) atau kebiasaan setempat (*kearifan tradisional*) yang sudah ditinggalkan.

Awal pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia, ada berbagai ragam **inovasi teknologi** yang berupa:

1. Beragam sarana produksi (benih-unggul, pupuk-buatan, dan pestisida)
2. Beragam teknik budidaya (bercok-tanam, perlindungan tanaman, pengairan, dan pemeliharaan tanaman yang lain)
3. Beragam teknik penanganan panen dan pasca-panen
4. Beragam alat dan mesin pertanian

Perkembangan lebih lanjut, dengan dilatarbelakangi oleh terjadinya kondisi “*leveling off*” pada penerapan inovasi-teknologi, Hadisapoetro (1973) menawarkan konsep usahatani kelompok dalam bentuk Intensiifikasi-khusus yang kemudian dikenal sebagai *inovasi sosial*.

Irawan (2004), menyatakan bahwa pengembangan inovasi kelembagaan pertanian ini dimaksudkan untuk:

1. Merajut ulang hubungan sinergis antara penyuluhan dan penelitian
2. Merajut ulang hubungan sinergis antara lembaga penelitian dengan petani dan pelaku agribisnis yang lain
3. Merajut ulang hubungan sinergis antara seluruh elemen agribisnis

Ada 8 (delapan) prinsip dasar pengembangan kelembagaan yang harus diperhatikan untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, yaitu:

1. Prinsip kebutuhan, artinya, secara fungsional, kelembagaan tersebut memang dibutuhkan,
2. Prinsip efektivitas, artinya, kelembagaan tersebut harus dapat melaksanakan fungsinya secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuannya,
3. Prinsip efisiensi, dalam arti mudah, murah, dan sederhana untuk mencapai tujuannya,
4. Prinsip fleksibilitas, artinya dapat disesuaikan dengan sumberdaya dan budaya setempat,
5. Prinsip manfaat, artinya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi petani dan pelaku agribisnis yang lain,

6. Prinsip pemerataan, artinya memberikan manfaat secara proporsional bagi petani dan pelaku agribisnis yang lain,
7. Prinsip sinergitas, artinya, kehadiran kelembagaan tersebut harus mampu membangun hubungan kemitraan yang sinergis antar semua elemenn agribisnis,
8. Prinsip keberlanjutan, artinya, dapat diharapkan keberlanjutannya untuk jangka waktu tak terbatas.

f. Badan Usaha Milik Petani Sebagai Inovasi Kelembagaan Pembangunan Pertanian

BUMP yang konsep awalnya dikemukakan oleh Pakpahan (2007) dan diimplementasikan oleh FACILITATOR sejak 2009, merupakan inovasi kelembagaan yang dapat dilihat dari:

- (1) Pengembangan BUMP yang berbentuk perseroan, berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk kelompok dan atau koperasi,
- (2) Pengembangan BUMP sebagai hibrid antara lembaga bisnis (yang mengejar keuntungan) dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (yang ingin mengubah perilaku petani subsisten kearah petani komersial, modern, maju, dan profesional),
- (3) Kehadiran BUMP bukan untuk menyaingi melainkan untuk mengembangkan kemitraan yang sinergis dengan pelaku agrobisnis dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain,

BUMP sebagai inovasi kelembagaan, juga dapat dilihat dari maksud dan tujuan BUMP untuk:

- (1) Merajut ulang hubungan sinergis antara penyuluhan dan penelitian, melalui penyelenggaraan Demonstrasi Plot (Demplot), dan sekolah-lapang yang berkelanjutan,
- (2) Merajut ulang hubungan sinergis antara lembaga penelitian dengan petani dan pelaku agribisnis yang lain, dalam penyelenggaraan pengujian, Demplot, dan sekolah-lapang,
- (3) Merajut ulang hubungan sinergis antara seluruh elemen agribisnis, melalui kemitraan yang dibangun oleh BUMP dengan:
 - a) Produsen/penyalur/pengecer sarana produksi dan alat/mesin pertanian
 - b) Lembaga pembiayaan dan penjaminan
 - c) Aparat penyuluhan pertanian, yang terdiri dari: penyuluh PNS, penyuluh Swasta, dan penyuluh Swadaya (yang dimiliki BUMP).
 - d) Pengelola RMU selaku lembaga pengolahan
 - e) Lembaga pemasaran yang melakukan *off-taker* produk
 - f) Aparat pemerintah yang terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan lainnya)

Kegiatan operasional BUMP juga sudah menyiapkan diri untuk menerapkan kedelapan prinsip yang disyaratkan, yaitu (Mardikanto *et al*, 2010):

1. Prinsip kebutuhan, artinya, secara fungsional, kelembagaan tersebut memang dibutuhkan utamanya dalam: pembiayaan usahatani (penyediaan sarana

produksi), penyelenggaraan Demplot, pendampingan (sekolah-lapang) dan jaminan pemasaran produk.

2. Prinsip efektivitas, yang akan dilakukan melalui **kontrak kerjasama kemitraan**, baik antara BUMP dengan: petani (GAPOKTAN), pengelola RMU, lembaga pemasaran (*buyer*), lembaga pembiayaan (Bank), dan lembaga asuransi (penjaminan kredit).
3. Prinsip efisiensi, yaitu prosedur yang mudah, biaya murah, dan sederhana, karena proses rumusan kontrak kerjasama kemitraan dilakukan secara **partisipatif**.
4. Prinsip fleksibilitas, karena selalu disesuaikan dengan sumberdaya (kemampuan dan kesukarelaan) dan budaya atau kebiasaan setempat.
5. Prinsip manfaat, karena melalui kerjasama kemitraan yang dirumuskan secara partisipatif diharapkan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi petani dan pelaku agribisnis yang lain.
6. Prinsip pemerataan, sebab melalui kerjasama kemitraan yang dirumuskan secara partisipatif juga diharapkan akan memberikan manfaat secara proporsional bagi petani dan pelaku agribisnis yang lain.
7. Prinsip sinergitas, sebab melalui kerjasama kemitraan yang dirumuskan secara partisipatif, kehadiran BUMP diharapkan mampu membangun hubungan kemitraan yang sinergis antar semua elemen agribisnis, yaitu:
 - a) Petani memperoleh kemudahan kredit, jaminan tersedianya sarana produksi, pendampingan/sekolah-lapang, dan jaminan pemasaran hasil

- b) Pengelola RMU memperoleh jaminan kontrak pemasaran dan bantuan pembiayaannya
 - c) Pembeli Produk memperoleh jaminan pasokan produk
 - d) Lembaga pembiayaan, memperoleh kontra penyaluran kredit yang dijamin oleh asuransi
 - e) Lembaga asuransi akan memperoleh jaminan terhindar dari claim asuransi karena adanya pendampingan/sekolah-lapang yang berkelanjutan
 - f) BUMN memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai biaya operasional, dan pengembangan usahanya
8. Prinsip keberlanjutan, karena jika semua pihak memiliki komitmen untuk mematuhi kesepakatan kontrak, maka keberadaan BUMP dapat diharapkan keberlanjutannya untuk jangka waktu tak-terbatas

BUMP dalam kaitannya sebagai inovasi kelembagaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berknaan dengan aspek sosial, kehadiran BUMP tetap memelihara relasi sosial di kalangan petani, tetapi relasi tersebut lebih bermotif ekonomi untuk perbaikan pendapatan.
2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial, kehadiran BUMP akan merubah perilaku petani dari petani subsisten ke arah petani komersial yang semakin maju, modern, dan rasional
3. Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam kehidupan masyarakat, kehadiran

BUMP akan melestarikan dan mengembangkan semangat kebersamaan dan semangat belajar demi perbaikan praktek bertani dan perbaikan pengelolaan usahatani

4. Ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat, kehadiran BUMP akan mendorong perilaku profesional, utamanya dalam mentaati kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam rumusan kemitraan yang dilakukan; dan
5. Pelaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara yang baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu, kehadiran BUMP membangun SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang dibakukan dan disosialisasikan kepada staf pelaksana, mitra usaha, serta pemangku kepentingan yang lain.

B. Kerangka Pemikiran

1. Hasil Penelitian Pendahuluan

a) Sejarah Pembentukan BUMP

Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Kabupaten Sukoharjo, merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera (PT. GFS), yang dibentuk oleh FACILITATOR bekerjasama dengan GAPOKTAN Ngesti Raharjo, Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang di launching pada tanggal 11 Maret tahun 2009 dan peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Provinsi

Jawa Tengah bersama-sama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Departemen Pertanian Republik Indonesia.

PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera yang didirikan dengan Akta Notaris No.3, pada tanggal 08 April 2009 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-20874.A.H.01.01.Tahun 2009 pada tanggal 14 Mei 2009, sedangkan FACILITATOR itu sendiri, merupakan Himpunan Mahasiswa Program Doktor Penyuluhan, Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sebagai suatu lembaga/organisasi, FACILITATOR yang merupakan Himpunan Perdata yang didirikan dengan Akte Notaris C.M. Novia Puspita Wardani, SH. No. 3 tanggal 29 Nopember 2008; dengan VISI untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis antar semua pemangku kepentingan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat demi perbaikan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab, dan Misi:

1. Mengembangkan kemandirian, dalam arti non partisan dan melepaskan ketergantungan dari pihak manapun juga.
2. Mengembangkan profesionalisme dalam mengelola program dan kegiatannya
3. Membangun kerjasama kemitraan yang sinergis
4. Mengembangkan azas kekeluargaan, dalam menyikapi dan memecahkan permasalahan

5. Mengembangkan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan

FACILITATOR bermaksud untuk mewujudkan pembangunan partisipatif demi tercapainya masyarakat yang mandiri, kreatif dan profesional, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Jasa Konsultasi, dan Fasilitasi Publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan bisnis.

Lingkup kegiatannya meliputi beragam kegiatan sebagaimana yang tersebut dalam kata FACILITATOR yang merupakan akronim dari *Facilitating Capacity Building, Institution, Legal, Investment, Trading and Marketing, for Public and Private Sector*, atau mencakup: (a) pengembangan kapasitas, (b) pengembangan kelembagaan, (c) bantuan hukum, (d) fasilitasi kegiatan investasi, serta (e) perdagangan dan pemasaran, untuk sektor publik dan swasta.

GAPOKTAN Ngesti Raharjo dipilih sebagai mitrakerja FACILITATOR tersebut, dilandasi pertimbangan bahwa GAPOKTAN ini telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga telah dipercaya untuk mengelola dana LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan), dan memperoleh bantuan alat pengering (silo) jagung, serta sedang merencanakan kegiatan pertanian terpadu (peternakan, pertanian, pengolahan hasil,

pengelolaan limbah ternak/ pembuatan pupuk organik, serta pemasaran produk).

b) Lingkup Usaha BUMP

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan GAPOKTAN ke arah dua bentuk, yaitu asosiasi atau korporasi. Pemilihan bentuk tersebut tidak dapat dipaksakan, tergantung pada keinginan para petani. Jika yang dipilih adalah bentuk korporasi, maka pilihannya apakah berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT), yang penting adalah, badan usaha tersebut sahamnya harus dimiliki oleh petani dan sebagian saham oleh pihak-pihak yang berpihak pada kepentingan petani.

Pakpahan (2007) menegaskan bahwa BUMP dapat dikembangkan sebagai **hibrida perseroan dan koperasi**. Yang dimaksud adalah semangatnya koperasi tetapi wujudnya adalah PT. Semangat koperasi ini dengan sendirinya akan terwujud melalui struktur kepemilikan saham perseroan yang melibatkan ribuan orang petani dan sifatnya terbuka.

Model BUMP ini memiliki kapasitas untuk *meleverage* modal sehingga kapasitasnya bisa meningkat hingga 5 kalinya. Selanjutnya, dengan modal yang bisa diperoleh dari perbankan atau dari pasar modal, maka kapasitas BUMP bisa cukup kuat untuk meningkatkan nilai tambah dan melakukan adu tawar yang kuat dengan pihak mitra bisnisnya.

Pendiri BUMP PT. GFS telah memantapkan diri dalam bentuk Perseroan. BUMP ini merupakan **hibrid dari lembaga pemberdayaan**

masyarakat dan lembaga bisnis, dalam arti, GAPOKTAN merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat, sedang keberadaan PT. GFS digunakan pada saat melakukan kegiatan (kemitraan) bisnis.

Kepemilikan saham yang tercantum dalam Akte Pendirian masih terbatas dimiliki oleh para pendiri, tetapi di masa depan secara bertahap akan mengarah kepada perusahaan publik, yang membuka peluang bagi semua warga masyarakat (utamanya petani yang menjadi mitra kerjanya) untuk memiliki sahamnya sesuai dengan kemampuan mereka.

Pendiri telah memiliki komitmen untuk menyisihkan 10% keuntungannya guna dikembalikan kepada petani/GAPOKTAN yang menjadi mitra kerjanya, dalam bentuk kegiatan pemberdayaan (pelatihan, pendampingan, dan lainnya) atau dalam bentuk saham. Tentang jumlah maksimum yang akan dilepaskan, untuk sementara (sambil menunggu kesiapan GAPOKTAN untuk mengelolanya) saham mayoritas masih akan dimiliki oleh pendirinya.

Pemilihan bentuk perseroan oleh para pendiri BUMP tersebut, dilandasi pemikiran bahwa, apapun bentuk usaha yang dimiliki oleh petani (maupun pengusaha mikro dan kecil lainnya), **hanya akan bisa berkembang jika mampu menjalin kemitraan yang sinergis** dengan pelaku usaha lain yang lebih besar, baik yang berupa BUMN/BUMD maupun Badan Usaha Milik Swasta.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelaku usaha yang lebih besar itu pada umumnya **enggan bermitra** dengan petani/pelaku usaha mikro dan kecil, karena beberapa alasan:

- (1) SDM petani/pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya kurang profesional, baik dalam pengetahuan, ketrampilan, dan (terutama) sikapnya. Hal ini disebabkan karena mereka masih berperilaku *subsisten*, seperti:
 - a) sekedar mencukupi kebutuhan sehari hari;
 - b) memberikan penghasilan dan atau memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarganya;
 - c) tidak menghargai korbanan (modal, tenaga kerja) sendiri.
- (2) Pada umumnya jarang menepati janji, baik yang menyangkut: waktu, mutu produk, jumlah (takaran, timbangan)
- (3) Posisi yang “lebih rendah”, karena itu (jika terjadi perselisihan) harus “dikasihani”, dan mitra-kerjanya harus mengalah
- (4) Jika ada perselisihan akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya, karena status hukum yang berbeda; antara Undang-undang Perseroan dan Undang-undang Koperasi atau Organisasi Kemasyarakatan
- (5) Campur tangan (oknum aparat) birokrasi dalam setiap kemitraan dengan petani/pelaku usaha mikro dan kecil, yang seringkali selalu memberatkan mitra kerjanya.

Keterlibatan petani dalam BUMP akan menghasilkan beberapa manfaat antara lain:

- (1). Usaha yang dikembangkan (penyediaan sarana produksi, bagi hasil, pemasaran produk, pembelian dengan sistem resi gudang, dan lainnya)
- (2). Dividen dari kepemilikan saham
- (3). Sebagian keuntungan PT. GFS yang dialokasikan sebagai saham GAPOKTAN
- (4). Program pemberdayaan sebagai pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan PT. GFS
- (5). Kemitraan dan pemberdayaan sebagai pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dari mitra kerja PT. GFS

c) Skala Usaha BUMP

Kelangsungan usaha BUMP perlu dipikirkan, sehingga perlu ditetapkan skala usaha antara 500-1.000 Ha, atau setara dengan 1 (satu) Wilayah Unit Desa, seperti yang pernah dikemukakan oleh Hadisapoetro (1970).

Luas lahan minimal 500 Ha tersebut, telah diperhitungkan akan memperoleh pendapatan sebanyak 0,5 % dari nilai produk (sekitar Rp. 200.000/Ha/musim) ditambah keuntungan pemasaran beras (Rp. 50,-/Kg), yang cukup untuk membiayai:

- (a) Biaya operasional BUMP
- (b) Gaji/upah Manajer BUMP
- (c) Gaji/upah 5 (lima) penyuluh; yaitu: penyuluh budidaya tanaman, penyuluh kesuburan lahan (pemupukan dan pengairan), penyuluh

perlindungan tanaman, penyuluh pasca panen, dan pendamping/fasilitator sekolah lapang)

(d) Insentif untuk Ketua kelompok (seluas 50 Ha/otrang)

(e) Insentif untuk Ketua regu (seluas 10 Ha/Orang)

d) Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan

Launching BUMP di Sukoharjo sekaligus dilakukan penandatanganan MoU antara BUMP PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera (PT. GFS) dengan PT. Padi Energi Nusantara (PT. PEN) yang dibentuk dan sahamnya dimiliki oleh 10 (sepuluh) BUMN Bidang pertanian dengan tugas utama untuk melakukan kerjasama dengan GAPOKTAN untuk pengembangan ketahanan pangan dan energi. Sedangkan kerjasama operasi antara PT. PEN dan PT. GFS dilaksanakan pada bulan Agustus 2009, dengan kegiatan awal pembelian gabah kering panen dan pemasaran beras.

Pelaksanaan kegiatan pembelian gabah kering panen dan pemasaran beras tersebut, pada awalnya timbul pemikiran untuk melakukan investasi dalam bentuk: RMU, rantai jemur, pergudangan, dan transportasi sendiri. Tetapi dalam perjalanannya, ditetapkan untuk menjalin kemitraan dengan pengelola RMU yang sudah ada. Kebijakan ini dipilih karena selain tidak perlu mengeluarkan biaya investasi yang besar, juga untuk menghindari kesan bahwa kehadiran BUMP akan mematikan pelaku agribisnis yang sudah ada. Terkait dengan pemasaran beras tersebut, BUMP ini telah menjalin kontrak pembelian dengan pengelola RMU di Kabupaten Sukoharjo dan dari

kabupaten di sekitarnya. BUMP pada aspek pemasarannya, telah menjalin kontrak dengan pembeli di Jakarta. BUMP ke depan akan mengembangkan kemitraannya dengan GAPOKTAN guna menjamin pengadaan produknya, melalui kerjasama budidaya pertanian dan pemasaran hasil.

BUMP telah menjalin kemitraan dengan Lembaga Pembiayaan (Bank) untuk menyediakan kredit usahatani dengan tingkat bunga murah (melalui program kemitraan sebesar 6%/tahun) serta tidak memerlukan agunan dari petani, karena dijamin oleh Lembaga Asuransi (mitra kerja BUMP). Untuk tahap awal, disepakati penyediaan pagu (*plafond*) kredit sebanyak Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000/Ha, seluas 500 Ha, sebagai skala usaha minimal yang diminta BUMP.

2. Kerangka Berpikir

BUMP sebagai inovasi kelembagaan di pedesaan dikembangkan berdasarkan pada proses yang kompleks, dimulai dari penelusuran masalah yang menjadi alasan utama pembentukan BUMP, konsep-konsep yang diperlukan, kegiatan yang dilakukan, pemberdayaan yang dilakukan dan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan. Dalam pengembangan BUMP perlu dukungan dari berbagai kelembagaan agribisnis lainnya. Sedangkan kinerja BUMP dipengaruhi oleh mutu kelembagaan agribisnis lainnya, semakin buruk kinerja kelembagaan agribisnis lainnya maka kinerja BUMP akan semakin baik.

Manfaat BUMP akan sangat ditentukan oleh kegiatan pemberdayaan petani (kelompok-tani/GAPOKTAN) yang dilakukan oleh BUMP, yang meliputi:

- a) Kinerja Sistem Pemberdayaan oleh BUMP
- b) Lingkup Pemberdayaan yang dilakukan BUMP
- c) Penerima manfaat pemberdayaan yang dilakukan BUMP

Kinerja Sistem Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan:

- 
- a) Kebijakan pemberdayaan petani (kelompok tani/GAPOKTAN) yang dilakukan, dibangun, dan dimiliki oleh BUMP
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan petani (kelompok tani/GAPOKTAN) yang telah dilakukan oleh BUMP
 - c) Sarana dan prasarana pemberdayaan petani (kelompok tani/GAPOKTAN) yang disediakan dan atau digunakan oleh BUMP
 - d) Pembiayaan pemberdayaan petani (kelompok tani/GAPOKTAN) yang digunakan oleh BUMP
 - e) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan petani (kelompok-tani/GAPOKTAN) yang dilakukan oleh BUMP

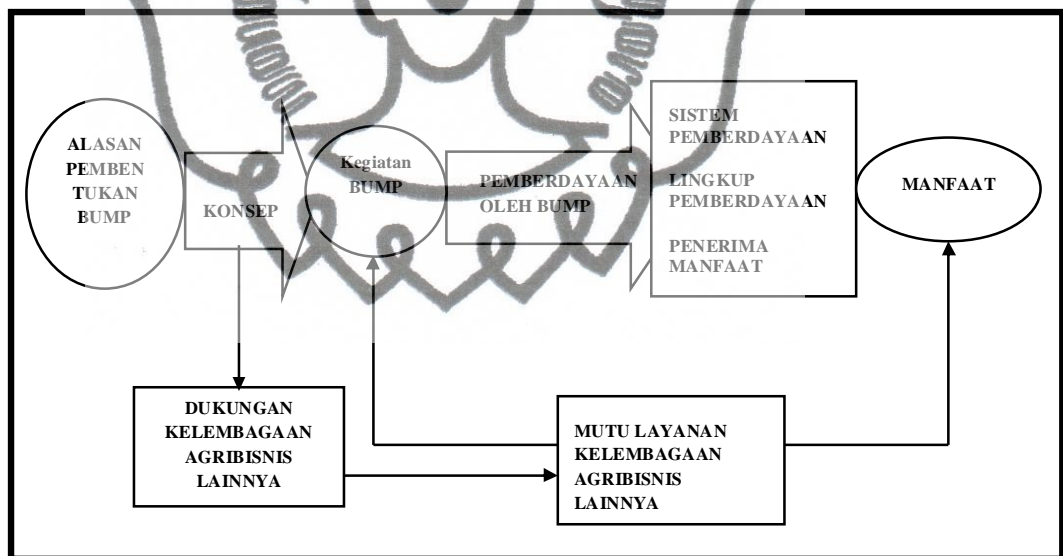
Lingkup kegiatan pemberdayaan petani (kelompok-tani/GAPOKTAN) yang dilakukan oleh BUMP meliputi:

- a) Pengembangan kapasitas petani
- b) Pengembangan kapasitas usahatani
- c) Pengembangan kapasitas lingkungan usahatani
- d) Pengembangan kapasitas kelembagaan usahatani

Penerima manfaat kegiatan pemberdayaan petani (kelompok-tani/GAPOKTAN) meliputi:

- a) Petani sebagai individu
- b) Entitas petani (kelompok-tani/GAPOKTAN)
- c) Jejaring antar entitas petani (kelompok-tani/GAPOKTAN), dan pemangku kepentingan agribisnis yang lain (pengelola RMU dan lembaga pemasaran yang lain, lembaga pembiayaan/perkreditan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penelitian pertanian).

Berdasarkan alur pemikiran seperti di atas, maka kerangka berpikir dari penelitian ini dapat disampaikan seperti yang dikemukakan dalam Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Kerangka Berpikir

BAB III. DIMENSI PENELITIAN

Dimensi penelitian adalah operasionalisasi variabel atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya (Mardikanto, 2010). Terkait dengan pengertian di atas, maka beberapa variabel penelitian yang akan dijabarkan adalah:

1. Alasan Pembentukan BUMPU
2. Konsep
3. Kegiatan BUMPU
4. Pemberdayaan oleh BUMPU
 - a. Sistem Pemberdayaan
 - b. Lingkup Pemberdayaan
 - c. Penerima manfaat
5. Manfaat pemberdayaan
6. Mutu Pelayanan Kelembagaan Agribisnis
7. Dukungan Kelembagaan Agribisnis

Penjelasan lebih detail mengenai berbagai variabel diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. **Alasan pembentukan BUMPU** adalah hal-hal yang berkaitan dengan landasan yang mendasari berdirinya BUMPU. Alasan-alasan tersebut dapat bersifat akademis maupun praktis.

- a. Alasan bersifat akademis berkaitan erat dengan landasan filosofis yang menjadi dasar berdirinya BUMP. Landasan filosofis sangat berhubungan dengan berbagai pengalaman akademis yang diperoleh dari berbagai hasil kajian ilmiah terkait berbagai temuan dan analisis mengenai berbagai kelemahan kelembagaan yang dibangun baik oleh masyarakat (*bottom-up*) maupun pemerintah (*top-down*). Berdasarkan berbagai hasil temuan tersebut akan mendorong munculnya kelembagaan-kelembagaan baru yang berusaha menutupi berbagai kelemahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilihat apa alasan ilmiah yang melandasi terbentuknya BUMP.
- b. Alasan praktis berkaitan erat dengan tujuan utama proses pemberdayaan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi petani. Alasan ini terkait erat dengan apa yang mendorong dibentuknya BUMP yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai, meliputi: *better farming, better organization, better bussines, better living, better accesibility*, maupun *better environment*.
2. **Konsep** adalah buah pikiran atau abstraksi dari ide (Mardikanto, 2010). Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi (2006), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu. Dalam kaitannya dengan definisi tersebut, maka konsep dibagi menjadi dua, yaitu; (1) konsep-konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang mereka wakili; dan (2) konsep yang lebih abstrak atau lebih kabur hubungan dengan fakta atau realitas.

Dalam penelitian ini, konsep yang dimaksud adalah ide-ide atau buah pikiran yang muncul karena keberadaan BUMP sehingga menjadi inovasi baru yang memberikan kemanfaatan bagi petani (khususnya) dan pemangku kepentingan (umumnya). Keberadaan berbagai konsep inilah yang menjadi pembeda dengan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya.

3. **Kegiatan BUMP** adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh BUMP baik dari aspek pemberdayaan maupun bisnis. Aspek pemberdayaan dapat dilihat dari berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, penyuluhan, demonstrasi plot, penguatan kelembagaan dan lainnya. Sedangkan dari sisi bisnis dapat dilihat dari berbagai aktifitas perbaikan usaha tani, fasilitasi pemasaran hasil, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh yang sudah dilakukan oleh BUMP terkait kedua aspek tersebut.

4. **Pemberdayaan oleh BUMP** merupakan hal-hal yang berkaitan berbagai aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMP. Beberapa aspek yang dilihat adalah sistem pemberdayaan, lingkup pemberdayaan, dan penerima manfaatnya.

1) **Sistem Pemberdayaan:** sebagaimana tersebut dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mencakup beberapa sub-sistem, yaitu:

- a) Kebijakan
- b) Kelembagaan

- c) Ketenagaan
- d) Penyelenggaraan
- e) Sarana dan Prasarana,
- f) Pembiayaan
- g) Pengendalian dan Pengawasan

- 2) *Lingkup Pemberdayaan* berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan pemberdayaan yang terdiri dari catur bina atau catur pengembangan kapasitas, yaitu: pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, dan pengembangan kapasitas lingkungan (Sumadyo, 2001 dalam Mardikanto, 2010b), dan pengembangan kapasitas kelembagaan (Mardikanto, 2003).

b.1. Pengembangan kapasitas Manusia

Pengembangan Kapasitas Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Di samping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik. Hal ini disebabkan selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.

Pengembangan Kapasitas manusia juga mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, yaitu:

- (1) *Pengembangan kapasitas individu*, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan
- (2) *Pengembangan Kapasitas Entitas/Kelembagaan*, yang meliputi:
 - a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
 - b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi
 - c) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi
 - d) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya
 - e) Interaksi antar individu di dalam organisasi
 - f) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.
- (3) *Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring)*, yang meliputi:
 - a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama
 - b) Pengembangan Interaksi dengan entitas/orgnisasi di luar sistem,

b.2. Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan Kapasitas usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan. Hal ini disebabkan pengembangan kapasitas manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan

kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan diperhatikan, dan bahkan menambah kekecewaan. Pengembangan kapasitas usaha yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) sajalah yang akan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengembangan kapasitas Usaha mencakup:

1. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
2. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis
3. Pembentukan badan usaha
4. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan
5. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir
6. Manajemen produksi dan operasi
7. Manajemen logistik dan finansial
8. Penelitian dan pengembangan
9. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis
10. Pengembangan jejaring dan kemitraan
11. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

b.3. Pengembangan kapasitas Lingkungan

Pengembangan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), menjadikan isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ecolabel, dan lainnya. Hal ini dinilai

penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku).

Pengertian lingkungan selama ini seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.

Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang di dalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan

perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b.4. Pengembangan kapasitas Kelembagaan

Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Kata kelembagaan, sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata-sosial dan “*social organization*: atau organisasi sosial.

Pengembangan keempat kapasitas tersebut secara sederhana dapat diringkas seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Lingkup kegiatan BUMP

Lingkup Kegiatan	Kriteria
Pengembangan kapasitas Manusia/Petani	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan kapasitas kepribadian Petani ✓ Pengembangan kapasitas di dunia kerja Pertanian ✓ Pengembangan kapasitas keprofesionalan
Pengembangan kapasitas Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemilihan komoditas dan jenis usaha pertanian ✓ Status kelayakan dan perencanaan bisnis pertanian ✓ Pembentukan badan usaha milik petani ✓ Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan bidang pertanian ✓ Pengelolaan SDM dan pengembangan karir ✓ Manajemen produksi dan operasi ✓ Manajemen logistik dan finansial ✓ Penelitian dan pengembangan bidang pertanian ✓ Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis bidang pertanian ✓ Pengembangan jejaring dan kemitraan bidang pertanian ✓ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian

Lingkup Kegiatan	Kriteria
Pengembangan kapasitas Lingkungan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan fisik pertanian ✓ Kepedulian dan kesetiakawanan sosial ✓ Akulturasi dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal
Pengembangan kapasitas Kelembagaan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan ekonomi pertanian ✓ Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan sosial ✓ Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan tradisional

Sumber : Mardikanto (2010)

Penelitian ini akan mencoba melihat apa yang sudah dilakukan BUMD terkait catur pengembangan kapasitas tersebut, yaitu manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan.

- 3) **Penerima manfaat** dalam banyak kepustakaan pemberdayaan masyarakat, selalu disebut adanya *kelompok sasaran* atau obyek Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: masyarakat, utamanya *masyarakat kelas bawah* (*kelompok akar-rumput/grassroots, masyarakat yang termarjinalkan*). Pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan "yang lebih rendah" dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya. Karena itu, dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan pengertian Mardikanto (1996) yang telah mengganti istilah "sasaran" menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*).

Pengertian “penerima manfaat” tersebut, terkandung makna bahwa:

- (1). Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- (2). Penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.
- (3). Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran” yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima/mengikutinya, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.
- (4). Penerima manfaat tidak berada dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya.
- (5). Proses belajar yang berlangsung antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertikal (penyuluh menggurui penerima manfaatnya), melainkan *proses belajar bersama* yang partisipatif.

Dalam penelitian ini, penerima manfaat yang dimaksud menurut Mardikanto (2010) adalah:

(1) *Pelaku utama*, yang terdiri dari petani dan keluarganya.

Dikatakan demikian, karena pelaku utama aktifitas pemberdayaan ini adalah adalah petani dan keluarganya, yang selain sebagai penerima manfaat juga pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya (faktor-faktor produksi) demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usahatani serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam berikut lingkungan hidup yang lain.

(2) *Penentu kebijakan*, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pengembangan ekonomi desa. Kehadiran BUMP akan membantu penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan ekonomi pedesaan yang mensejahterakan petani.

- (3) *Pemangku kepentingan yang lain*, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan pertanian, termasuk dalam kelompok ini adalah,
- a) Peneliti dan atau akademisi yang berperan dalam: penemuan, pengujian, dan pengembangan inovasi yang diperlukan oleh pelaku utama
 - b) Produsen sarana produksi dan peralatan/mesin-mesin yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi yang dihasilkan para peneliti

- c) Pelaku bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan peralatan/mesin pertanian yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau oleh pelaku utama.
- d) Aktivistis LSM, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berperan sebagai organisator, fasilitator, dan penasihat pelaku utama.

5. **Manfaat pemberdayaan** adalah berbagai manfaat yang dirasakan oleh petani dan pemangku kepentingan lainnya akibat keberadaan BUMS baik secara sosial (kepuasan, penghargaan, peningkatan harkat dan martabat) maupun ekonomi (peningkatan pendapatan). Manfaat tersebut dapat diperoleh dari aktifitas pemberdayaan berupa: hasil produksi, mutu produksi, peningkatan pendapatan, profesionalisme, dan lainnya.

6. **Mutu Pelayanan Kelembagaan Agribisnis** adalah performa yang ditunjukkan oleh pelaku agribisnis lain yang dilakukan selama ini. BUMS sebagai inovasi kelembagaan baru sangat dipengaruhi oleh kinerja pelaku agribisnis lain. Pelaku agribisnis yang lain tersebut meliputi: produsen sarana produksi, pedagang sarana produksi, pendamping budidaya pertanian, pengolahan produk, pemasaran produk, dan lembaga pembiayaan.

7. **Dukungan Kelembagaan Agribisnis** adalah berbagai dukungan dari kelembagaan agribisnis lain (produsen sarana produksi, pedagang sarana produksi, pendamping budidaya pertanian, pengolahan produk, pemasaran produk, dan lembaga pembiayaan) baik dalam bentuk finansial (permodalan),

teknologi, maupun pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai dukungan ini muncul akibat berbagai konsep yang telah dihasilkan oleh BUMP yang dianggap lebih memiliki berbagai keunggulan-keunggulan dibandingkan kelembagaan yang lain.



BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMP di Kabupaten Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan karena wilayah ini yang pertama kali yang mengembangkan BUMP di Indonesia. Keberadaan BUMP di Sukoharjo dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: (1) Sukoharjo merupakan salah satu lumbung pangan (keberadaan petani memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian); (2) *base cultural* petani transisi antara petani dari petani tradisional (subsisten) dan modern (rasional). Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih selama 18 bulan yaitu September 2010 hingga Februari 2012.

B. Jenis Penelitian

1. Pilihan Paradigma Penelitian

Guba dan Lincoln dalam Salim (2001), mengemukakan empat paradigma utama yang bersaing dalam ilmu pengetahuan dengan berbagai asumsi-asumsi yang mendasarinya, yaitu positivisme, post-positivisme, teori kritis (*critical theory*), dan paradigma konstruktivisme (*constructivism*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradig konstruktivisme. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu, suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa

dilakukan di kalangan positivis atau postpositivis. Karena dasar filosofi ini, maka hubungan epistemologi antara pengamatan dan objek, menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya (Salim, 2001).

2. Pendekatan dan tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif (qualitative approach)*, dengan informasi yang bersifat subyektif dan historis. Strategi yang digunakan adalah *studi kasus*, dengan pertimbangan bahwa: (1) pertanyaan penelitian berkenaan dengan "bagaimana" dan "mengapa", (2) penelitian ini memberikan peluang yang sangat kecil bagi peneliti untuk mengontrol gejala atau peristiwa sosial yang diteliti, dan (3) menyangkut peristiwa atau gejala kontemporer dalam kehidupan yang riil (Yin, 1996).

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melakukan penelitian pendahuluan.* Aktifitas ini bertujuan untuk melihat secara umum mengenai respon masyarakat terhadap BUMP, sekilas mengenai profil BUMP.
2. *Memahami profile BUMP tempat penelitian.* Kegiatan ini dilakukan untuk memahami gambaran secara umum tentang BUMP yang akan diteliti. Profile BUMP diperoleh melalui analisis data sekunder dan data primer. Data sekunder di peroleh dari data dan arsip-arsip yang dimiliki oleh BUMP. Sementara data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan

pengurus dan mitra BUMP. Beberapa informasi penting yang akan digali antara lain terutama kondisi latar belakang pendirian, kondisi sumberdaya manusia, pola kemitraan, profil anggota BUMP, ruang lingkup usaha.

3. *Memahami model kelembagaan BUMP.* Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada partisipan untuk mendapatkan informasi: (1) model kelembagaan apa yang dibangun oleh BUMP; (2) sejauh mana BUMP tersebut mampu menciptakan *bargaining position* dan kemandirian petani.

C. Data dan Sumber Data

Merujuk uraian tentang dimensi penelitian di atas, data dan sumber data yang diperlukan meliputi:

Tabel 4.1. Data yang diperlukan, sifat data dan sumber data

No	Data Yang Diperlukan	Sifat Data				Sumber Data
		P	S	Kn	KL	
1	Alasan Pembentukan BUMP	X	X		X	Pengelola BUMP,
2.	Konsep	X			X	Pengelola BUMP
3.	Kegiatan BUMP					Pengelola BUMP, Petani, Kelompok tani, Gapoktan, Pelaku agribisnis lainnya
	a. Demplot	X			X	
	b. Penyedia sarana	X			X	
	c. Pendampingan budidaya	X			X	
	d. Jaminan pembelian	X			X	
	e. Revitalisasi sarana dan prasarana	X			X	
	f. LKM	X			X	
	g. Jejaring agribisnis	X			X	
4.	Pemberdayaan					Pengelola BUMP, kelompok tani/gapoktan
	a. Sistem Pemberdayaan	X	X		X	
	b. Lingkup Pemberdayaan	X	X		X	
	c. Penerima manfaat	X	X		X	

No	Data Yang Diperlukan	Sifat Data				Sumber Data
		P	S	Kn	KL	
4.	Manfaat Pemberdayaan a. peningkatan produksi b. mutu produksi c. peningkatan pendapatan d. profesionalisme e. on farm – off farm f. Pemanfaatan limbah	X			X	Penerima manfaat (petani, kelompok tani, gapoktan, kelembagaan agribisnis lain)
5.	Mutu Pelayanan Kelembagaan Agribisnis a. Alsintan b. Mitra penyedia produk c. Mitra pemasaran d. Dukungan akademik e. Kebijakan pemerintah f. Mitra pembiayaan g. Mitra asuransi h. Saprotan	X	X		X	Petani/gapoktan, hasil-hasil penelitian
6.	Dukungan Kelembagaan Agribisnis a. Alsintan b. Mitra penyedia produk c. Mitra pemasaran d. Dukungan akademik e. Kebijakan pemerintah f. Mitra pembiayaan g. Mitra asuransi h. Saprotan	X			X	Kelembagaan Agribisnis Mitra

Keterangan:

P: Primer S: Sekunder Kn: Kuantitatif Kl: Kualitatif

D. Teknik Sampling/Cuplikan

Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah "purposive sampling" atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan 'criterion-based selection' dimana teknik cuplikan ini bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya dan lain-lain (Goetz dan LeComte dalam

Sutopo, 2002). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan cuplikan dengan cara statistik atau dikenal dengan "*probability sampling*". Pada penelitian kualitatif peneliti akan memilih informan yang dianggap paling tahu, sehingga pemilihan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Cuplikan semacam itu sebagai "*internal sampling*" yang memberikan kesempatan bahwa keputusan bisa diambil begitu peneliti mempunyai pikiran umum yang muncul mengenai apa yang sedang dipelajari, dengan siapa akan berbicara, kapan perlu melakukan observasi (*time sampling*) dan berapa jumlah serta macam dokumen yang perlu ditelaah.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Studi kasus adalah studi aras mikro (menyorot satu atau beberapa kasus) dan menggunakan multi-metode. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik: (1) Observasi; (2) pengamatan berperan serta, (3) wawancara mendalam, (4) analisis dokumen. Secara mendetail dapat dilihat pada uraian berikut ini:

(1). Observasi

Observasi dilakukan selama melangsungkan kunjungan-kunjungan lapangan termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain seperti pada wawancara. Observasi bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang pemahaman suatu konteks dan fenomena yang akan diteliti. (Yin, 1987). Dalam informasi tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian (Nasution, 1992).

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian (Nawawi dan Martini, 1995). Dalam pengamatan harus dikaitkan dua hal, yaitu informasi (sesuatu yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Jenis observasi yang digunakan disini adalah observasi berperan pasif. Pada observasi berperan pasif kehadiran peneliti di lokasi sudah menunjukkan peran yang paling pasif, sebab kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh orang yang diamati, dan bagaimanapun hal itu membawa pengaruh pada yang diamati (Sutopo, 2002).

(2). *Pengamatan Berperan Serta*

Pengamatan berperan serta adalah proses penelitian yang mempersyaratkan interaksi antara peneliti dengan partisipan dalam lingkungan sosial partisipan sendiri, guna keperluan pengumpulan data dengan cara yang sistematis (Taylor dan Bogdan, 1984 yang dikutip Sitorus, 1998). Paling tidak ada dua alasan penting menggunakan metode pengamatan berperan serta: (1) pengamatan berperan serta memungkinkan peneliti melihat, merasakan, dan memaknai dunia beserta ragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya sebagaimana partisipan melihat, merasakan dan memaknainya; dan (2) pengamatan berperan serta memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama oleh peneliti dan partisipan (intersubyektivitas) (Moelong, 1989 yang dikutip Sitorus, 1998).

(3). *Wawancara Mendalam*

Wawancara mendalam merupakan temu-muka berulang antara peneliti dan partisipan dalam rangka memahami pandangan partisipan mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri (Taylor dan Bogdan, 1984 yang dikutip Sitorus, 1998). Teknik wawancara dilakukan secara tidak berstruktur dimana wawancara bersifat lepas dengan subyek penelitian, namun terlebih dahulu dibuat pokok-pokok pertanyaan.

Wawancara merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam suatu penelitian, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2002). Selanjutnya menurut Yin (1987) di dalam wawancara mendalam peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping mengenai opini peristiwa yang ada. Wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal sehingga bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan topik penelitian dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (Mulyana, 2002). Dengan demikian maka wawancara dilakukan dalam suasana santai. Untuk menciptakan suasana tersebut diperlukan waktu agar saling berkenalan dan menjalin keakraban.

Wawancara dilaksanakan dengan informan yaitu: pengelola BUMP, pendiri BUMP, petani/gapoktan mitra BUMP, penyuluh pertanian, pengelola

RMU (*Rice mill Unit*), mitra BUMP, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengambilan data melalui wawancara pada penelitian ini akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada pendapat Sutopo (2002), yaitu :

a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai

Informasi atau data sangat penting artinya bagi kualitas hasil penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan informasi lewat wawancara peneliti harus bisa mendapatkan narasumber atau informan yang tepat dan menentukan kapan serta dimana wawancara dilakukan.

b. Persiapan wawancara

Persiapan yang dilakukan peneliti antara lain: memahami pribadi dan peran informan, membuat rencana jenis informasi yang digali untuk dijadikan pedoman dalam wawancara.

c. Langkah awal

Peneliti perlu menjalin keakraban dengan informan yang dihadapinya dan memberikan kesempatan pada informan untuk mengorganisasikan apa yang ada dalam pikirannya.

d. Mengusahakan agar wawancara bersifat produktif

Peneliti harus berusaha menjadi pendengar yang baik tetapi kritis, dengan menjaga pembicaraan agar semakin terfokus dan mendalam.

e. Menarik simpulan wawancara

Proses wawancara apabila dianggap sudah cukup dan situasi tidak memungkinkan untuk menggali informasi lebih mendalam lagi, maka peneliti

menarik kesimpulan sementara hasil wawancara dan menanyakan (konfirmasi) beberapa catatan simpulan sementara kepada informan untuk menghindari bias pemahaman antara peneliti dengan informasi yang dimaksudkan oleh informan.

Sebelum wawancara dimulai sebaiknya tujuan wawancara perlu dijelaskan lebih dahulu, sehingga wawancara yang semula bersifat informal lambat laun beralih menjadi formal tanpa merubah suasana kaakraban. Dengan demikian akan diketahui lebih banyak tentang hal-hal sebagai berikut: (a) pengalaman dan perbuatan responden, (b) pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau pikiran tentang sesuatu, (c) perasaan, respon emosional, (d) pengetahuan tentang sesuatu, (e) penginderaan yang diuraikan secara deskripsi dan (f) latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga (Nasution, 1988).

Peneliti setidaknya dihadapkan pada dua masalah pokok dalam wawancara, yakni, bagaimana mengadakan interaksi dengan responden dan bagaimana mengolah perbedaan pandangan antara peneliti dengan orang lain karena adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan peneliti (Nasution, 1998). Untuk itu pertanyaan dalam wawancara dimulai dengan kata tanya yang bersifat terbuka, seperti “bagaimana”, “apakah” dan “mengapa”. Selanjutnya berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (*taking the role of the other*), secara intim menyelam ke dalam dunia yang bersedia yaitu psikologis dan sosial mereka sehingga akan tercapai semua gagasan dan perasaannya dengan bebas dan nyaman (Mulyana, 2002).

Pendukung penyimpanan data dari ketiga teknik yang dipakai, maka peneliti membuat catatan harian. Catatan harian yang dimaksud berisi data kualitatif hasil pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung (Sitorus, 1998). Kegunaan masing-masing metode dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data yang akan dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan

Teknik pengumpulan data	Data yang akan dikumpulkan
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Situasi wilayah kerja BUMP • Kondisi Petani mitra BUMP • Kondisi lahan pertanian mitra BUMP
Pengamatan berperan serta	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas BUMP sehari-hari • Pola interaksi petani-mitra
Wawancara mendalam	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah pendirian BUMP • Sistem keanggotaan • Model kemitraan • Sistem pembagian keuntungan • Ruang lingkup usaha • Kendala-kendala • Keuntungan BUMP terhadap petani • Perubahan ekonomi rumahtangga petani sebelum dan setelah menjadi anggota BUMP • Alasan Pembentukan BUMP • Konsep • Kegiatan BUMP • Pemberdayaan oleh BUMP • Sistem Pemberdayaan • Lingkup Pemberdayaan • Penerima manfaat • Hasil pemberdayaan • Manfaat pemberdayaan • Mutu Pelayanan Kelembagaan Agribisnis • Dukungan Kelembagaan Agribisnis
Analisis dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji sejarah BUMP • Mengkaji profile petani anggota BUMP • Mengkaji profil mitra usaha

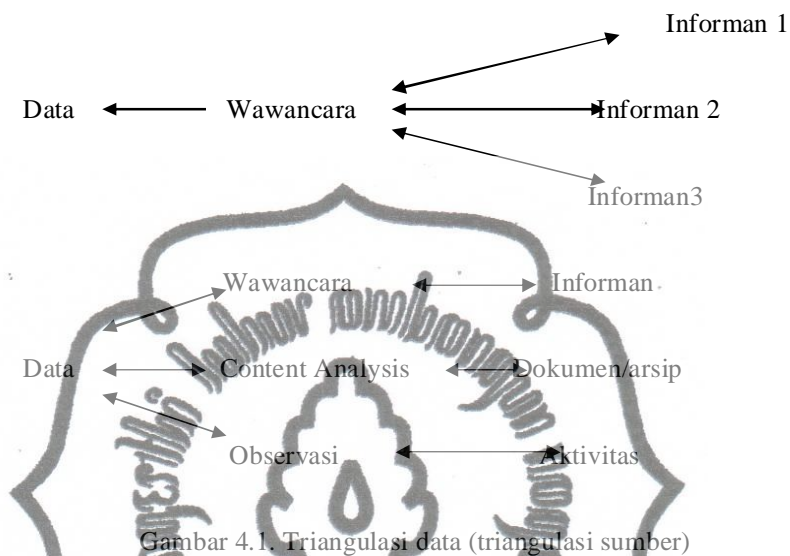
F. Validitas Data

Validitas data merupakan usaha untuk memperoleh data yang valid atau sah. Menurut Sutopo (2002), cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Triangulasi data (triangulasi sumber)

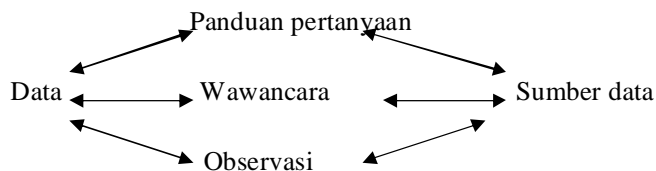
Teknik triangulasi data menurut Patton (Sutopo, 2002) sering disebut sebagai triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan pada peneliti agar dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Hal ini bermakna data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Sehingga apa yang didapat dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda jenisnya. Triangulasi sumber bisa menggunakan satu jenis sumber data seperti misalnya informan, namun beberapa informan atau nara sumber yang digunakan harus merupakan kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Triangulasi data (triangulasi sumber) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Triangulasi data (triangulasi sumber)

2) Triangulasi metode

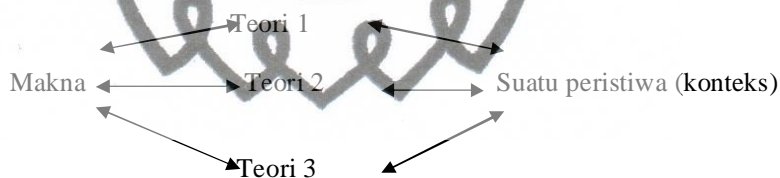
Triangulasi metode ini dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui: *indepth interview*, observasi, *focus group discussion*, dan content analisis. Misalnya data dikumpulkan melalui wawancara dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut akan semakin meyakinkan, jika dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui *focus group discussion*, juga jika dibandingkan dengan dokumen dan arsip yang telah diperoleh. Hal penting yang menjadi titik tekan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya (Sutopo, 2002). Triangulasi metode yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Triangulasi metode

3) Triangulasi teori

Triangulasi teori ini digunakan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dan satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh (Sutopo, 2002). Triangulasi teori yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3. Triangulasi teori

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data. Menurut Sutopo (2002), ada tiga komponen

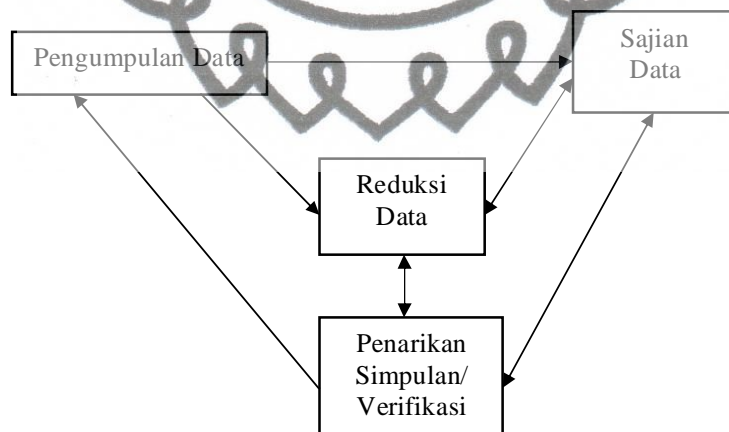
pokok dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sebagaimana tampak dari kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi dalam proses pengumpulan data meliputi kegiatan-kegiatan: (1) meringkas data; (2) mengkode; (3) menelusuri tema; (4) membuat gugus-gugus; (5) membuat partisi; (6) membuat memo. Kegiatan ini berlangsung sejak pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesimpulan akhir (Sitorus, 1998).

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian peneliti menyusun rumusan pengertian secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam pengertian beberapa pemahaman yang penting atau inti pemahaman (reduksi data) kemudian diikuti dengan penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan sehingga peristiwa penelitian ini menjadi lebih jelas dipahami dan dilengkapi dengan (tabel, matrik, gambar, media informasi dan lain sebagainya).

Pencatatan data sendiri dilakukan dengan catatan deskriptif dan reflektif. Pada bagian reflektif dilakukan dengan cara refleksi analisis, metode, teori, masalah etis dan konflik, serta kerangka pikir peneliti itu sendiri. Sementara itu, dalam melakukan reduksi data dilakukan dengan validitas data yang mempergunakan tahapan triangulasi (pengecekan data inti) dari berbagai perspektif. Sebelum penarikan kesimpulan akhir, maka perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan; (2) tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan; (3) peninjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif"; dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Sitorus, 1998).

Bagaimana proses siklus dan interaktif digambarkan dalam gambar 4.4.



Gambar 4.4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Sutopo, 2002)

BAB V. KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar (sebelah utara), di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Boyolali.

B. Luas Wilayah

Kabupaten Sukoharjo secara administrative terbagi dalam 12 Kecamatan, 167 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha atau 1,43 % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Polokarto yaitu 6.218 Ha (13 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4 %) dari luas Kabupaten Sukoharjo (lihat tabel 5.1.).

Tabel 5.1. Pembagian administrasi dan Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	Weru	13	4.198	1.989
2	Bulu	12	4.386	1.117
3	Tawang Sari	12	3.998	1.656
4	Sukoharjo	14	4.458	2.363
5	Nguter	16	5.488	2.689
6	Bendosari	14	5.299	2.569

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)
7	Polokarto	17	6.218	2.576
8	Mojolaban	15	3.554	2.234
9	Grogol	14	3.000	1.007
10	Baki	14	2.197	1.276
11	Gatak	14	1.947	1.266
12	Kartasura	12	1.923	515
Jumlah		167	46.666	21.257

Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 sebanyak 843.127 jiwa yang terdiri dari 417.276 laki-laki (49,49 %) dan 425.851 perempuan (50,51 %). Rasio jenis kelamin pada tahun 2009 sebesar 97,99 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki (lihat tabel 5.2.).

Tabel 5.2. Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin, sex ratio berdasarkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	Weru	32.844	33.989	66.833	96,63
2	Bulu	25.385	26.276	51.661	96,61
3	Tawang Sari	29.112	29.681	58.793	98,08
4	Sukoharjo	41.848	42.894	84.742	97,56
5	Nguter	32.128	32.307	64.435	99,45
6	Bendosari	33.404	34.007	67.411	98,23
7	Polokarto	37.160	37.314	74.474	99,59
8	Mojolaban	39.351	39.688	79.039	99,15
9	Grogol	51.480	51.752	103.232	99,47
10	Baki	26.480	26.374	52.900	100,58
11	Gatak	24.024	24.513	48.537	98,01
12	Kartasura	44.014	47.056	91.070	93,54
Jumlah		417.276	425.851	843.127	97,99

Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2009) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2004 sebanyak 1.747 jiwa/km² menjadi 1.807 pada tahun 2009.

Tabel 5.3. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Weru	4.198	66.833	1.592
2	Bulu	4.386	51.661	1.178
3	Tawangsari	3.998	58.793	1.471
4	Sukoharjo	4.458	84.742	1.901
5	Nguter	5.488	64.435	1.174
6	Bendosari	5.299	67.414	1.272
7	Polokarto	6.218	74.474	1.198
8	Mojolaban	3.554	79.039	2.224
9	Grogol	3.000	103.232	3.441
10	Baki	2.197	52.900	2.408
11	Gatak	1.947	48.537	2.493
12	Kartasura	1.923	91.070	4.736
Jumlah		466.66	843.127	1.807

Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010

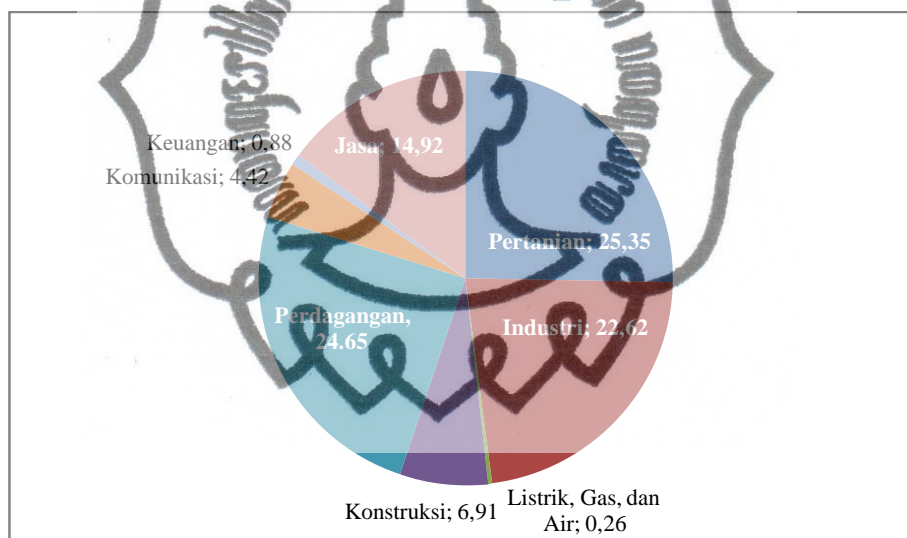
D. Mata Pencaharian

Beberapa jenis mata pencaharian yang menjadi pekerjaan utama penduduk di Kabupaten Sukoharjo dengan prosentase yang paling banyak adalah bidang pertanian (25,35 %). Pekerjaan di bidang pertanian tidak mayoritas karena banyak juga penduduk di usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada bidang industri (22,62 %), perdagangan (24,65 %), dan jasa sebanyak 14,92 % (lihat tabel 5.4.) dan gambar 5.1.

Tabel 5.4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009

Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Prosentase
Pertanian	69.422	35.533	104.955	25,35
Industri	41.916	51.735	93.651	22,62
Listrik, Gas dan Air	347	716	1.063	0,26
Konstruksi	28.175	429	28.604	6,91
Perdagangan	45.625	56.425	102.050	24,65
Komunikasi	14.289	4.024	18.313	4,42
Keuangan	1.819	1.819	3.638	0,88
Jasa	37.668	24.116	61.784	14,92
Jumlah	239.261	174.797	414.058	100,00

Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010



Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010

Gambar 5.1. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 (%)

E. Tingkat Pendidikan

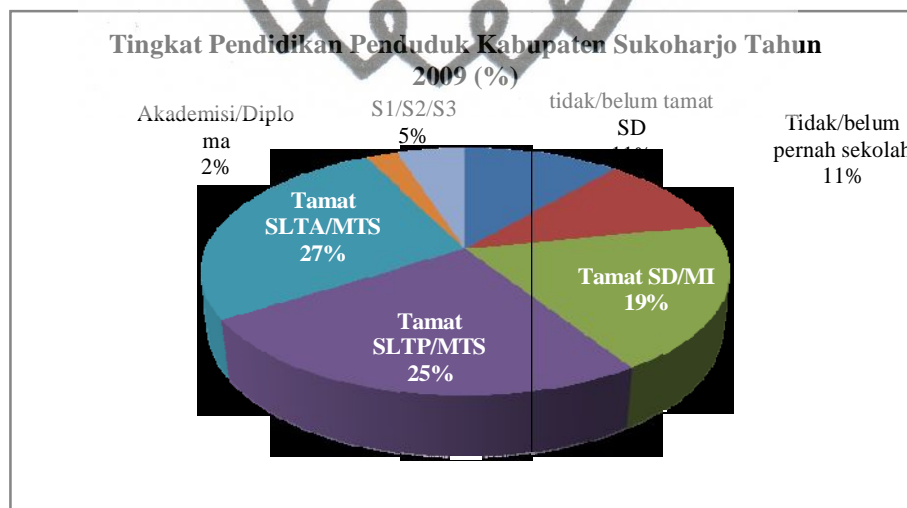
Tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan yang tamatkan penduduk Kabupaten Sukoharjo

paling banyak pada jenjang SD ke bawah yaitu 40,9 %, meskipun demikian kondisi ini relatif baik karena lebih dari 50 % (mayoritas) sudah tamat SLTP, SLTA, bahkan sebagian kecil dari mereka tamat diploma dan Sarjana. Untuk melihat lebih detail tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 5.5. dan gambar 5.2.

Tabel 5.5. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009

Jenis Mata Pencapaian	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Prosentase
Tidak/belum pernah sekolah	17.326	56.892	74.208	11,37
Tidak/belum tamat SD	30.714	38.243	68.957	10,56
Tamat SD/MI	65.767	58.205	123.972	18,99
Tamat SLTP/MTS	91.730	71.914	163.644	25,07
Tamat SLTA/MA	94.286	79.383	173.669	26,60
Akademisi/Diploma	6.800	8.851	15.651	2,40
S1/S2/S3	17.011	15.717	32.728	5,01
Jumlah	323.624	329.205	329.205	100,00

Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010



Sumber: Sukoharjo dalam Angka, 2010

Gambar 5.2. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2009

F. Kelembagaan Pertanian

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2010), di Kabupaten Sukoharjo terdapat 634 Kelompok Tani, 42 kelompok wanita tani, dan 163 Gapoktan. Kelompok tersebut tersebar pada 12 Kecamatan dan 167 Desa. Di Kabupaten Sukoharjo juga terdapat sebuah BUMP yang berkedudukan di Kecamatan Bendosari. Berbagai kelembagaan yang ada merupakan potensi yang bisa dikembangkan dalam mendorong keberadaan BUMP semakin kuat. Untuk melihat lebih rinci kelembagaan petani yang ada pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6. Kelembagaan petani di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010

No	Kecamatan	KT	BUMP	Gapok- tan	Wanita Tani	Pemuda Tani	Posluh Desa	P4S	KT HR	LM3
1	Weru	64	0	13	5	1	13	0	25	0
2	Bulu	48	0	12	3	1	12	0	35	0
3	Tawang Sari	49	0	12	1	1	12	0	18	1
4	Sukoharjo	77	0	14	1	1	14	0	0	1
5	Nguter	80	0	16	4	6	16	1	32	0
6	Bendosari	50	1	14	7	4	14	0	32	1
7	Polokarto	77	0	17	6	5	17	0	35	3
8	Mojolaban	48	0	16	1	1	15	0	0	2
9	Grogol	32	0	10	3	0	14	0	0	0
10	Baki	48	0	15	2	0	14	0	0	1
11	Gatak	31	0	14	4	0	14	0	0	3
12	Kartasura	30	0	10	5	0	12	0	0	0
Jumlah		634	1	163	42	20	167	1	177	12

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2010

Keterangan:

- BUMP : Badan Usaha Milik Petani
 KT : Kelompok Tani
 Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani
 P4S : Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya
 KTHR : Kelompok Tani Hutan Rakyat
 LM3 : Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat

G. Ikhtisar

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung pangan di Propinsi Jawa Tengah. Menurut data Sukoharjo dalam Angka (2010), prosentase terbesar jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat Sukoharjo adalah dalam bidang pertanian. Jika dilihat dari luasan sawah, pada tahun 2009, Kabupaten Sukoharjo memiliki sawah seluas 21.257 Ha dengan luas panen 50.448 Ha/tahun dan produksi sebanyak 357.524 ton Gabah Kering Giling/tahun (Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2010). Menurut data Jawa Tengah dalam Angka (2010), rata-rata produksi padi di Kabupaten Sukoharjo adalah yang tertinggi di Propinsi Jawa Tengah, yaitu 62,68 kw/ha. Pada sisi lain, penggunaan lahan juga mendukung pembangunan pertanian, dimana 45,55 % dari total lahan yang tersedia merupakan lahan sawah. Berbagai kelembagaan pertanian juga sudah terbentuk, yaitu 634 kelompok tani, 163 Gabungan Kelompok Tani, 42 organisasi wanita tani, 20 kelompok pemuda tani, 167 pos penyuluhan desa, 1 kelompok Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, 177 kelompok tani hutan rakyat, dan Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat.

Sumberdaya manusia di Kabupaten Sukoharjo masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendidikan yang tamatkan penduduk Kabupaten Sukoharjo yaitu paling banyak pada jenjang SD ke bawah yaitu 40,9 %, hanya 5,01 % yang merupakan tamatan S1/S2/S3. Dari aspek luas kepemilikan lahan, setiap petani mengelola lahan berkisar antara 3.000 - 6.000 m² atau rata-rata 0, 5661 Ha. Dari sisi kelembagaan, sebagian besar kelembagaan yang terbentuk merupakan inisiasi dari pemerintah, yang memiliki banyak kelemahan, antara lain: ketergantungan

pada anggaran program, rendahnya profesionalitas, dan tidak ada jaminan keberlangsungan program.

Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, telah menempatkan petani pada posisi yang sangat membutuhkan kredit usahatani untuk melakukan intensifikasi yang bermutu, serta posisitawar yang rendah dalam pemasaran produk yang dihasilkannya, utamanya di musim panen raya, terlebih di musim penghujan (Musim Tanam I) yang biasanya sulit melakukan pengeringan secara alami, dan mutu produknya tidak sebaik tanaman di musim kemarau (Musim Tanam II). Kondisi tersebut juga dibarengi dengan mutu penyuluhan (untuk menyelenggarakan Demplot, dan pendampingan/sekolah lapang) yang cenderung semakin menurun kualitasnya, sebagai akibat dari menyusutnya jumlah penyuluh senior yang mencapai usia pensiun.

Penyuluh yang baru, selain belum berpengalaman, juga masih berstatus tenaga harian lepas yang tidak memiliki jaminan untuk diangkat sebagai pegawai negeri (PNS). Menghadapi kenyataan tersebut, sudah saatnya untuk dipikirkan agar tidak lagi hanya menggantungkan penyuluhan pertanian pada keberadaan penyuluh PNS, dengan menyiapkan penyuluh swadaya yang memperoleh penghasilan cukup yang dibiayai sendiri oleh petani (GAPOKTAN).

Berbagai kelebihan dan kelemahan dari upaya pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo, mendorong perlunya upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Salah satu hal penting yang perlu dikembangkan adalah adanya penguatan kelembagaan petani sehingga daya tawar petani lebih kuat.

BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini memerlukan beragam data yang diperoleh dari beragam sumber menggunakan beragam teknik pengumpulan data, oleh sebab itu untuk memperoleh validasi data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metoda. Berikut adalah hasil penelitian yang didasarkan hasil triangulasi:

1. Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

a. Kelembagaan Petani

1) Kelompok tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kelompok tani sebagai organisasi non formal di pedesaan yang “ditumbuhkembangkan” dari, oleh, dan untuk petani memiliki ciri-ciri:

- a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
- b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam usaha tani,
- c) Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Beberapa hal yang menjadi unsur pengikat di kelompok tani, antara lain: (1) adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya, (2) adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya, (3) adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya, (4) adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurangnya sebagian besar anggotanya, (5) adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

Beberapa fungsi kelompok tani antara lain:

- a) Kelas belajar; Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.
- b) Wahana kerjasama; kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
- c) Unit Produksi; usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 634 kelompok tani yang tersebar di 12 Kecamatan (167 Desa/Kelurahan). Untuk mengetahui secara rinci, kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 6.1.

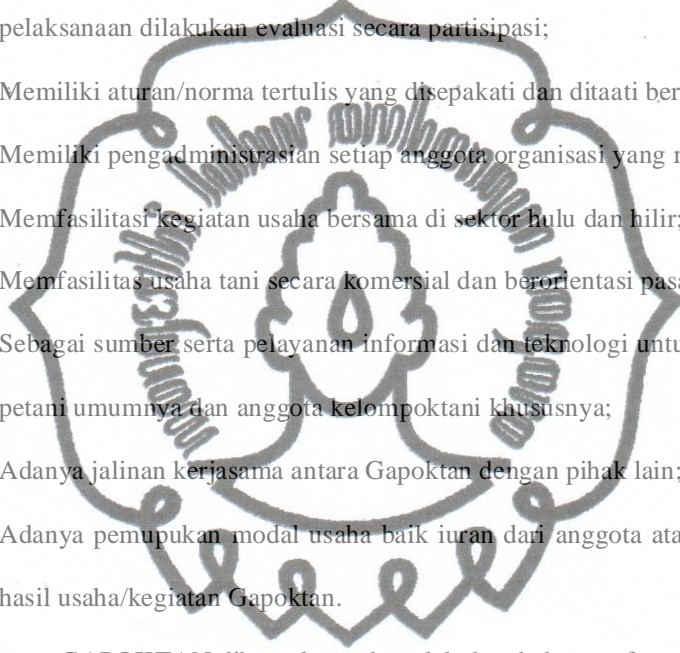
Tabel 6.1. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani (buah)
1	Weru	13	64
2	Bulu	12	48
3	Tawang Sari	12	49
4	Sukoharjo	14	77
5	Nguter	16	80
6	Bendosari	14	50
7	Polokarto	17	77
8	Mojolaban	15	48
9	Grogol	14	32
10	Baki	14	48
11	Gatak	14	31
12	Kartasura	12	30
Jumlah		167	634

Sumber: Sukoharjo dalam Angka (2010) dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2010).

2) Gabungan Kelompok tani

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain:

- 
- a) Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
 - b) Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
 - c) Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
 - d) Memiliki pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapih;
 - e) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
 - f) Memfasilitas usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
 - g) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
 - h) Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
 - i) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

GAPOKTAN dibentuk untuk melakukan beberapa fungsi, yaitu:

- a) Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga);
- b) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, kualitas, kontinuitas dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- c) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;
- d) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;

- e) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

Keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo, ditunjang oleh keberadaan 163 Gapoktan dari 167 Desa/Kelurahan. Sehingga hampir di semua desa/kelurahan memiliki 1 (satu) gapoktan. Untuk melihat distribusi gapoktan di masing-masing wilayah Kecamatan dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2. Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani (buah)	Jumlah Gapoktan (buah)
1	Weru	13	64	13
2	Bulu	12	48	12
3	Tawang Sari	12	49	12
4	Sukoharjo	14	77	14
5	Nguter	16	80	16
6	Bendosari	14	50	14
7	Polokarto	17	77	17
8	Mojolaban	15	48	16
9	Grogol	14	32	10
10	Baki	14	48	15
11	Gatak	14	31	14
12	Kartasura	12	30	10
Jumlah		167	634	163

Sumber: Sukoharjo dalam Angka (2010) dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2010).

b. Kelembagaan Ekonomi Petani

Kelembagaan Ekonomi Petani adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini (1969) telah merumuskan beberapa kelembagaan ekonomi

pedesaan yang diperlukan, antara lain: (1) sarana produksi dan peralatan pertanian, (2) kredit produksi, (3) pemasaran produksi, (4) percobaan/pengujian lokal, (5) penyuluhan, dan (6) transportasi. Ragam kelembagaan ekonomi Petani di Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3. Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Sukoharjo

No	Ragam Kelembagaan Ekonomi	Jumlah
1	Kelembagaan Sarana Produksi	
	a. Produsen Pupuk	32
	b. Produsen Benih	19
	c. Distributor Sarana Produksi pupuk	8
2	d. Pengecer/Kios Sarana Produksi pupuk	169
	Kelembagaan Pembiayaan	
	a. Bank	2
	b. Non-bank	92
3	c. Asuransi Kredit	
	Kelembagaan Pengolahan dan pemasaran Hasil	
	a. RMU	2
	b. Penggilingan padi kecil	335
	c. Penggilingan padi besar	8
	d. Koperasi Unit Desa	13
	e. PUAP	92
f. LDPM	5	
g. Pasar Hewan	15	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2010)

Telaah terhadap efektifitas kelembagaan ekonomi petani, memberikan informasi sebagai berikut:

a) Penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian,

Penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian, dewasa ini didominasi oleh swasta, mulai dari produsen, distributor dan pengecernya. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat 32 produsen pupuk yang terdiri dari 28 produsen pupuk organik, dan 4 produsen pupuk kimia. Selain itu, juga

terdapat 19 produsen benih, 8 distributor sarana produksi pupuk, dan 169 pengecer/kios sarana produksi.

Mutu layanan/efektifitas layanan sarana produksi di Kabupaten Sukoharjo, petani secara individu berhubungan langsung dengan penyedia sarana dan belum ada kerjasama yang dilakukan. Hubungan antara petani dan penyedia sarana produksi seperti pembeli dan pedagang. Jika dilihat dari sarana produksi utamanya pupuk, ketersediaan pupuk di Kabupaten Sukoharjo relatif terpenuhi (lihat tabel 6.4.). Sedangkan Jika dilihat dari ketersediaan alat dan mesin pertanian, maka dapat dilihat pada tabel 6.5.

Tabel 6.4. Kebutuhan, alokasi, dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Januari s.d. Desember tahun 2011

No.	Jenis Pupuk (ton)	Kebutuhan (ton)	Alokasi (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Urea	18.600	18.600	12.037,80	64,72
2	SP-36	8.507	3.708	3.169,50	85,40
3	ZA	5.977,60	5.165	6.120,00	118,48
4	NPK	11.040,40	11.945	8.206,25	68,70
5	Organik	4.808	5.308	1.246,70	23,49

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2011

Tabel 6.5. Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Alat dan mesin Pertanian	Jumlah (buah)
1	Traktor dua roda	1.196
2	Pompa Air (2"-8")	2.361
3	Power Thresher	533
4	Pedal Thresher	4.187
5	Perontok Jagung	6
6	Dryer (besar dan kecil)	8
7	Pecah Kulit	455
8	Polihser	316
9	Mesin Las Toolkit	1
10	APPO	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2011

b) Kredit produksi

Fasilitas kredit usahatani sebetulnya tersedia melalui Bank, berupa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan dan Penggemukan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beberapa perbankan yang selama ini memberikan pembiayaan kepada petani antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Namun aksesibilitas petani terhadap fasilitas kredit tersebut relatif terbatas, karena terbentur pada persyaratan, prosedur, dan kelembagaan petani. Khusus untuk sarana produksi, sebenarnya tersedia kredit YARNEN (dibayar panen) yang ditawarkan oleh pengusaha pupuk dan pestisida. Tetapi, seiring dengan kondisi hama dan penyakit yang sering menyebabkan kegagalan panen, kredit ini kurang berkembang.

c) Pemasaran produksi

Pemasaran produksi sejak lama menempatkan petani pada posisi-tawar yang lebih rendah dibanding penebas, pedagang, dan pengelola RMU, baik menyangkut estimasi produk maupun harga dan sistem pembayarannya. Hal ini disebabkan karena kebiasaan sistem penjualan yang menempatkan petani hanya mengikuti tawaran penebas.

Beberapa kelembagaan ekonomi petani yang juga bergerak pada aspek pemasaran yang lebih banyak merupakan hasil inisiatif pemerintah, seperti KUD dan Koperasi Kelompok Tani, lama kelamaan tidak mampu

bertindak secara professional sehingga secara perlahan hilang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan beberapa kelembagaan yang dibentuk masih bertahan antara lain PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) dan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang lebih bergerak pada aspek ketahanan pangan dan ekonomi. Sedangkan dari akses pemasaran peternakan, terdapat 15 pasar hewan, yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Pasar hewan tersebut, terdiri dari 2 pasar sapi, 5 pasar kambing, dan 8 pasar unggas (ayam).

c. Kelembagaan Pengujian dan penyuluhan

1) Kelembagaan Percobaan/pengujian lokal,

Mosher (1969) telah menempatkan *Teknologi Yang Selalu Berkembang* sebagai salah satu syarat mutlak pembangunan pertanian, tetapi penyelenggaraan pengujian dan demplot masih disikapi oleh penyuluh dan petani sebagai “proyek” dan bukan sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan pada setiap musim tanam.

2) Kelembagaan Penyuluhan

UU No. 16 Tahun 2006, membedakan adanya tiga kelembagaan penyuluhan *pertanian*, perikanan dan kehutanan dalam: Penyuluhan Pemerintah, Penyuluhan Swasta, dan Penyuluhan Swadaya. Otonomi daerah yang sedang berjalan sejak masa reformasi, kinerja kegiatan penyuluhan pertanian cenderung memburuk sebagai akibat dari

menyusutnya jumlah penyuluh serta persepsi pemerintah daerah terhadap arti penting penyuluhan dalam memberikan sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, revitalisasi penyuluhan sebagaimana diamanatkan dalam RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) pada tahun 2005 dan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Kabupaten Sukoharjo hingga sekarang belum terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jumlah penyuluh PNS semakin menyusut karena pensiun, sedangkan penyuluhan kontrak (Tenaga Harian Lepas/THL) belum ada kejelasan penetapannya sebagai PNS, yang pada gilirannya berakibat kinerja penyuluhan menurun.

d. Ikhtisar

Kabupaten Sukoharjo telah memiliki kelembagaan petani berupa Kelompok tani yang dibentuk sejak dasawarsa 1970-an. Keberadaan Kelompok tani ini kemudian berkembang menjadi GAPOKTAN yang merupakan persyaratan bagi penyaluran anggaran PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan). Di sisi lain keberadaan kelembagaan ekonomi petani masih memerlukan perbaikan.

Perkembangan kedepan diperlukan inovasi kelembagaan ekonomi petani untuk memperbaiki usahatani dari pengadaan sarana produksi, kegiatan

budidaya, pasca panen dan pemasaran produknya. Inovasi kelembagaan tersebut, antara lain harus memenuhi kualifikasi:

- a) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus mampu menangani keempat fungsi “Catur Sarana Unit Desa” (Mosher, 1969; Hadiapoetro, 1970) secara simultan.
- b) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus mampu melakukan kegiatan bisnis dan pemberdayaan petani. Bahkan, kegiatan pemberdayaan petani harus menjadi kegiatan utama dibanding sekedar mengejar keuntungan (Mardikanto, 2009).
- c) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus membagikan sebagian keuntungannya kepada petani (individu, kelompok, Gapoktan, Koperasi, Asosiasi Petani) mitra kerjanya, baik dalam bentuk uang tunai dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2009)
- d) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus mampu menjalin kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan fungsi-fungsi: pengadaan dan distribusi sarana produksi, pengadaan alat/mesin pertanian, penyediaan kredit usahatani, asuransi kredit, pelaksanaan penelitian/pengujian, penyuluhan/pendampingan petani, serta pengolahan dan pemasaran hasil (Saragih dan Khrisnamurti, 1994).
- e) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus mampu mengembangkan kegiatan penyuluhan swadaya yang selalu aktif berkoordinasi (menjalin kemitraan) yang sinergis dengan penyuluhan

pemerintah dan penyuluhan swasta/LSM (UU No. 16 Tahun 2006; Mardikanto, 2009)

- f) Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus dilandasi moral yang diwujudkan dalam setiap kegiatan dan pemanfaatan hasil/keuntungannya (Mubyarto *et al*, 1981)
- g) Pembentukan Kelembagaan ekonomi yang akan dikembangkan, harus dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi mengelola bisnis yang profesional dan memiliki komitmen dan integritas tinggi untuk memberdayakan petani (Mardikanto, 2009)

2. BUMP di Kabupaten Sukoharjo

a. Konsep Dasar BUMP

Menurut salah satu pengurus FACILITATOR sebagai pengggagas BUMP, bahwa BUMP hadir sebagai upaya mengatasi berbagai kelemahan kelembagaan pertanian yang sudah ada sebelumnya:

“Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Kabupaten Sukoharjo hadir dalam upaya membentuk model baru dalam mengatasi berbagai kelembagaan pertanian sudah ada sebelumnya. PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera (PT. GFS) dipilih sebagai nama dari BUMP, sesuai dengan Akta Notaris No.3, pada tanggal 08 April 2009 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-20874.A.H.01.01. Tahun 2009 pada tanggal 14 Mei 2009. Upaya pembentukan BUMP ini merupakan inisiasi dari FACILITATOR, merupakan Himpunan Mahasiswa Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta bekerjasama dengan GAPOKTAN Ngesti Raharjo, Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang di launching pada tanggal 11 Maret tahun 2009 dan peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Departemen Pertanian Republik Indonesia (Pramono, pengurus FACILITATOR, hasil wawancara 25 Januari 2011).

Menurut Mardikanto *et al* (2009), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), adalah sebuah perseroan yang selain mengejar keuntungan juga mengedepankan pemberdayaan. Selain beraktivitas untuk memberdayakan petani, sebagian keuntungan yang diperoleh juga akan dikembalikan untuk mengintensifkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana yang diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007, dan beragam bentuk kegiatan pemberdayaan yang lainnya. Secara konseptual, Pakpahan mengemukakan bahwa BUMP merupakan sarana gotong royong modern yang dikembangkan dari gagasan Bung Hatta yang mengembangkan koperasi di Indonesia. Melalui BUMP, diyakini petani akan lebih cepat mencapai kemajuan apabila petani membangun BUMP-nya bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS).

Mardikanto *et al* (2009):

“BUMP merupakan perseroan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat (petani) lebih dari sekedar mengejar keuntungan”.

Pakpahan (2009):

“BUMP merupakan sarana Gotong Royong Modern yang dikembangkan dari gagasan Bung Hatta yang mengembangkan koperasi di Indonesia.”

Gerak BUMP mencakup semua sub-sistem dalam sistem Agribisnis, baik *on-farm* (budidaya); *off farm* (produksi & distribusi sarana produksi dan alat/mesin pertanian, serta pengolahan dan pemasaran hasil) maupun *non-farm* (pembiayaan, pengujian, penyuluhan/ pemberdayaan, transportasi, pergudangan, dan lainnya).

Ciri utama dari BUMP adalah bentuk usahanya yang berupa *perseroan* yang diharapkan akan terus mengembangkan kemandirian & profesionalismenya. Sebagai Badan Usaha, BUMP dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu budidaya dan pengelolaan usahatani demi terwujudnya peningkatan produktivitas, nilai-tambah produk, dan perbaikan pendapatan usahatani, perbaikan daya-tawar dan kemampuan membangun kemitraan yang sinergis, yang maju, komersial, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan sudut pandang sinergis, BUMP dapat menjadi mitra dunia usaha yang tertarik untuk bekerjasama dengan petani. Karena itu, BUMP petani perlu memperkuat dan membangun organisasi ekonominya yang andal dan terpercaya.

Badan Usaha yang lain (BUMN dan Swasta) pun perlu mampu mentransformasikan dirinya agar bisa bermitra dengan petani (BUMP) apabila mereka ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Bahkan, BUMN atau BUMS yang menanamkan "modalnya" dalam pengembangan organisasi ekonomi petani (BUMP) akan memetik hasilnya dalam bentuk keuntungan yang besar di kemudian hari.

Bentuk usaha BUMP yang pada intinya merupakan badan usaha yang berbadan hukum, apakah berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT) tidak dapat dipaksakan, tergantung pada keinginan para petani. Yang perlu diingat adalah kelemahan dan kelebihan dari dua struktur badan usaha yang berbeda tersebut. BUMP dapat dikembangkan sebagai **hibrid perseroan dan koperasi**. Semangatnya koperasi tetapi wujudnya

perseroan (PT). Semangat koperasi ini dengan sendiri-nya akan terwujud melalui struktur kepemilikan perseroan yang melibatkan ribuan orang petani dan sifatnya terbuka. Dengan model ini maka BUMP memiliki kapasitas untuk *meleverage* modal sehingga kapasitasnya bisa meningkat hingga 3-5 kalinya. Selanjutnya, dengan modal yang bisa diperoleh dari perbankan atau dari pasar modal, maka kapasitas BUMP bisa cukup kuat untuk meningkatkan nilai tambah dan melakukan adu-tawar yang kuat dengan pihak mitra bisnisnya.

Pakpahan (2009) mengenalkan BUMP sebagai hibrid dari *perseroan* dan *koperasi*, Mardikanto (2009b) mengenalkan BUMP sebagai hibrid antara *lembaga bisnis* dan *lembaga pemberdayaan*. Hal ini bermakna, BUMP bukan hanya sekedar lembaga bisnis yang profesional, tetapi lebih mengutamakan fungsi pemberdayaan masyarakat (petani), dibanding untuk mengejar keuntungan.

Kepemilikan saham dalam BUMP yang tercantum dalam Akte Pendirian masih terbatas dimiliki oleh para pendiri, tetapi di masa depan secara bertahap akan mengarah kepada perusahaan publik, yang membuka peluang bagi semua warga masyarakat (utamanya petani yang menjadi mitrakerjanya) untuk memiliki sahamnya sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh sebab itu, para pendiri telah memiliki komitmen untuk menyisihkan 10% keuntungannya guna dikembalikan kepada petani/GAPOKTAN yang menjadi mitrakerja, dalam bentuk kegiatan pemberdayaan (pelatihan, pendampingan, dan lainnya) atau dalam bentuk saham. Tentang jumlah maksimum yang akan

dilepas, untuk sementara (sambil menunggu kesiapan GAPOKTAN) saham mayoritas masih dimiliki oleh pendiri.

Dipilihnya bentuk perseroan oleh para pendiri BUMP, dilandasi pemikiran bahwa, apapun bentuk usaha yang dimiliki oleh petani, **hanya akan berkembang jika mampu menjalin kemitraan yang sinergis** dengan pelaku usaha yang lebih besar, baik yang berupa BUMN/BUMD maupun Swasta. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaku usaha yang lebih besar itu pada umumnya enggan bermitra dengan petani/pelaku usaha mikro dan kecil, karena beberapa alasan:

- 1) SDM petani/pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya kurang profesional, baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan (terutama) sikapnya. Hal ini disebabkan karena mereka masih berperilaku *subsisten*, seperti:
 - a) sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari
 - b) tujuan utamanya dapat memberikan penghasilan dan atau memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarganya
 - c) tidak menghargai korbanan (modal, tenaga kerja) sendiri
- 2) Pada umumnya jarang menepati janji, baik yang menyangkut: waktu, mutu-produk, jumlah (takaran, timbangan)
- 3) Posisi yang “lebih rendah”, karena itu (jika terjadi perselisihan) harus “dikasihani”, dan mitra kerjanya harus mengalah

- 4) Jika ada perselisihan akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya, karena status hukum yang berbeda; antara Undang-undang Perseroan dan Undang-undang Koperasi atau Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Campur tangan (oknum aparat) birokrasi dalam setiap kemitraan dengan petani/pelaku usaha mikro dan kecil, yang seringkali selalu memberatkan mitra kerjanya.

b. Alasan Pembentukan BUMP

FACILITATOR sebagai penggagas berdirinya BUMP memilih GAPOKTAN Ngesti Raharjo sebagai mitra kerjanya. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa GAPOKTAN ini telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga telah dipercaya untuk mengelola dana LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan), dan memperoleh bantuan alat pengering (silo) jagung, serta sedang merencanakan kegiatan pertanian terpadu (peternakan, pertanian, pengolahan hasil, pengelolaan limbah ternak/pembuatan pupuk organik, serta pemasaran produk).

Berdasarkan wawancara dengan Mardikanto pada tanggal 20 Oktober 2011, sebagai salah satu penggagas keberadaan BUMP mengatakan bahwa badan usaha ini dibentuk atas dasar beberapa kepentingan dari para pihak, diantaranya:

- 1) Bagi kelompok tani (Gapoktan); BUMP diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dari kelompok tani/gapoktan melalui berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMP. Selain itu, keberadaan

BUMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok tani, serta meningkatkan jiwa kewirausahaan/*entrepreneurship*.

- 2) Bagi BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian pertanian, sebagai upaya mencari konsep yang tepat mengenai arah pengembangan kelompok tani. Keberadaan BUMP merupakan upaya mengujicoba bagaimana ketangguhan dari pengembangan kelompok tani ke korporasi.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah, BUMP diharapkan mampu mendorong terciptanya ketahanan pangan bagi daerah, mengingat kelompok petani yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi.
- 4) Bagi Facilitator, BUMP merupakan wujud implementasi komitmen mahasiswa pascasarjana yang menggeluti pemberdayaan masyarakat untuk mengaplikasikan khasanah keilmuan yang selama ini dipelajari.

c. Kegiatan

Gerak BUMP dapat mencakup semua sub-sistem dalam sistem Agribisnis, baik *on-farm* (budidaya); *off farm* (produksi & distribusi sarana produksi dan alat/mesin pertanian, serta pengolahan dan pemasaran hasil) maupun *non-farm* (pembiayaan, pengujian, penyuluhan/pemberdayaan, transportasi, pergudangan, dan lainnya).

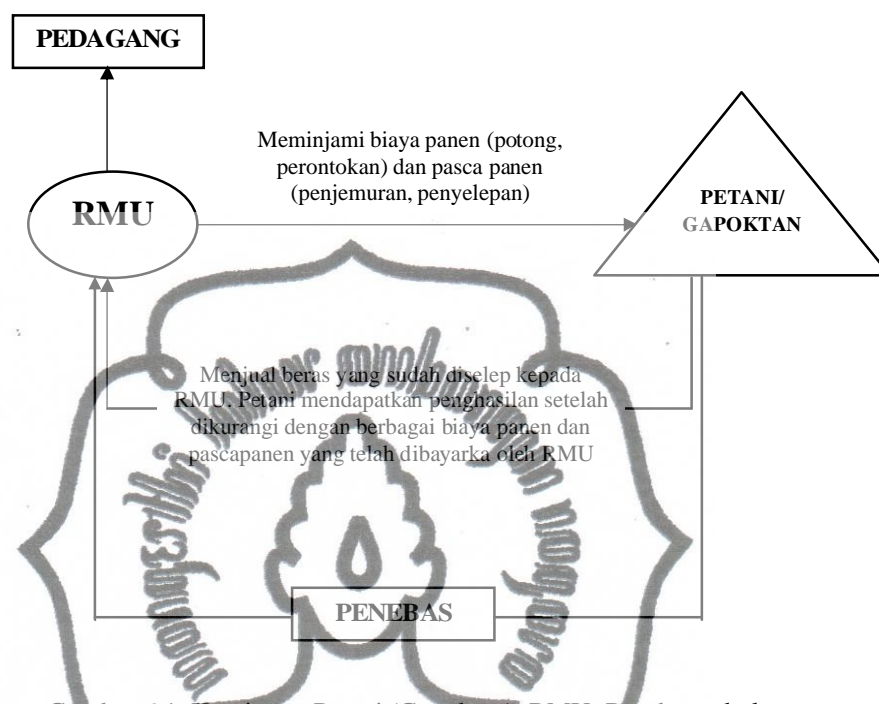
BUMP di Kabupaten Sukoharjo selama ini masih terbatas pada kegiatan *off-farm*, sedangkan kegiatan *on-farm* masih dalam tahapan rintisan.

Hal ini disebabkan karena pada mulanya permasalahan utama petani khususnya di Kabupaten Sukoharjo adalah pada persoalan pemasaran hasil pertanian. Sehingga kehadiran BUMP diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan kelompok tani/Gapoktan tersebut. Sedangkan pada aspek *on-farm*, BUMP masih terbatas pada penyelenggaraan demplot dan pendampingan. Uraian mengenai berbagai kegiatan BUMP pada aspek *off-farm* dan *on-farm* dan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Kegiatan *Off-Farm*

Berdasarkan hasil FGD dengan kelompok tani, pada saat ini ada dua pola penjualan hasil pertanian (utamanya padi), yaitu: (1) dijual dalam bentuk beras; dan (2) dijual dalam bentuk GKP (Gabah Kering Panen) (lihat gambar 6.1.). Pada pola pertama, petani berhubungan dengan RMU (*Rice Mill Unit*) dengan cara biaya potong, panen (perontokan), penjemuran, dan penyelepan untuk sementara ditanggung oleh RMU dan akan dibayarkan oleh petani dengan cara dikurangkan dengan hasil panen (beras). Pola ini perlahan mulai ditinggalkan oleh petani dengan beberapa alasan, antara lain: (1) petani tidak segera memperoleh uang karena proses yang panjang; (2) petani tidak pernah mengerti seberapa banyak beras yang akan dihasilkan dari hasil penyelepan³ dimana posisi tawar petani sangat rendah.

³ Pada kondisi normal perbandingan dari gabah menjadi beras adalah setiap 1 kg GKP akan menjadi 0,65 kg beras. Sedangkan pada saat musim *rendeng* (penghujan) hanya mencapai 0,5 kg beras.



Gambar 6.1. Kemitraan Petani (Gapoktan), RMU, Penebas sebelum bekerjasama dengan BUMP

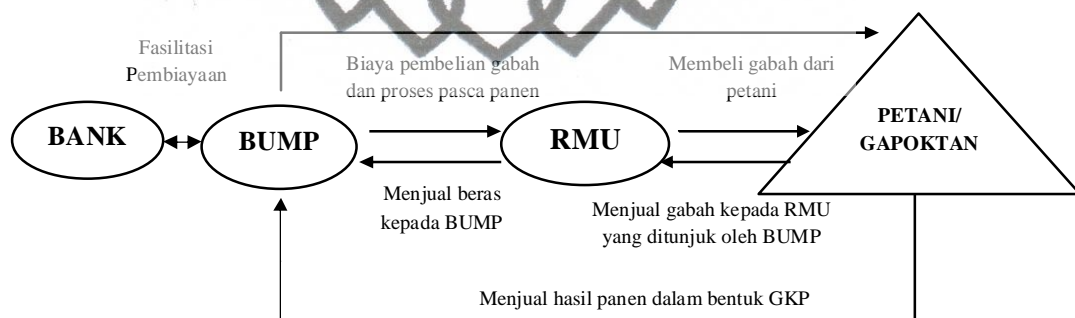
Berbagai alasan yang ada mendorong petani lebih menyukai menjual langsung kepada penebas. Pola ini memberikan peluang kepada petani untuk mendapatkan uang *cash*, walaupun diakui petani bahwa sistem ini sebenarnya merugikan petani karena harga yang diberikan relatif rendah (jawa: *regane sakarepe dewe*-harganya semanya penebas). Namun hal ini membantu petani dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda.

Kehadiran BUMP diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan petani yang selama ini dihadapi:

“Kehadiran BUMP diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan petani. Beberapa hal yang menjadi harapan petani terhadap BUMP antara lain: BUMP membeli hasil panen petani dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP), bantuan (pinjaman) pembiayaan pada proses budidaya maupun panen, pembayaran hasil panen secara *cash*, penyediaan bibit unggul bagi petani, BUMP juga memfasilitasi pemasaran hasil pertanian lain (misalnya: palawija, hortikultura), perlunya kegiatan penyuluhan kepada petani dalam proses budidaya sehingga kualitas padi lebih baik, dan BUMP diharapkan tidak terlalu ketat dalam menetapkan persyaratan kualitas padi yang akan dibeli”. (Sdry, Ketua kelompok tani Rukun Makmur Polokarto Sukoharjo, hasil wawancara tanggal 28 Maret 2011).

“Kehadiran BUMP kami harapkan akan mampu: meningkatkan produktifitas padi, meningkatkan kemampuan petani melalui pelatihan-pelatihan, melaksanakan demplot-demplot di kecamatan, meningkatkan kualitas gabah melalui system organik dan anorganik, maupun penananganan pascapanen yang baik” (Mlyn, Gapoktan Marsudi Bersatu Mojolaban, hasil wawancara tanggal 28 Maret 2011).

Berdasarkan beberapa harapan petani tersebut maka pola yang dibangun oleh BUMP dalam kegiatan *off-farm* adalah sebagai berikut:



Gambar 6.2. Kelembagaan yang dibangun BUMP

BUMP membeli gabah kepada petani melalui RMU yang telah menjadi mitra dengan memberikan modal pembelian. RMU kemudian membeli gabah dari petani dan mengolah sehingga menjadi beras. BUMP

membiayai seluruh proses pengolahan dari GKP menjadi beras kepada RMU (lihat gambar 6.2.).

2) Kegiatan On-Farm

Pada kegiatan on-farm, BUMP baru pada tahap perintisan atau permulaan. Dalam agenda permulaan tersebut dilakukan berbagai kegiatan antara lain: penyelenggaraan demplot, pendampingan sekolah lapang, dan pelatihan juru taksir. Uraian mengenai berbagai kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Demplot

Demonstrasi plot (demplot) dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Demonstrasi plot dilaksanakan secara partisipatif, artinya adanya proses pelibatan petani dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pemanfaatan hasil. Proses inilah yang membedakan dengan demplot yang selama ini dilakukan, yang seringkali didominasi oleh penyuluh. Disamping itu, penyelenggaraan demplot dapat membangun kemampuan kepada peneliti dalam melakukan penelitian usahatannya. Kegiatan demplot dilakukan pada 13 Gapoktan di Kabupaten Sukoharjo dengan menunjuk demonstrator pada masing-masing Gapoktan (lihat tabel 6.6.).

Tabel 6.6. Penyelenggaraan Demplot

No	GAPOKTAN	DESA	KECAMATAN	DEMONSTRATOR
1	Mekarsari	Lengkong	Bulu	Mulyadi
2	Sari Makmur	Tegalsari	WERU	Yusuf Bimo
3	Sido Makmur	Kateguhan	TAWANGSARI	Sukirno
4	Mekar Husada	Kepuh	NGUTER	Sulardi
5	Ngudi Rahayu*)	Daleman	NGUTER	Ahmad Sobari
6	Tani Mulyo	Sonorejo	SUKOHARJO	Bambang Rochyani
7	Marsudi Mulyo	Pohgogor	BENDOSARI	Bambang Tulung Urip
8	Tani Maju	Karangwuni	POLOKARTO	Wahid Mardiyanto
9	Sedyo Manunggal	Laban	MOJOLABAN	Sadoso
10	Pondok Makmur	Pondok	GROGOL	Sutarjo
11	Mumpuni Jaya	Mancasan	BAKI	Sihono
12	Margo Mulyo	Jati	GATAK	Sutarjo
13	Usahatani Makmur	Kertonatan	KARTOSURO	Surahman

*) – GAPOKTAN Pelaksana Usahatani Terpadu

Penetapan Demonstrator dilakukan atas usulan GAPOKTAN dengan memperhatikan kemauan, keteladanan, dan kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kaitannya dengan kerjasama kemitraan budidaya dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh BUMP dengan GAPOKTAN mulai musim berikutnya. Berbeda dengan penyelenggaraan Demplot pada umumnya yang menawarkan inovasi (sesuatu yang belum pernah dipraktekkan), dalam penyelenggaraan Demplot kali ini diserahkan kepada GAPOKTAN/Demonstrator. Jenis dan jumlah sarana produksi, maupun teknologi yang diterapkan diserahkan sepenuhnya kepada pengalaman dan keyakinan GAPOKTAN/Demonstrator demi keberhasilan Demplot tersebut.

Demplot dilakukan *Farmers Field Day* (FFD) pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Demplot, sejak penyiapan lahan, penyiapan pesemaian sampai dengan panen. Kegiatan FFD tersebut, dimaksudkan agar petani di sekitarnya dapat melakukan pengamatan/ evaluasi untuk mengadopsinya.

b) Pendampingan/Fasilitasi Sekolah-lapang

Pendampingan/Fasilitasi Sekolah-lapang, merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan Demplot sebagai petak-pengalaman sekaligus sumber belajar bagi anggota GAPOKTAN setempat. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu dilakukan pertemuan persiapan, yang melibatkan PPL/THL yang memiliki wilayah-kerja di lokasi penyelenggaraan Demplot. Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 23 September 2010. Penyelenggaraan Demplot dan pelaksanaan pendampingan/fasilitasi sekolah lapang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepada setiap Demonstrator diberikan stimulant oleh BUMP berupa sarana produksi sebanyak Rp. 500.000/Unit (sekitar 500 M²).
- (2) Pelaksanaan pendampingan/fasilitasi sekolah-lapang akan dilakukan secara berkala, setiap minggu (1x per minggu).
- (3) Acara pendampingan/fasilitasi sekolah-lapang akan disesuaikan dengan tahapan kegiatan budidaya tanaman yang dibutuhkan oleh anggota GAPOKTAN.
- (4) Fasilitator adalah PPL setempat, dan atau nara sumber lain yang disesuaikan dengan acara pendampingan/fasilitasi sekolah lapang.

- Tempat dan waktu penyelenggaraan

Kegiatan pendampingan/sekolah-lapang, akan dilakukan di dekat areal Demplot, pada tempat (Gubuk Pertemuan/Rumah Demonstrator, dan lainnya) dan waktu yang disepakati oleh anggota GAPOKTAN.

- Peserta yang dilibatkan

Pelaksanaan pendampingan/fasilitasi sekolah-lapang diharapkan dapat dihadiri oleh petani (utamanya petani-maju) anggota GAPOKTAN yang bersangkutan.

- Fasilitator sekolah lapang

Seperti telah disepakati, Fasilitator adalah PPL/THL setempat. Jika diperlukan, dapat mengundang nara-sumber lain, sesuai dengan acara pendampingan/fasilitasi sekolah-lapang.

- Materi yang dibahas

Materi yang dibahas, selalu disesuaikan dengan tahapan kegiatan budidaya tanaman yang dibutuhkan oleh anggota GAPOKTAN, yang ditetapkan pada akhir pertemuan pada minggu sebelumnya. Dengan demikian, pada setiap akhir pertemuan, perlu ditetapkan acara pertemuan pada minggu beikutnya.

c) Pelatihan Estimator

Pelatihan Estimator ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Sukoharjo menjual produknya melalui sistem tebasan (dijual di lapangan), sehingga petani dalam posisi tawar yang lebih rendah dibanding pembelinya, karena mereka sendiri tidak pernah mengerti tentang berapa produksi yang dihasilkannya.

Pelatihan ini diharapkan setiap GAPOKTAN memiliki kader yang akan melatih teman-teman anggota GAPOKTANnya, agar mampu melakukan estimasi atau menaksir produk yang akan dihasilkan. Melalui taksiran produk

itulah, mereka diharapkan akan memiliki posisi tawar yang lebih baik, dibanding yang selama ini terjadi. Pelaksanaan pelatihan ini, dilaksanakan di BPP Nguter dengan lahan praktek di sawah terdekat yang akan segera dipanen, pada tanggal 16 Oktober 2010.

Peserta pelatihan terdiri dari 38 orang, yaitu 26 orang utusan GAPOKTAN (2 orang/GAPOKTAN) dan 12 orang PPL/THL terkait. Pemilihan peserta pelatihan oleh GAPOKTAN, ditetapkan berdasarkan kemampuan melakukan analisis serta kesediaannya untuk menularkan hasil/pengalaman belajarnya kepada kader-kader GAPOKTAN yang lainnya.

Fasilitator Pelatihan adalah pensiunan Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang estimator/penaksiran produksi yang melekat pada bidang-tugasnya sebagai pengawas Balai Benih..

Beberapa materi penting dalam kegiatan pelatihan tersebut adalah:

- 1) Faktor-faktor penentu jumlah dan kualitas produksi (varietas, pemupukan, pengairan, jarak tanam (jumlah rumpun), jumlah anakan produktif/rumpun, panjang malai/jumlah gabah per malai, serta jumlah/persentase gabah hampa.
- 2) Teknik penaksiran produksi meliputi:
 - a) Penghitungan jarak-tanam (jumlah rumpun),
 - b) Jumlah anakan produktif/rumpun),
 - c) Penghitungan jumlah gabah per malai, serta
 - d) jumlah/persentase gabah hampa.

Proses Pelatihan dilakukan dalam 4 (empat) sesi, yaitu: (1) pengantar teori di dalam kelas, (2) praktek pengambilan contoh di lapangan, penghitungan jarak-tanam (jumlah rumpun), dan penghitungan jumlah anakan produktif per rumpun, (3) penghitungan jumlah gabah per malai, dan jumlah/persentase gabah-hampa yang kembali dilakukan di dalam kelas, dan (4) pembuatan rencana tindak lanjut pelatihan (RTL).

Pelatihan ini memberikan manfaat bagi petani. Pengalaman belajar yang diperoleh oleh peserta antara lain:

- 1) Teori tentang faktor-faktor penentu jumlah dan kualitas produksi yang terdiri dari: varietas tanaman, pemupukan, pengairan, jarak-tanam (jumlah rumpun), jumlah anakan-produktif/rumpun, panjang malai/jumlah gabah per malai, serta jumlah/persentase gabah-hampa.
- 2) Teknik penaksiran produksi meliputi:
 - a) Penghitungan jarak-tanam (jumlah rumpun),
 - b) Jumlah anakan produktif/rumpun),
 - c) Penghitungan jumlah gabah per malai, serta
 - d) jumlah/persentase gabah-hampa.
- 3) Teknik memfasilitasi pelatihan

Kegiatan demonstrasi plot mengalami gagal panen karena adanya serangan hama wereng. Sehingga kegiatan *on-farm* belum dilanjutkan. Namun demikian, ke depan BUMP di Kabupaten Sukoharjo akan merambah pada area *on-farm*.

d. Pemberdayaan Petani/Gapoktan oleh BUMP

1) Kinerja Sistem Pemberdayaan

Salah satu proses penting dalam penyuluhan pertanian adalah adanya aktivitas pemberdayaan. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa sistem penyuluhan mencakup beberapa sub sistem, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Sarana-prasarana, pembiayaan, dan pengendalian & pengawasan. Beberapa sub-sistem tersebut akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan kondisi BUMP di Kabupaten Sukoharjo:

a) Kebijakan

Peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani menegaskan bahwa untuk mengembangkan kelompok tani/gapoktan maka strategi yang bisa digunakan adalah dengan mengembangkan kelompok tani menjadi Gapoktan untuk kemudian diberikan pilihan apakah akan bergabung ke dalam asosiasi atautkah korporasi.

BUMP mencoba mengembangkan kelompok tani kearah korporasi. Namun demikian, korporasi yang dijalankan tidak sekedar bergerak dalam aspek bisnis semata melainkan juga diimbangi dengan kegiatan pemberdayaan kepada kelompok tani. Kebijakan ini diambil sebagai upaya BUMP dalam meningkatkan kemampuan tidak hanya finansial tetapi juga sumberdaya manusia dan lingkungan.

b) Kelembagaan

BUMP merupakan lembaga swasta yang bergerak dalam upaya mengembangkan kelompok tani/Gapoktan menjadi lebih berdaya baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kelembagaan yang dibangun lebih ke arah korporasi atau perusahaan yang bersifat profesional.

c) Ketenagaan

BUMP sebagai sebuah perseroan harus dikelola secara profesional. Konsekuensinya dalam pengelolaan BUMP dibutuhkan SDM dengan kualifikasi tertentu, yang tidak cukup mengandalkan jenjang pendidikan formal tertentu. Tentang hal ini, harus diingat bahwa manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni (*science and arts*). Karena itu, SDM yang perlu disiapkan tidak cukup dipilih dan ditetapkan berdasarkan ijazah yang dimiliki, tetapi juga pengalaman kerja dan juga karakter pribadi, utamanya tentang keberpihakan dan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kaitan dengan ketenagaan, jajaran Direksi PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera terdiri dari: pensiunan Kepala Dinas Pertanian (sebagai Komisaris), Ketua GAPOKTAN (sebagai Direktur Utama), dan Pelaku Bisnis yang berpengalaman dan memiliki jejaring luas (sebagai Direktur). Disamping itu, juga difasilitasi oleh sekelompok akademisi yang memiliki kompetensi dibidang: manajemen agribisnis, hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

d) Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai sebuah perseroan diselenggarakan atas dasar Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham, yang merupakan kelompok petani dan pemangku kepentingan yang peduli terhadap kesejahteraan petani menjadi dasar dari penyelenggaraan kegiatan di BUMP. Oleh karena itu, semua mekanisme kerja telah ditetapkan secara profesional, yang dalam pelaksanaan kegiatan hariannya dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang merupakan Ketua Gapoktan Ngesti Raharjo.

e) Sarana dan Prasarana

BUMP berupaya untuk selalu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja. Upaya tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Sarana prasarana tersebut antara lain: gudang, sarana transportasi, RMU, dan perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh jajaran manajemen di BUMP. Selain itu, sarana dan prasarana seperti RMU tidak dikelola langsung oleh BUMP karena badan usaha ini bekerjasama dengan pemilik Rice Mill Unit di Kabupaten Sukoharjo.

f) Pembiayaan

BUMP sebagai lembaga yang berbentuk perseroan tidak menggantungkan pembiayaan pada pemerintah, melainkan bersumber dari

pemilik saham di perusahaan. Selain itu, BUMP juga menjalin kemitraan dengan lembaga perbankan, diantaranya adalah dengan Bank Bukopin Cabang Sudirman Surakarta dan Bank BNI Cabang Slamet Riyadi Surakarta.

g) **Pengendalian dan Pengawasan**

BUMP sebagai sebuah perseroan, maka pelaksanaannya diawasi oleh pemilik modal, yaitu petani dan pemangku kepentingan lainnya yang berpihak kepada petani. Untuk pelaksanaan kegiatan keseharian dilaksanakan oleh manajemen BUMP yang dipimpin oleh Direktur Utama dan dibantu dengan beberapa manajer. BUMP juga senantiasa dikendalikan oleh tuntutan lembaga mitra dalam menjaga mutu.

2) **Lingkup Pemberdayaan**

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan meliputi empat catur pengembangan kapasitas, yaitu: pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, dan pengembangan kapasitas lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Berikut ini akan diuraikan mengenai lingkup pemberdayaan yang ada di PT. GFS (BUMP di Kabupaten Sukoharjo):

a) ***Pengembangan kapasitas Manusia***

Pengembangan kapasitas manusia mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, yaitu: (1)

pengembangan kapasitas individu; (2) pengembangan kapasitas entitas dan (3) pengembangan kapasitas jejaring.

BUMP di Kabupaten Sukoharjo telah berupaya mengembangkan kapasitas manusia melalui berbagai kegiatan. Dilihat dari aspek pengembangan kapasitas individu, BUMP telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pemberdayaan, misalnya: pelatihan juru taksir, pembekalan budidaya melalui demonstrasi plot (demplot), dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas individu tidak hanya pada aspek usaha tani tetapi juga menyangkut kepribadian masyarakat.

Berbagai pertemuan baik FGD, *success story*, rapat, sosialisasi, dan lainnya juga dapat mengembangkan kapasitas petani dalam menjalin komunikasi dengan pihak lain (pemangku kepentingan). Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, menyampaikan pendapat, dan kemampuan lainnya diharapkan mampu menjadi wahana tersendiri dalam meningkatkan kapasitas masyarakat baik pada level individu maupun kelembagaan.

BUMP sebagai wadah petani dan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan kesejahteraan petani juga memfasilitasi terbentuknya kemitraan diantara stakeholders yang ada. Misalnya: dengan adanya BUMP mampu mendekatkan petani dengan RMU, lebih mendekatkan petani dengan Penyuluh pertanian, mendekatkan petani dengan pengusaha, dan lainnya. Jaringan kemitraan ini menciptakan kemampuan petani dalam memperkuat kapasitas jejaring.

b) Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha ini dirasakan sangat penting baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena berkaitan dengan sarana masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan utamanya dari aspek ekonomi. Dalam konteks ini, BUMP sebagai sebuah badan usaha milik petani merupakan upaya mengembangkan kapasitas usaha bagi petani yang selama ini belum mapan dan mantap dalam bidang usahanya, utamanya dalam aspek pemasaran. Melalui BUMP, petani memiliki kepastian pasar dan harga dan memiliki jejaring kemitraan yang lebih luas.

c) Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pengertian lingkungan bisa bermakna lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan fisik menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan relasi sosial yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka BUMP di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki komitmen untuk menyisihkan 10 % dari keuntungan untuk kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai bagian dari aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Kegiatan pemberdayaan ini bisa mencakup pemberdayaan lingkungan masyarakat baik dalam makna sempit (lingkungan fisik) maupun makna luas (termasuk lingkungan sosial).

d) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Syahyuti (2007) menawarkan pentingnya 8 (delapan) kelembagaan dalam pengembangan agribisnis yang meliputi: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dan lainnya).

BUMP paling tidak telah memasuki beberapa ranah kelembagaan agribisnis, diantaranya adalah pada aspek permodalan, pemasaran hasil, maupun penyediaan informasi. Namun demikian, BUMP memiliki komitmen untuk mengembangkan penguatan kapasitas pada aspek *on-farm*, meliputi: penyediaan input usahatani, kelembagaan usaha tani, dan lainnya.

3) Penerima Manfaat Pemberdayaan

Penerima manfaat dari adanya BUMP bisa pada level individu, entitas (kelompok), dan sistem/jejaring kemitraan.

- a) Individu, antara lain: petani, masyarakat umum, dan lainnya
- b) Entitas, antara lain: kelompok tani, gapoktan, RMU, kelompok penyuluh, dan lainnya
- c) Sistem/Jejaring Kemitraan, antara lain: pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran, akademisi, dan lainnya

e. Dukungan Kelembagaan Agribisnis Lainnya

1) Kegiatan On-farm

BUMP pada saat ini masih berfokus kepada kegiatan *off-farm*. Namun demikian, dalam perkembangannya akan mengarah kepada kegiatan on-farm, mengingat banyaknya dukungan kelembagaan agribisnis lainnya utamanya pada aspek pembiayaan maupun asuransi kredit. Kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a) Pembiayaan

Berkaitan dengan pembiayaan on-farm, beberapa lembaga bank telah memiliki kesediaan untuk membantu petani melalui BUMP.

b) Asuransi Kredit

Gagasan mengenai asuransi pertanian menjadi perdebatan panjang mengingat selama ini, asuransi lebih diperuntukkan bagi pedagang yang memiliki NPWP, SIUP, TDP, dan surat perijinan lainnya. Sementara bagi petani, bukan hal yang mudah memperoleh asuransi meskipun petani sebenarnya bagian dari kegiatan usaha ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa lembaga asuransi menawarkan premi asuransi untuk petani dengan BUMP sebagai penanggung (*avalis*).

2) Kegiatan Off-farm

a) Pembiayaan

Pembiayaan operasional BUMP sebagian besar bersumber dari internal. Selain itu, BUMP juga bekerjasama dengan beberapa Perbankan,

utamanya untuk biaya modal pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dan pengolahan produk di RMU. Beberapa perbankan yang telah menjalin kemitraan dengan BUMP antara lain Bank Bukopin, Bank BRI dan BNI selain itu, BUMP juga bekerjasama dengan PT. Padi Energi Nusantara (PT. PEN).

b) Pengolahan Produk

Pengolahan produk yang dimaksud adalah pengolahan dari Gabah Kering Panen (GKP) yang dibeli dari petani menjadi beras. Untuk aktifitas ini, pada mulanya PT. GFS berencana membeli sendiri semua teknologi pengolahan termasuk mesin, drayer, tempat penjemuran, dan lainnya. Namun demikian, dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah efisiensi dan memberikan peluang bermitra dengan kelembagaan agribisnis lainnya utamanya RMU, maka BUMP memutuskan untuk bekerjasama dengan RMU yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Sistem yang dibangun adalah BUMP meminjamkan modal kepada RMU untuk membeli GKP dari petani untuk kemudian diolah menjadi beras. BUMP juga membiayai pengolahan produk tersebut. Beras yang telah dihasilkan dari proses pengolahan tersebut akan disetorkan kepada BUMP.

c) Pemasaran

Aktifitas pemasaran yang telah dilakukan BUMP adalah utamanya pada produk beras. Aktifitas tersebut didukung dengan adanya bekerjasama dengan salah satu pedagang besar yang ada di Pasar Induk Cipinang Jakarta.

Pedagang mitra tersebut bersedia menerima produk BUMP sebanyak 5.000 (lima ribu) ton setiap bulan. Dukungan kelembagaan pasar ini menjadi kelebihan dari BUMP sebagai bagian dari jaminan pasar yang selama ini menjadi kendala besar bagi petani.

f. Mutu Layanan Kelembagaan Agribisnis yang Lain

Kemunculan BUMP pada hakikatnya memberikan alternatif kelembagaan bagi petani sehingga lebih mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini bermakna, kehadiran BUMP diharapkan mampu melengkapi berbagai kelemahan dari kelembagaan agribisnis lainnya. Semakin ditemukan banyak kelemahan dari mutu layanan kelembagaan agribisnis yang ada maka BUMP akan menjadi inovasi kelembagaan yang benar-benar dibutuhkan oleh petani. Berikut ini adalah beberapa mutu layanan kelembagaan agribisnis lainnya:

a) Penyuluhan

Lembaga penyuluhan merupakan salah satu wadah dalam upaya transfer teknologi kepada petani melalui pendidikan orang dewasa. Dalam makna luas penyuluhan mencakup semua sistem kehidupan petani, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi. Namun demikian, penyuluh pertanian utamanya yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang secara historis “dimanjakan” oleh pemerintah pada masa revolusi hijau dengan berbagai program yang bersifat top-down, maka seringkali penyuluh dianggap kurang kreatif. Sehingga seringkali kegiatan penyuluhan kurang dirasakan manfaatnya oleh petani. Keberadaan BUMP mencoba mengatasi kelemahan

ini dengan memberikan berbagai alternatif peranan tidak hanya dalam aspek usaha tani, tetapi juga peningkatan kapasitas manusia, usaha, lingkungan, maupun kelembagaan yang ada.

b) Pembiayaan (Kredit dan Asuransi)

Kesulitan selama ini yang dihadapi petani adalah akses berbagai kredit dari perbankan. Tidak banyak lembaga pembiayaan yang dengan mudah memberikan kredit apalagi asuransi pertanian kepada petani. Hal ini disebabkan, usaha pertanian dianggap memiliki risiko yang besar sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi lembaga pembiayaan. Tidak banyak juga lembaga asuransi yang bersedia memberikan jaminan asuransi kepada usaha pertanian. Beberapa kinerja lembaga pembiayaan ini juga menjadi faktor penghambat bagi usaha pertanian di Kabupaten Sukoharjo. Melihat berbagai kinerja lembaga pembiayaan yang kurang antusias kepada petani mendorong bagaimana BUMP mampu menjangkau berbagai masalah yang hingga saat ini belum bisa terpecahkan.

c) Pemasaran Produk

Salah satu permasalahan pokok petani selain pembiayaan adalah mengenai jaminan pasar dan harga. Selama ini belum ada kelembagaan agribisnis yang menjamin pemasaran produk dari petani apalagi jaminan harga. Kejadian produk melimpah dengan harga murah menjadi lazim ketika musim panen raya tiba. Oleh karena itu, lemahnya jaminan pasar dan harga dari kelembagaan agribisnis yang ada memicu perlunya kelembagaan baru

yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. BUMP sebagai salah satu kelembagaan baru diharapkan mampu mengatasi persoalan ini sehingga petani memperoleh jaminan harga dan jaminan pasar.

g. Manfaat BUMP

Keberadaan BUMP direspon beragam oleh berbagai pemangku kepentingan. Respon tersebut didasarkan pada pengalaman selama ini dalam berhubungan dengan BUMP baik sebagai bagian dari BUMP maupun pihak lain yang ingin mengembangkan BUMP di wilayah lain di luar Sukoharjo.

1) Manfaat bagi para pihak (pemangku kepentingan) di Kabupaten Sukoharjo

a) Manfaat bagi petani (Kelompok-tani/GAPOKTAN)

Berdasarkan pada hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Sukoharjo diperoleh berbagai respon terhadap BUMP, baik terkait dengan konsep, pendiri, kegiatan atau manfaat.

(1). Respon Pengurus GAPOKTAN terhadap konsep BUMP

- (a) BUMP sebagai hibrid Lembaga Bisnis dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, merupakan terobosan baru untuk mengembangkan usahatani dan pemberdayaan petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya.
- (b) BUMP sebagai lembaga bisnis berbentuk Perseroan Terbatas, diharapkan akan lebih mudah menjalin kemitraan dengan Pengusaha Besar, utamanya Produsen Sarana Produksi, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Pemasaran.

- (c) Keberadaan kelompok tani dan gapoktan tetap dipertahankan dan terus diberdayakan sebagai Lembaga Pemberdayaan Petani.
- (d) Kelompok tani dan gapoktan diharapkan secepatnya dapat menjadi pemegang saham/pengelola BUMS
- (e) PT. GFS diharapkan dapat memfasilitasi tumbuhnya BUMS baru di setiap Kecamatan.

(2). *Respon Pengurus GAPOKTAN terhadap pendiri BUMS*

Pengurus Gapoktan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap komitmen para pendiri yang telah dikenal memiliki kinerja dan reputasi baik di mata masyarakat petani di Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari:

- (a) Ketua GAPOKTAN yang telah memperoleh kepercayaan mengelola LUEP dan menerima hibah pengering (*dryer*) jagung dari Departemen Pertanian.
- (b) Pensiunan Kepala Dinas Kabupaten Sukoharjo, yang selama 11 tahun masa jabatannya, setiap tahun selalu memperoleh penghargaan Tingkat Nasional pada beragam kategori penilaian.
- (c) Akademisi yang terlibat, juga telah dikenal baik sebagai suami pensiunan Kepala Dinas sekaligus pakar penyuluhan pertanian.
- (d) Pelaku Bisnis yang sekaligus juga Ketua Forum Lembaga Perekonomian dan Lembaga Pengembangan Pertanian Solo Raya pada lembaga swadaya masyarakat yang berkantor pusat di Jakarta.

(3). *Respon Pengurus GAPOKTAN terhadap kegiatan BUMP*

BUMP selama ini telah melakukan kegiatan pemasaran beras sebanyak 600–900 ton/bulan. Berkaitan dengan fakta tersebut, pengurus GAPOKTAN sangat berharap agar BUMP benar-benar mampu berperan dalam membantu pemasaran produk GAPOKTAN, utamanya pada musim panen raya, khususnya di musim penghujan (MT-1).

“Kami berharap setelah adanya berbagai kegiatan persiapan kerjasama budidaya tanaman antara BUMP dan GAPOKTAN dalam bentuk: pelaksanaan Demplot, Pelatihan Estimator, dan pendampingan/fasilitasi sekolah lapang, kerjasama budidaya tanaman dan pemasaran benar-benar dapat segera dimantapkan. Sedangkan, terhadap rencana BUMP untuk menyalurkan kredit usahatani yang dijamin oleh Lembaga Asuransi, kami menilai akan sangat membantu petani, karena tanpa agunan dan tanpa khawatir dibebani hutang (jika usahanya gagal)” (Jmr, Gapoktan Ngudi Makmur Weru, hasil wawancara tanggal 2 April 2011)

“dimohon untuk hasil panen di wilayah kami dapat ditampung oleh BUMP dengan harga yang disesuaikan dengan pasar. Untuk pengadaan pupuk supaya tidak kacau seperti rencana petani pada waktunya menggunakan. Pengairan supaya ditinjau kembali masalah tata giliran yang sudah berlaku serta mohon untuk jaringan atau saluran supaya diperbaiki lagi demi kelancaran air sampai sasaran. Untuk bantuan kepada kelompok mohon segera dibantu dan mohon binaannya demi kelancaran kerja kami” (Dyd, Gapoktan Pondok Makmur, hasil wawancara tanggal 23 April 2011)

(4). *Respon Pengurus GAPOKTAN terhadap manfaat BUMP*

Pengurus GAPOKTAN mengemukakan penilaian manfaat BUMP sebagai berikut:

- (a) Pembelian gabah/beras yang selama satu tahun terakhir telah dilakukan oleh BUMP, belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani/GAPOKTAN.

- (b) Terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan dan melibatkan GAPOKTAN yang meliputi: penyelenggaraan Demplot, pelatihan estimator (juru-taksir) produk, dan pendampingan/fasilitasi sekolah-lapang, mereka menyatakan akan sangat dirasakan manfaatnya. Khusus tentang pelaksanaan Demplot yang memberikan keleluasaan kepada GAPOKTAN untuk memilih inovasi (baik tentang sarana produksi dan teknologi yang dikenalkan) dinilai sebagai sangat baik dan lebih bermanfaat dibanding mengenalkan inovasi yang belum dikenal oleh petani/GAPOKTAN.
- (c) Terhadap kegiatan pendampingan/fasilitasi sekolah lapang, dinilai akan sangat bermanfaat, karena kegiatan tersebut akan meningkatkan mutu-intensifikasinya.
- (d) Terhadap kegiatan pelatihan estimator, dinilai juga akan memberikan manfaat yang sangat berarti, karena jika mereka akan menjual produknya sistem tebasan, mereka sudah mampu memprakirakan tingkat produk yang akan dicapai.
- (e) Terhadap rencana kerjasama pengadaan sarana produksi melalui sistem kredit yang disalurkan oleh program PK-BL dari Bank BUMN, serta penjaminannya oleh Lembaga Asuransi, dinilai sangat bermanfaat, karena:
- (a) Petani tidak diharuskan menyediakan agunan
 - (b) Bunga kredit yang harus dibayar relatif murah dibanding dari sumber yang lain

- (c) Jika terjadi kegagalan tanaman/produksi, petani tidak perlu khawatir harus mengembalikan kredit.
- (f) Terhadap rencana kerjasama pemasaran produk, mereka menganggap akan sangat bermanfaat, karena:
- (a) Pada saat harga anjlok di bawah HPP, BUMP menjamin siap membelinya, minimal pada tingkat harga HPP.
 - (b) Pada saat harga pasar berada di atas HPP, petani tidak akan dirugikan, karena BUMP sanggup membelinya sesuai dengan harga pasar.
 - (c) Petani lebih diuntungkan dibanding sistem tebasan, karena dapat menjualnya berdasarkan produk riil, bukan taksiran produk pada saat masih belum dipanen.
- (g) Terhadap rencana pengembangan kegiatan pertanian terpadu yang diintegrasikan dengan peternakan, serta pembuatan pupuk dan pestisida organik, kegiatan tersebut akan memberikan tambahan kesempatan kerja, tambahan penghasilan keluarga, dan percepatan pengembangan pertanian organik.

(5). *Harapan Pengurus GAPOKTAN terhadap pengembangan BUMP*

Pengurus gapoktan memiliki berbagai harapan terkait pengembangan BUMP, diantaranya:

- (a) BUMP perlu semakin memperluas sosialisasi, yang dilengkapi dengan rincian informasi yang dapat memotivasi kesediaan petani untuk diajak bekerjasama dengan BUMP.

“Sehubungan dengan adanya sosialisasi pola kemitraan agribisnis dengan PT. BUMP dengan Gapoktan se- Kabupaten Sukoharjo, maka saya mohon kepada BUMP untuk memperluas wilayah sosialisasi hingga pada tingkat kecamatan (Srd, Gapoktan Dadi Makmur, hasil wawancara tanggal 23 April 2011)

- (b) BUMP diharapkan tetap menjaga komitmennya, untuk lebih mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tidak terjebak kepada nafsu memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.
- (c) BUMP perlu memperluas kegiatan pemberdayaannya, baik *on-farm*, *off-farm*, maupun *non-farm*.

b) Manfaat bagi Mitra-kerja BUMP

Salahsatu mitra kerja yang penting bagi BUMP adalah RMU (*Rice Mill Unit*). Berdasarkan hasil FGD dengan pengelola RMU diperoleh berbagai respon sebagai berikut:

(1). Respon Pengelola RMU terhadap konsep BUMP

Keberadaan BUMP yang antara lain bergerak di bidang pembelian gabah dan pemasaran beras, pada awalnya dinilai sebagai *pesaing* pengelola RMU, yang pada umumnya merupakan Pengusaha Mikro dan Pengusaha Kecil. Tetapi, setelah memperoleh penjelasan bahwa kehadiran BUMP bukan sebagai pesaing, tetapi kehadirannya justru bersedia menjalin kontrak kerjasama dengan memberikan uang muka berdasarkan volume dan harga-kontrak yang disepakati setiap minggu, mereka menyambutnya dengan baik. Apalagi, setelah lebih dalam mengetahui bahwa BUMP ingin bekerjasama

dengan pengelola RMU untuk membantu dan memberdayakan petani/Gapoktan, mereka semakin antusias untuk menjalin kemitraan dengan BUMP.

(2). Respon Pengelola RMU terhadap pendiri BUMP

Pengelola RMU memberikan respon positif terhadap pendiri BUMP. Hal ini disebabkan karena:

- (a) Pensiunan Kepala Dinas Pertanian, sudah dikenal karakter dan kinerjanya, utamanya yang berkaitan dengan perijinan RMU dan pengawasan/pembinaan RMU (khususnya pengelola LUEP).
- (b) Ketua Gapoktan yang sudah dikenal cukup lama, baik sebagai sesama penerima sekaligus sebagai Koordinator Pengelola Pinjaman LUEP di Kabupaten Sukoharjo.
- (c) Akademisi, seorang dosen UNS yang berkompeten dibidang penyuluhan
- (d) Pelaku Bisnis, yang selain kemudian diketahui telah memiliki pengalaman bekerjasama dengan BULOG serta sekaligus juga Ketua Forum Lembaga Perekonomian dan Lembaga Pengembangan Pertanian Solo Raya pada lembaga swadaya masyarakat yang berkantor pusat di Jakarta.

(3). Respon Pengelola RMU terhadap kegiatan BUMP

Pengelola RMU menganggap bahwa keberadaan BUMP sebagai mitrakerja bisnis, yang sekaligus juga lembaga pemberdayaan masyarakat, kegiatan BUMP yang antara lain bergerak di bidang pembelian gabah dan

pemasaran beras, direspon baik oleh para pengelola RMU. Hal ini, disebabkan karena BUMP dalam melaksanakan kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip yang profesional, dalam bentuk:

- (a) Bermitra berdasarkan kontrak tertulis yang sebelumnya didiskusikan bersama secara partisipatif, atas dasar pertimbangan bisnis yang rasional.
- (b) Dalam kontrak, tercantum dengan jelas tentang: jumlah/volume barang, spesifik mutu produk, harga yang disepakati, serta penyelesaian perselisihan yang lebih mengutamakan musyawarah secara kekeluargaan.
- (c) Kontrak dibuat/diperbarui setiap minggu, hal ini untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi.

Sebagian besar pengelola RMU merasakan bahwa bermitra dengan BUMP memberikan efek yang positif. Meskipun demikian, dalam praktek, banyak pula pengelola RMU yang terpaksa menghentikan atau tidak mampu melanjutkan kontrak kerjasamanya dengan BUMP, karena untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disepakati, ternyata juga tidak mudah dipenuhi, sebagai akibat fluktuasi suplai produk (luas panen dan mutu produk) serta akibat persaingan antar pembeli gabah petani, utamanya menghadapi serbuan pedagang dari luar daerah.

(4). Respon Pengelola RMU terhadap manfaat BUMP

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh pengelola RMU dari kegiatan yang dilakukan oleh BUMP adalah:

- (a) Pengelola RMU memperoleh kepastian volume pemasaran dan harga produk berdasarkan kontrak yang disepakati

- (b) Pengelola memperoleh pinjaman modal untuk pembayaran uangmuka dalam pembelian gabah
- (c) Sistem pembayaran yang menarik sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak.
- (d) Membaiknya kepercayaan pelanggan yang sekaligus berdampak bertambahnya jumlah pelanggan yang menjual produknya kepada RMU yang telah menjalin kerjasama dengan BUMP.
- (e) Pengelola RMU juga memperoleh manfaat pemberdayaan BUMP yang diberikan, berupa perbaikan manajemen, pengawasan mutu bahanbaku dan mutuproduk, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan yang digunakan.

(5). *Harapan Pengelola RMU terhadap pengembangan BUMP*

Kehadiran BUMP memberikan efek positif terhadap pengembangan RMU di Kabupaten Sukoharjo. Berbagai langkah kedepan untuk membangun sinergi dengan kelembagaan yang sudah ada sangat diharapkan. RMU memiliki berbagai harapan utamanya berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMP.

“Kami berharap dengan kehadiran BUMP di wilayah ini akan mendongkrak system perekonomian petani. Ke depan, kami mengharapkan BUMP dapat meningkatkan volume kontraknya. Kami juga berharap BUMP segera menjalin kerjasama kemitraan dengan petani/Gapoktan untuk menjamin pasokan produk (hasil panen), baik jumlah maupun mutu produknya. Harapan terakhir kami, agar BUMP meningkatkan kegiatan pemberdayaan pengelola RMU, dalam bentuk pelatihan, studi banding, perbaikan mesin dan peralatan yang lain, dan lainnya” (Myd, Bendosari).

c) Manfaat bagi kegiatan penyuluhan

BUMP dalam konsepnya akan mengembangkan kegiatan penyuluhan Swasta dan Penyuluhan Swadaya dalam bentuk:

- Untuk penyuluhan swasta, BUMP akan mengangkat 5 (lima) Supervisor untuk setiap 500 – 1.000 Ha yang menangani peberdayaan petani bidang:
(a) Budidaya tanaman, (b) Kesuburan lahan (pemupukan dan pengairan),
(c) perlindungan tanaman, (d) pasca-panen, dan (5) pendampingan sekolah-lapang.
- BUMP juga akan mengembangkan penyuluhan swadaya, yang terdiri dari: ketua kelompok (per 50 Ha), Ketua Regu (per 10 Ha), dan Estimator produksi (per 10 Ha).

Pengembangan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya diharapkan akan dapat mengatasi masalah keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak mungkin dapat dipenuhi dengan pengangkatan seorang penyuluh PNS untuk setiap Desa/Kelurahan. PPL sebagai mitra kerja BUMP sangat penting keberadaannya sebagai bagian upaya bersama menggerakkan petani dalam merubah perilakunya.

Terkait respon PPL terhadap BUMP yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dapat disajikan sebagai berikut:

(1). Respon PPL terhadap konsep BUMP

“Secara garis besar, ide pengembangan BUMP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengembangan KUD (Koperasi Unit Desa) yang pernah dilakukan sejak awal 1970-an. Sayangnya, dalam perjalanannya, KUD sebagian besar tidak berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Di samping itu, kelebihan BUMP adalah korporasi yaitu badan usaha yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga mestinya bisa mengembangkan diri” (Sbd, Penyuluh pendamping Bendosari)

KUD yang telah berkembang semenjak 1970-an memiliki berbagai kelemahan, antara lain:

- (a) Lebih terfokus pada penyaluran sarana produksi
- (b) Tidak berhasil menjamin pemasaran gabah, utamanya dalam melakukan pembelian gabah pada saat harga merosot
- (c) Tidak berhasil menjalin kemitraan dengan DOLOG/BULOG secara berkelanjutan
- (d) Hanya terfokus pada kegiatan bisnis, sedang pemberdayaan petani hanya dilakukan oleh penyuluh (PPL).

BUMP sebagai lembaga baru yang memiliki bentuk yang berbeda, yaitu korporasi diharapkan akan:

- (a) Lebih mudah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha/Perseroan lain (BUMN, BUMD, dan Swasta), dalam pengembangan kegiatan *on-farm*, *off-farm*, maupun *non-farm*.
- (b) Lebih mampu membangun profesionalisme karyawan, dibanding kelompok/koperasi
- (c) Lebih mudah meleverage permodalan

- (d) Lebih mampu membangun kemitraan bisnis dalam pemanfaatan dana CSR/TJSL (*corporate social responsibility*/tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan) dari mitrakerja BUMP

(2). *Respon PPL terhadap pendiri BUMP*

Penyuluh Pertanian Lapangan atau Tenaga Harian Lepas (THL) juga memberikan respon positif kepada para pendiri BUMP, hal ini disebabkan karena beberapa hal:

- (a) Pensiunan Kepala Dinas Pertanian, adalah mantan atasannya, yang sudah dikenal karakter dan kinerjanya, utamanya yang berkaitan dengan pembinaan Kelompok tani/Gapoktan serta kelancaran pengadaan dan distribusi sarana produksi, alat/mesin pertanian, pengawasan budidaya tanaman, perlindungan tanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman yang lain, maupun hal-hal yang berkaitan dengan penanganan panen, pasca panen, dan pemasaran hasil.
- (b) Ketua Gapoktan yang sudah dikenal cukup lama, baik sebagai penerima sekaligus sebagai Koordinator Pengelola Pinjaman LUEP di Kabupaten Sukoharjo.
- (c) Akademisi, yang sudah diketahui adalah mantan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) sekaligus Dosen/pakar penyuluhan pertanian/pemberdayaan masyarakat UNS Solo.
- (d) Pelaku Bisnis, yang selain kemudian diketahui telah memiliki pengalaman bekerjasama dengan BULOG serta Pimpinan Ketua Forum Lembaga

Perekonomian dan Lembaga Pengembangan Pertanian Solo Raya pada lembaga swadaya masyarakat yang berkantor pusat di Jakarta

(3). Respon PPL terhadap kegiatan BUMP

Aktifitas BUMP selama ini baru terbatas pada pembelian gabah/pemasaran beras, tetapi rencana BUMP untuk menyalurkan paket kredit sarana produksi dengan sistem bayar panen (YARNEN) yang disertai dengan jaminan Asuransi Kredit, pengembangan Demplot/kelompok tani, pendampingan/sekolah lapang, dan kemitraan pemasaran produk jelas merupakan kegiatan-kegiatan yang akan sangat bermanfaat bagi petani. Komitmen BUMP yang di samping melakukan kegiatan bisnis, sekaligus juga melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang baik di tengah-tengah semakin menyusutnya jumlah penyuluh PNS yang sudah memasuki masa pensiun. Langkah BUMP yang merencanakan akan mengangkat 5 (lima) penyuluh swadaya/500-1.000 ha, merupakan peluang bagi THL yang belum jelas nasibnya di masa depan.

(4). Respon PPL terhadap manfaat BUMP

Kegiatan pembelian gabah dengan sistem bayar tunai, sangat bermanfaat bagi petani, karena petani yang menjual produknya dengan sistem tebasan, tidak selalu dibayar tunai. Di samping itu, penyaluran kredit usahatani yang disertai penyelenggaraan demplot dan pendampingan/ sekolah lapang, akan menjamin perbaikan mutu intensifikasi yang pada gilirannya

akan menjamin perbaikan jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, serta perbaikan penerimaan dari penjualan produknya. Rencana pengembangan usahatani terpadu (pertanian, peternakan, pembuatan pupuk dan pestisida organik) akan mempercepat pengembangan pertanian organik, yang tidak saja memperbaiki mutu dan produktivitas lahan, perbaikan mutu produk dan pendapatan petani, sekaligus juga akan mengurangi ketergantungan dan biaya sarana produksi, serta perluasan kesempatan kerja di perdesaan dan mengangkat citra agribisnis sebagai lapangan kerja yang menarik bagi generasi muda.

(5). *Harapan PPL terhadap pengembangan BUMP*

Bertolak dari respon PPL terhadap BUMP seperti yang disampaikan dalam butir (3) dan (4) di atas, diharapkan agar semakin intensif melakukan sosialisasi kepada petani, DPRD, pemerintah, dan para pihak lainnya.

“Kami berharap agar BUMP semakin intensif melakukan sosialisasi kepada Kelompok tani/Gapoktan, pengelola RMU tentang keberadaan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Selain itu, BUMP juga perlu menyampaikan keberadaan dan rencana kegiatannya kepada jajaran birokrasi (eksekutif dan DPRD) untuk memperoleh dukungan politik dan kebijakan. Harapan kami yang sangat penting adalah terkait komitmen BUMP untuk menjadikan lembaga ini sebagai *hibrid* lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dan tidak diingkari. Harapan terakhir kami, BUMP perlu segera merealisasikan dan mengembangkan gagasan dan rencana kerjanya menjadi kegiatan riil, yang sangat ditunggu oleh petani (kelompok tani/Gapoktan) pada umumnya” (Twd, Penyuluh Pendamping Grogol).

(6). *Harapan Peran Pemangku Kepentingan terhadap BUMP*

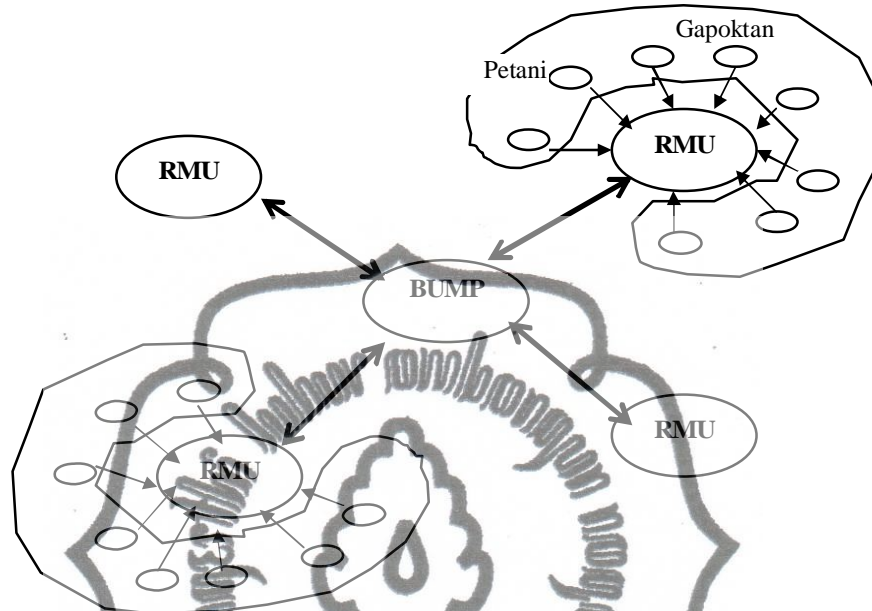
Pemangku kepentingan berharap dengan hadirnya BUMP berdampak semakin luasnya cakupan BUMP dalam memfasilitasi kegiatan usaha tani. Kegiatan usaha pertanian sangat banyak, mulai dari subsistem hulu sampai subsistem hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi sampai dengan pemasaran dan pengolahan produk. BUMP diharapkan mampu menjalankan perannya pada berbagai kegiatan tersebut. Selain kegiatan utama, usahatani tanaman pangan, juga terbuka peluang untuk melaksanakan diversifikasi usahatani karena belum banyak petani menjalankannya.

Tabel 6.7. Kegiatan BUMP yang sudah berjalan dan Harapan Pemangku Kepentingan

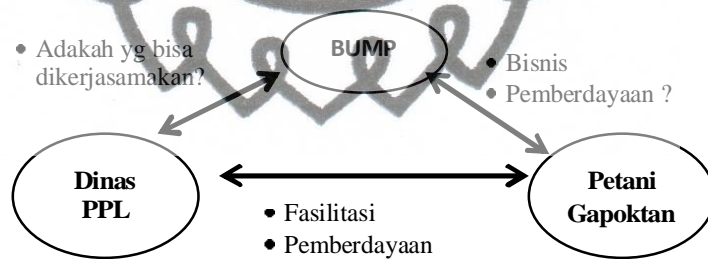
KEGIATAN	YANG SUDAH JALAN	HARAPAN
Penyediaan sarana produksi		
Benih	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia benih di toko/pengecer • Benih berkualitas 	BUMP bisa berperan sebagai penghubung dengan pihak-pihak terkait
Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan didasarkan RDKK • Jenis, sebagian besar dari pabrikan (N,P,K) sedang sendiri (organik) masih sedikit (yg punya ternak) • Sudah tersedia di distributor 	BUMP bisa berperan sebagai penghubung dengan pihak-pihak terkait
Modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau panen bagus, modal sendiri • Kalau meminjam dari BRI • Selama ini sudah ada fasilitasi modal dr PUAP 	BUMP bisa berperan sebagai penghubung dengan pihak-pihak terkait
Produksi (on-farm)		

KEGIATAN	YANG SUDAH JALAN	HARAPAN
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Tanam serempak, permasalahan traktor antri • Pada umumnya air cukup • Kalau sulit air, pakai diesel • Pemeliharaan: ada hama wereng sehingga gagal panen di MT II; secara perorangan petani sudah menyemprot, dari dinas ada bantuan stimulan, gerakan penyemprotan; Ada demplot; pemanenan sendiri dengan biaya Rp 300 ribu/2500 m lahan. 	
Pemasaran produk	<ul style="list-style-type: none"> • Produk dibawa pulang bila lahan sempit (untuk sendiri) • Tebasan banyak dipilih karena: praktis, butuh uang segera, atau tidak punya sarana seperti lantai jemur • Sudah dilaksanakan kerjasama BUMP dengan RMU 	BUMP perlu lebih meningkatkan volume usahanya dalam membeli produk (padi) yang dihasilkan petani
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada SLPTT sebagai sarana pembelajaran luas 25 ha untuk 1 kelompok; padi non-hibrida; laboratorium 1 hektar; ada fasilitas pupuk • Ada demplot BUMP 	Bagaimana pengembangan ke depan demplot oleh BUMP?

BUMP juga diharapkan mampu menjadi media penghubung, BUMP diharapkan dapat berperan sebagai penghubung dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan: penyediaan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran.



Gambar 6.3. Pola Hubungan BUMP dengan RMU



Gambar 6.4 Pola Hubungan Dinas dan Gapoktan

2) Manfaat bagi pengembangan BUMP di luar Sukoharjo

BUMP juga direspon baik di beberapa kabupaten dan propinsi lain di luar Kabupaten Sukoharjo, salah satunya di Propinsi Banten. Selain pemerintah, BUMP juga direspon baik oleh salah satu organisasi keagamaan

terbesar di Indonesia, yaitu melalui salah satu kelembagaannya di tingkat Pengurus Besar maupun ditingkat Pengurus Cabang Kabupaten melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU). Bahkan LPPNU-Kabupaten Wonogiri telah memiliki rencana sosialisasi untuk mengembangkan BUMP di seluruh Indonesia.

BUMP juga direspon baik oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDM) bekerjasama dengan world bank mengembangkan program Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP)/*Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI)*.

a) Respon Pemerintah Propinsi Banten

Propinsi Banten merespon baik tentang ide pengembangan BUMP. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya workshop Pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) pada tanggal 29 Juli 2011, yang diselenggarakan di Hotel Ratu Bidakara Serang dengan tema "*Dengan Pemberdayaan Petani melalui BUMP, Kita Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial*". Tujuan workshop tersebut adalah untuk menyamakan persepsi tentang model Pengembangan BUMP di kalangan Pelaku Agribisnis dan stakeholder/pemangku kepentingan agribisnis tanaman pangan yang lain, agar mekanisme dan implementasinya di Provinsi Banten sesuai dengan yang diharapkan. Memperhatikan arahan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Banten, pemaparan para narasumber, serta hasil-hasil

diskusi, dapat dirumuskan hasil Workshop Pengembangan BUMP di Provinsi Banten sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Workshop ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan PT.Vitafarm Indonesia, sebagai aksi nyata pemberdayaan petani dan kelembagaannya, dengan tidak melupakan akar budaya daerah/kearifan lokal seperti cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) yang ada. Karakteristik inilah yang nanti akan membedakan dari sisi konsep dan manajemen.
- (2) Mengingat bahwa aspek penguatan keorganisasian/kelembagaan ekonomi petani di Banten relatif masih belum tergarap dengan baik, maka penanganan kelembagaan selama ini yang hanya sebatas pada tujuan pertumbuhan produksi pangan harus diiringi dengan peningkatan manajemen kelembagaan, peningkatan nilai tambah serta jaminan pasar yang mampu mengedepankan peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani yang keberlanjutan.
- (3) Provinsi Banten memiliki potensi kuat, khususnya di sub sektor tanaman pangan yang diyakini akan mampu mencapai keinginan atau cita-cita kesejahteraan petani dan kegairahan pertumbuhan ekonomi perdesaan.
- (4) Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsep dan model Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang dikenalkan, menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah bagi keberdayaan ekonomi petani dan masyarakat perdesaan sekarang ini.

- (5) BUMP merupakan inovasi kelembagaan untuk merajut ulang hubungan sinergis antara lembaga penelitian (perguruan tinggi) dengan petani & pelaku agribisnis yang lain, dalam bentuk pengembangan konsep, penyelenggaraan Riset-aksi Partisipatif, Demplot, Pelatihan, dan Kemitraan agribisnis (*on-farm* dan *off-farm*) dengan:
- (a) Produsen sarana produksi,
 - (b) Lembaga pemasaran (pengelola RMU),
 - (c) Lembaga pembiayaan, kredit usahatani dan
 - (d) Lembaga asuransi.
- (6) BUMP adalah korporasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, diantaranya perseroan terbatas (PT) yang didirikan dan sahamnya (diharapkan) dimiliki oleh masyarakat petani, merupakan **hibrid antara lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan masyarakat (petani)** yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, tetapi lebih mengutamakan pemberdayaan petani melalui kemitraan yang dibangun dengan lembaga pembiayaan dan penjaminan, produsen/penyalur/pegecer sarana produksi pertanian, pendampingan/penyuluhan kepada pelaku usahatani, serta pengolahan dan pemasaran produk pertanian.
- (7) BUMP sebagai **hibrid antara lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan masyarakat (petani)** bertujuan untuk mewujudkan usahatani yang semakin maju, komersial, profesional, dan berbasis pada

budaya lokal agar mampu memiliki posisi tawar yang kuat dalam menjalin kemitraan yang sinergis dengan pelaku agribisnis yang lain.

- (8) Dalam operasionalisasinya, BUMP berperilaku berotak kapitalis dalam berbisnis, tetapi berjiwa sosialis untuk memberdayakan masyarakat (petani) sehingga di masa depan dapat diandalkan sebagai basis lembaga perekonomian perdesaan yang kuat
- (9) Berbeda dengan KUD yang hanya merupakan salah satu unsur "Catur Sarana Unit Desa", BUMP melaksanakan ke-empat fungsi Sarana Unit Desa (penyuluhan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran produk) secara simultan melalui pengembangan kemitraan usaha dengan semua pelaku agribisnis yang lain,
- (10) Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai inovasi kelembagaan, akan menjalankan perannya untuk menjaga kepastian di hulu (pembiayaan dan penyediaan sarana produksi), kepastian petani memperoleh inovasi teknologi dan pendampingan/penyuluhan dalam proses budidaya dan berusaha, serta di hilir **menjamin pemasaran hasil** pada tingkat harga yang layak, yang memberikan keuntungan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan keluarganya,
- (11) Pengembangan BUMP diyakini akan memberikan manfaat-ganda berupa:
 - (a) Peningkatan produksi dan pendapatan petani sebagai pelaku utama usahatani

- (b) Peningkatan pendapatan bagi pelaku agribisnis yang menjalin kemitraan (on-farm.off-farm dan non-farm) dengan BUMP
 - (c) Perluasan kesempatan kerja bagi pencari-kerja terdidik (sarjana baru) sebagai pengelola BUMP, superbisor/fasilitator, pengelola RMU, estimator produksi, ketua-kelompok dan ketua-regu, dan lainnya
 - (d) Pengembangan penyuluh-swadaya yang handal dan profesional
 - (e) Menjamin peningkatan produksi yang berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, serta ketahanan dan stabilitas nasional demi keberlangsungan pembangunan nasional
- (12) Pengembangan BUMP bukanlah pesaing program BP3K, melainkan pelengkap (komplementer) pelaksanaan BP3K yang akan menjamin keberhasilan pencapaian peningkatan produksi, dan bahkan mampu meningkatkan pendapatan petani.
- (13) Pengembangan BUMP merupakan keterpaduan yang sinergis antara lembaga penyuluhan pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian dan Pos Penyuluhan Desa, dengan lembaga ekonomi petani dalam bentuk PUAP dan LPMD melalui penguatan kelompok-tani dan Gapoktan
- (14) Pengembangan BUMP memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang mencakup:
- (a) Komitmen keberpihakan kepada petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang harus memperoleh perlindungan dan pemberdayaan

- (b) Iklim usaha yang kondusif bagi kemitraan yang akan dibangun oleh BUMP dengan pelaku agribisnis yang lain (BUMN/BUMD dan Swasta)
 - (c) Kebijakan pengamanan harga pasca-panen bagi produk-produk pertanian, utamanya bagi komoditas pangan.
- (15) Pengembangan BUMP layak diakomodasikan oleh DPR yang sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

b) Respon Nahdlatul Ulama terhadap BUMP

Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada Tanggal 31 Januari 1926 sebagai ormas keagamaan yang berdiri diatas tiga tiang penyangga yaitu Nahdlatul Wathan yang berdiri pada tahun 1914, Nahdlatut Tujjar (1918) dan Tashwirul Afkar (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU.

Nahdlatul Wathan yang artinya kebangkitan bangsa atau tanah air merupakan organisasi pendidikan dan dakwah yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya manusia yang berwatak religius dan nasionalis. Sumber daya demikian dibutuhkan untuk kepentingan kekuasaan (seperti kebutuhan akan pejabat birokrasi) maupun kepentingan kemasyarakatan secara luas.

Nahdlatut Tujjar yang artinya kebangkitan para pedagang merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasi dan pengembangan

usaha kecil. Adien Jauharudin, seorang tokoh muda NU yang konsen dalam mengangkat kembali potensi-potensi NU dan pesantren menulis buku berjudul *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*. Dari buku itu setidaknya memberikan gambaran betapa pentingnya keberadaan Nahdhatut Tujjar bagi kelahiran NU.

Sedangkan Tashwirul Afkar atau potret pemikiran adalah gerakan pemikiran yang berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, NU sebenarnya bukan gerakan keagamaan dalam arti yang sempit, tetapi juga gerakan ekonomi, pemikiran dan pendidikan yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Orientasi demikian bisa terus dijaga sampai saat ini dengan berbagai bentuk kebijakan yang mungkin belum terkonsolidasi dengan baik (Fuadi, 2009).

NU dengan ketiga pilar penting tersebut memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya perlu melakukan gerakan ekonomi bagi umatnya yang mayoritas adalah kelompok petani dan nelayan. Gerakan kesejahteraan umat tersebut sebagai bagian mewujudkan pilar Nahdlatut Tujjar.

NU sebagai lembaga keagamaan dan sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pilar tersebut menyambut baik adanya BUMS (Badan Usaha Milik Petani). Hal ini dibuktikan dengan adanya MoU antara FACILITATOR dengan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdatul Ulama (LPPNU)

Kabupaten Wonogiri pada tanggal 29 April 2011 untuk mengembangkan BUMP di seluruh Indonesia.

c) Respon Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) terhadap BUMP

Konsep dan implementasi BUMP, telah mendapat respon dari BPSDMP sejak launching kegiatan pada tanggal 11 Maret 2009, yang ditandai oleh penandatanganan prasasti pendirian BUMP oleh Kepala BPSDMP. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMP tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kelembagaan bisnis petani.

Apresiasi BPSDMP tersebut berlanjut dengan permintaan kepada Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS sebagai nara sumber oleh BPSDMP untuk menyampaikan konsep BUMP di tingkat nasional antara lain di Surakarta, Bandung, Batu Malang, Cirebon, Yogyakarta, dan Ciawi-Bogor.

Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai wujud komitmennya terhadap pengembangan BUMP, mulai tahun 2007 melaksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP)/*Farmer Empowerment through Agricultural Technologi and Information* (FEATI). Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) dalam hal ini bertindak sebagai *Executing Agency* dan didukung oleh Badan Litbang Pertanian cq. Balai Besar Pengembangan Pengkajian Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin).

Program ini dirancang untuk mewujudkan sistem penelitian dan penyuluhan pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan petani dalam menghadapi perkembangan ekonomi global. Tujuannya adalah Memberdayakan petani dan organisasi petani dalam peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha.

Kementerian Pertanian melalui BPSDMP pada tahun 2011 telah melaksanakan evaluasi kinerja pengembangan usaha agribisnis kelompok pembelajaran FMA (*Farmer Managed extention Activities*)⁴, maka pada tahun 2011 telah ditetapkan 13 (tiga belas) kabupaten di 6 (enam) provinsi, sebagai percontohan pelaksanaan Peningkatan Skala FMA (*scaling up*), yaitu; Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur.

BPSDMP-P melalui program FEATI berupaya keras mencari formula kelembagaan petani yang akan meningkatkan kesejahteraan petani. BUMP sebagai inovasi kelembagaan pertanian menawarkan model kelembagaan yang berorientasi pada bisnis dan pemberdayaan, sehingga tujuan utamanya adalah petani yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Kesamaan sudut pandang dan tujuan ini mendorong FEATI untuk mengembangkan BUMP di beberapa

⁴ Salah satu metoda yang dikembangkan oleh FEATI dalam upaya mengembangkan kapasitas pelaku utama. Metode ini menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam metode FMA ini pelaku utama dan pelaku usaha mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada diri, usaha dan wilayahnya, merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka secara partisipatif dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

wilayah di Indonesia. Bukti dukungan tersebut, diwujudkan dengan mengangkat Konsultan Individu *District Agribusiness & Management/Organization Development Specialist* di 6 (enam) Propinsi, dimana masing-masing propinsi diangkat 1 (satu) orang konsultan. Harapannya, BUMP bisa terbentuk di 13 (tiga belas) Kabupaten di 6 Propinsi yang dipilih. Pengangkatan konsultan mempunyai tujuan pembinaan dan pendampingan, antara lain:

- (a) Memperkuat pemberdayaan keluarga petani dan organisasi petani
- (b) Memperkuat peningkatan aksesibilitas petani terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi dalam mengembangkan agribisnis dan kemitraan usaha; dan
- (c) Memperkuat peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pengembangan BUMP oleh BPSDM-P menunjukkan bahwa kelembagaan petani yang berbasis bisnis dan pemberdayaan menjadi model baru dalam mensejahterakan petani.

B. Pembahasan

1. BUMP Sebagai Inovasi Kelembagaan Pertanian

Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi sebagai: *ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru* oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Sedangkan Lionberger dan Gwin (1982) mengartikan inovasi tidak sekadar sebagai

sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, yakni *sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu*. Jadi, inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup: ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, pola pikir, atau gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan “baru”, tidak selalu berarti sesuatu yang baru diciptakan atau ditemukan, tetapi baru dalam arti belum pernah dikenal atau diterapkan pada sistem sosial penerima manfaatnya. Bahkan, inovasi dapat berupa kearifan lokal (*local wisdom*), atau *indigenous technology* yang sudah lama ditinggalkan dan baru digali kembali. Pengertian “baru” disini, mengandung makna bukan sekadar “baru diketahui” oleh pikiran (*cognitive*), akan tetapi juga baru karena belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat dalam arti sikap (*attitude*), dan juga baru dalam pengertian belum diterima belum dilaksanakan dan atau diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat.

Dengan demikian, pengertian inovasi dapat semakin diperluas menjadi (Mardikanto, 1988):

“Sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan dan atau diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan”.

Terkait dengan ragam inovasi, lebih lanjut Mardikanto (2009) mengemukakan adanya: inovasi teknologi, inovasi sosial, dan inovasi kelembagaan. Khusus tentang inovasi kelembagaan, Drajat (2009) mengartikan sebagai pengembangan aspek non teknis kegiatan agribisnis yang dapat mempermudah praktisi agribisnis terutama petani dalam menjalankan kegiatan agribisnisnya, dan/atau meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi kegiatan agribisnis yang dilakukan.

Menurut Dimiyati (2007), ada berbagai permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia antara lain:

- a. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
- b. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
- c. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

PERHEPI (2004) melihat beberapa kondisi sekaligus kendala yang dihadapi petani untuk mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, antara lain

- a. Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan asset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya;

- b. Produktivitas tenaga kerja yang relative rendah (*productive and remunerative employment*), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien;
- c. Perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan (*access to services*) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah;
- d. Kurangnya rasa percaya diri (*self reliances*), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.

Fenomena tersebut mendorong perlunya upaya yang serius dalam membangun kelembagaan ekonomi petani sehingga bisa meningkatkan posisi tawar petani. Menurut Akhmad (2007), posisi tawar petani akan meningkat apabila beberapa hal berikut dapat terwujud, yaitu:

- a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut *pertama* dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa

tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.

- b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
- c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaringan tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

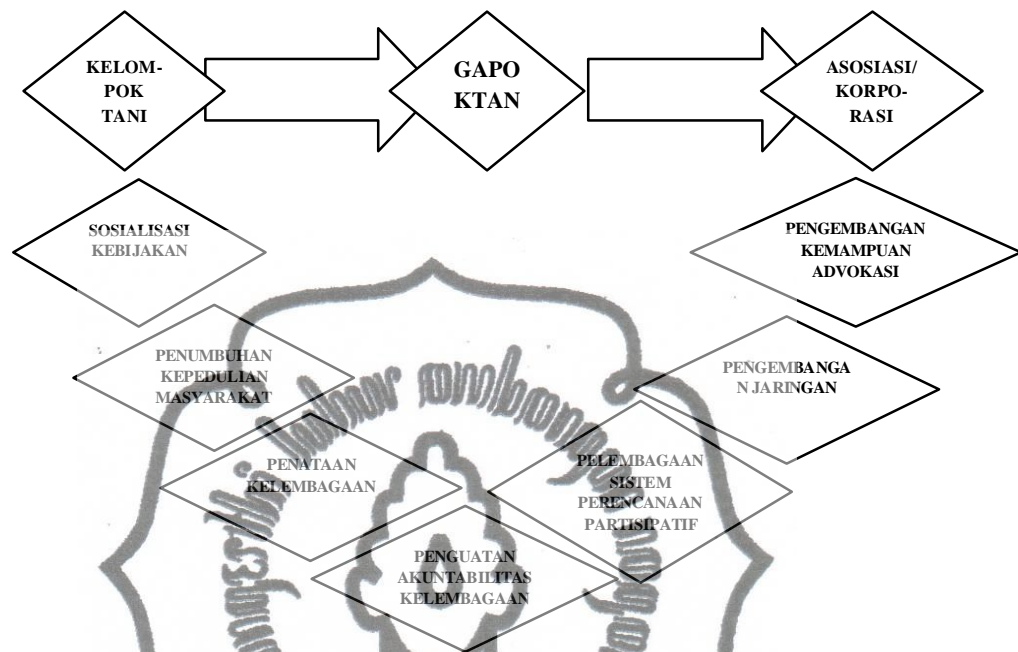
Berbagai konsep maupun kelembagaan ekonomi petani telah dikembangkan seperti: pengembangan SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan), KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis), Desa Cerdas Teknologi, ULP2 (Usaha Lepas Panen Pedesaan), Gerakan Kemitraan, Inkubator, Klinik Tani/Agribisnis, Asosiasi-asosiasi Petani, dan lainnya. Namun demikian, berbagai program tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan petani secara signifikan, bahkan tingkat keberlanjutannya masih dipertanyakan.

Pengembangan koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi nasional sebenarnya juga telah dilakukan melalui berbagai pembentukan kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD). Basis pembentukan KUD yang lebih bersifat *top down* belum bisa berjalan secara profesional. Munculnya Inpres No. 18 Tahun 1998, peran KUD semakin menurun karena salah satu fungsi distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Hadisapoetro (1973) juga pernah mengenalkan konsep **Catur Sarana Unit Desa** yang harus tersedia di setiap Kecamatan atau Wilayah Unit Desa (WILUD) dengan luasan sekitar 600-1.000 Ha (sawah), yang terdiri dari: (1) *Kios sarana produksi*, yang melaksanakan fungsi penyediaan sarana dan peralatan pertanian; (2) *Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)* yang melaksanakan fungsi pengujian dan penyuluhan; (3) *Bank Unit Desa*, yang melaksanakan fungsi perkreditan; dan (4) *Koperasi Unit Desa (KUD)* yang melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil. Konsep ini

mengadopsi teorinya Mosher terkait keterhubungan antar lembaga dalam pembangunan pertanian. Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa keempat lembaga tersebut tidak bisa berjalan sinergis sehingga terkesan catur sarana unit desa bersifat terpisah dan parsial. Akibatnya pengembangan kelembagaan pertanian tidak berjalan maksimal.

Upaya pengembangan kelembagaan pertanian masih menunjukkan berbagai kelemahan, sehingga perlu inovasi kelembagaan pembangunan pertanian. Beberapa ahli sosial ekonomi pertanian yang tergabung dengan PERHEPI (2004) menyadari bahwa model kelembagaan untuk merestrukturisasi pertanian dan pedesaan tidak hanya sebatas pada koperasi. Perlu upaya menemukan model-model kelembagaan petani mulai dari yang sederhana seperti kelompok usaha pertanian hingga ke korporasi petani (*corporate community*). Hal ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/kpts/ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani pada lampiran 1 mengenai Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani yang mengarahkan kelompok tani menjadi asosiasi atau korporasi (lihat gambar 6.5.).



Sumber: Peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/kpts/ot.160/4/2007

Gambar 6.5. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani

Dibanding dengan kelembagaan pertanian yang pernah dikembangkan dan sampai saat ini masih dijumpai dari hasil penelitian, keinovatifan BUMS dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

a. BUMS dan Catur Sarana Unit Desa

Hadisapoetro (1973) mengemukakan adanya empat kelembagaan yang harus tersedia dalam setiap Wilayah Unit Desa, yang disebut Catur Sarana Unit Desa, yaitu:

- 1) Penyuluh, yang melaksanakan fungsi pengujian dan penyuluhan
- 2) Kios Sarana Produksi, yang melakukan fungsi penyediaan sarana produksi pertanian

- 3) Bank, yang melaksanakan fungsi penyediaan modal/pembiayaan usahatani
- 4) Koperasi Unit Desa, yang melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil

BUMP sebagai lembaga ekonomi petani berbeda dengan Catur sarana Unit Desa tersebut, yaitu melaksanakan keempat fungsi tersebut secara simultan, yang dalam operasionalisasinya menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan agribisnis yang lain.

- 1) Peran BUMP untuk melakukan fungsi penyuluhan
Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, BUMP mengangkat lima *Penyuluh Swasta* yang terdiri dari:
 - a) Penyuluh spesialis budidaya tanaman
 - b) Penyuluh spesialis kesuburan lahan (pemupukan dan pengairan)
 - c) Penyuluh spesialis perlindungan tanaman
 - d) Penyuluh spesialis teknologi panen dan pasca-panen
 - e) Penyuluh spesialis fasilitasi sekolah-lapang

BUMP juga mengembangkan *Penyuluh Swadaya*, yaitu Ketua Kelompok untuk setiap hamparan sekitar 50 Ha (di setiap desa), dan Ketua Regu setiap hamparan sekitar 10 Ha (di setiap hamparan sawah).

- 2) Peran BUMP dalam penyediaan modal/pembiayaan usahatani
BUMP bekerjasama dengan lembaga keuangan (Bank dan Non-Bank) dan Asuransi (kredit dan atau produk) untuk menyediakan kredit usahatani bagi petani yang bermitra dengan BUMP.

3) Peran BUMP dalam penyediaan sarana produksi

BUMP bekerjasama dengan produsen dan atau penyalurnya, menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani, baik secara tunai maupun kredit YARNEN (dibayar setelah panen).

4) Peran BUMP dalam pengolahan dan pemasaran hasil

Aktifitas pembelian, pengolahan, dan pemasaran hasil, BUMP bekerjasama dengan pedagang-pengumpul dan atau pengelola RMU (*Rice Mill Unit*) melakukan kontrak pembelian berdasarkan kesepakatan harga yang diperbarui setiap dua minggu.

b. BUMP sebagai Lembaga Bisnis yang Profesional

Guharja (1993) mengartikan profesional sebagai ciri-ciri individu yang ahli dan terus mengembangkan keahliannya, serta memegang teguh etika profesinya⁵. Bisnis yang profesional dapat diartikan sebagai bisnis yang menunjukkan keberhasilannya secara berkelanjutan yang dilandasi oleh kompetensi atau keahlian tertentu, serta memegang teguh etika bisnisnya.

BUMP sebagai badan usaha yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diarahkan sebagai lembaga ekonomi petani yang lebih profesional dibanding Kelompok dan Koperasi.

a) Percepatan pengambilan keputusan

Berbeda dengan koperasi yang merupakan himpunan orang, perseroan yang merupakan himpunan modal, pemegang saham mayoritas lebih

⁵ Ujian Disertasi Totok Mardikanto di IPB Bogor tanggal 3 Januari 1993

mudah mengambil keputusan dalam rapat pemegang saham untuk menetapkan kebijakan bisnis.

b) Kemudahan menjalin kemitraan-bisnis

BUMP sebagai perseroan, lebih mudah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha yang lain (yang pada umumnya berbentuk perseroan) karena alasan-alasan:

- Dinilai lebih profesional dalam mengelola kegiatan usahanya
- Kesamaan status legalitas dalam membuat kemitraan dan menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi,
- Kesetaraan status dengan mitra-bisnisnya

c) Otonomi pengelolaan bisnis

Berbeda dengan koperasi yang selalu harus mengikuti dan atau diintervensi oleh (aparatus) instansi pemerintah yang pembinaanya, pengelolaan BUMP sebagai suatu perseroan lebih bebas/mandiri, terlepas dari intervensi pihak manapun.

d) Kemudahan *meleverage* modal

BUMP dengan kepemilikan modal yang ditempatkan di Bank, dan prospek bisnis yang dinyatakan dalam studi kelayakan maupun perencanaan bisnisnya, lebih mudah untuk *meleverage* modal/pembiayaan yang diperlukan.

c. BUMP Sebagai hibrid Lembaga Bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat

Pakpahan (2009) menyebut BUMP sebagai hibrid antara perseroan dan koperasi, artinya, bentuknya perseroan tetapi jiwanya koperasi. Sedangkan Mardikanto (2009) mengartikan BUMP sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, yaitu lembaga bisnis yang tidak semata-mata mementingkan keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pemberdayaan petani.

Perusahaan (perseroan) pada umumnya lebih mengutamakan tujuan memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan BUMP lebih mengutamakan fungsinya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (petani), baik yang terkait dengan: (1) kegiatan yang dilakukan, maupun (2) pemanfaatan keuntungan yang diperoleh. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan, BUMP melakukan pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Penyuluhan, pendampingan dan sekolah-lapang yang dilakukan oleh Penyuluh Swasta maupun Penyuluh Swadaya
- 2) Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) yang menjadi kewajiban BUMP
- 3) Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) yang menjadi kewajiban mitra-bisnis BUMP

BUMP memanfaatkan keuntungan dengan memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh (10%) untuk kegiatan pemberdayaan dan atau pembelian saham oleh petani (perorangan, kelompok, GAPOKTAN) yang menjadi mitra/usahanya.

d. BUMP Sebagai Lembaga Bisnis Berbasis Moral

Sejak lama telah terjadi perdebatan antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang terkait dengan moral ekonomi (Thompson, 1993 dalam Calhoun, 1994). Di Indonesia, sejak tahun 1980 telah diperdebatkan tentang Ekonomi Pancasila, yang oleh Mubyarto *et al* (1981) dirumuskan sebagai sistem ekonomi yang bermoral Pancasila dengan 5 (lima) platform, yaitu: moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Moral Agama

Dalam konteks religi bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa mengejar keuntungan diperbolehkan, namun demikian bahwa kemaslahatan umat manusia menjadi orientasi utama. Nahdhatul Ulama sebagai lembaga keagamaan berdiri di atas tiga tiang penyangga yaitu Nahdlatul Wathan yang berdiri pada tahun 1914, Nahdlatul Tujjar (1918) dan Tashwirul Afkar (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU.

Nahdlatul Wathan yang artinya kebangkitan bangsa atau tanah air merupakan organisasi pendidikan dan dakwah yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya manusia yang berwatak religius dan nasionalis. Sumber daya demikian dibutuhkan untuk kepentingan kekuasaan (seperti kebutuhan akan pejabat birokrasi) maupun kepentingan kemasyarakatan secara luas. NU dengan ketiga pilar penting tersebut memiliki tanggung jawab

yang besar terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya perlu melakukan gerakan ekonomi bagi umatnya yang mayoritas adalah kelompok petani dan nelayan. Gerakan kesejahteraan umat tersebut sebagai bagian mewujudkan pilar Nahdlatul Tujjar.

Selain dari sudut pandang Agama Islam, pada hakikatnya beberapa agama dan kepercayaan juga menganjurkan upaya pemberdayaan kepada umat. Dari sudut keimanan kristiani, diimani bahwa kehadiran Yesus kedunia adalah untuk melakukan fungsi pemberdayaan (Mardikanto, 2005), hal itu antara lain tertulis dalam Matius 25:45 yang berbunyi:

“Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku”

Lebih lanjut, dalam dan 1 Korintus, 10:31 disebutkan bahwa:

... , jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah

Dalam kehidupan masyarakat Hindu, juga terdapat ajaran *Tri Hita Karana*, yang mewajibkan keserasian hidup antar manusia, antara manusia dengan penciptanya, dan antara manusia dengan lingkungannya. Ini juga berarti bahwa dalam kehidupan komunitas Hindu mewajibkan perilaku, termasuk berbisnis, harus seantiasa dilandasi oleh keimanan.

Dalam masyarakat Buddha, terdapat *Dharma* atau perilaku hidup yang benar, yang dijadikan landasan hidup. Oleh karena itu, dewasa ini muncul gerakan *Engaged Buddhism* (EB) sebagai salah satu alternatif pemikiran buddhisme di zaman moderen ini. Kata ‘*engaged*’ yang berarti

'terlibat' menekankan bahwa pentingnya keterlibatan atau kepedulian umat Buddha terhadap isu-isu sosial, politik, dan kemasyarakatan. Istilah EB ini juga berarti bahwa perilaku hidup umat Buddha, harus senantiasa dilandasi oleh keimanannya. Dalam masyarakat Kong Hu Tzu, juga terdapat perilaku pemberdayaan yang berbasis keimanan. Bahkan ajaran Lao Tzu telah dijadikan semacam Credo pemberdayaan.

Mendasarkan diri dari berbagai pandangan pemberdayaan dalam konteks religi, menunjukkan bahwa bisnis yang berhasil harus senantiasa memberdayakan. Pemberdayaan adalah bagian dari upaya memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga dapat ditarik sebuah hipotesis awal bahwa bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dilandasi oleh keimanan.

BUMP sebagai kelembagaan yang tidak hanya mengejar kepentingan semata dianggap sebagai sebuah model kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi, yang dibuktikan dengan komitmen NU sebagai salah satu kelembagaan terbesar di Indonesia untuk mengembangkan BUMP sebagai gerakan ekonomi yang berbasis keimanan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengejar keuntungan semata tidak akan mencapai puncak keberhasilan karena mengesampingkan aspek manusia yang semestinya diperhatikan. BUMP sebagai lembaga bisnis yang berbasis pemberdayaan atau lembaga bisnis yang berbasis pada umat atau bisa juga disebut sebagai lembaga bisnis yang berbasis pada keimanan adalah salah satu kelembagaan yang patut untuk

dikembangkan sebagai inovasi kelembagaan di pedesaan. Orientasi utamanya tidak hanya bisnis tetapi juga kesejahteraan umat.

BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral, dapat dilihat pada:

- a) Fokus kegiatan yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat
- b) Pemanfaatan keuntungan
- c) Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility/CSR*)

2) Moral Kemerataan Sosial

Platform Kemerataan-sosial dari BUMP, dapat dilihat dari:

- a) Filosofi pembentukan BUMP yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
- b) Kepemilikan saham yang terbuka bagi seluruh warga masyarakat (petani), baik secara individual dan atau yang bergabung dalam kelompok-tani dan Gabungan Kelompok-tani (GAPOKTAN), yang bergabung dalam asosiasi, maupun yang telah membentuk Badan Usaha yang berbentuk Kelompok Usaha Bersama maupun Koperasi.
- c) BUMP menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan (10%) yang dibagikan kepada mitra-kerja (individu, kelompok-tani, GAPOKTAN, asosiasi, KUB, dan Koperasi).
- d) Pengelolaan program kegiatan tanggungjawab sosial (*Corporate social Responsibility*) baik yang dilakukan oleh BUMP maupun mitra-usaha BUMP.

3) Moral Nasionalisme Ekonomi

Platform Nasionalisme Ekonomi, dapat dilihat dari pembentukan dan kepemilikan saham BUMP yang terbuka bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan aliran apapun.

4) Moral Kerakyatan

Platform Kerakyatan dari BUMP, terlihat kepada keberpihakan BUMP kepada masyarakat (petani) yang merupakan pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan agribisnis yang sebagian besar rakyat perdesaan.

5) Moral Keadilan Sosial.

Platform keadilan sosial, terlihat pada pembagian deviden yang nberdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki, dan pemberian sebagian keuntungan kepada para-pihak yang telah menjalin kemitraan-usaha dengan BUMP.

e. BUMP dalam pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian Non-pemerintah

Undang Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tanggal 15 Nopember 2006 memberikan kebebasan dalam mengembangkan penyuluhan baik PNS, swasta, maupun swadaya.

BUMP sebagai lembaga yang berdiri atas inisiatif petani atau para pihak yang berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan petani merupakan kelembagaan penyuluhan yang masuk pada kategori penyuluh swasta maupun swadaya, sebagai berikut:

1) *Kebutuhan penyuluh profesional dalam pengembangan BUMP*

Operasionalisasi BUMP memerlukan lima Penyuluh Swasta, yang terdiri dari:

- a) Penyuluh spesialis budidaya tanaman, yang melakukan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi petani sejak pemilihan benih, penanaman, dan pemeliharaan tanaman sampai panen
- b) Penyuluh spesialis kesuburan lahan (pemupukan dan pengairan) yang melakukan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi petani terkait dengan pengolahan lahan, pemupukan, dan pengaturan pengairan sepanjang umur pertanaman.
- c) Penyuluh spesialis perlindungan tanaman, yang melakukan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi petani tentang perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu, secara preventif maupun kuratif, baik secara fisik, biologis dan atau kimiawi
- d) Penyuluh spesialis teknologi panen dan pasca-panen, yang melakukan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi petani terkait dengan penetapan saat panen, teknik panen, dan pengelolaan pasca-panen.

- e) Penyuluh spesialis fasilitasi sekolah-lapang, yang memfasilitasi pelaksanaan Sekolah-lapang sejak penyiapan lahan sampai dengan panen, yang berkaitan pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan, dan ketrampilan manajerial.

2) *Ragam tenaga penyuluh yang diperlukan*

BUMP akan memerlukan dan mengangkat/menetapkan: Penyuluh Swasta yang diangkat BUMP, dan Penyuluh Swadaya (Ketua Kelompok, Ketua Regu, dan Estimator Produksi).

3) *Pembiayaan Penyuluh*

BUMP bertanggungjawab untuk menyediakan biaya bagi:

- a) Gaji/upah kepada semua Penyuluh Swasta dan penyuluh Swadaya
- b) Kegiatan penyuluhan yang lain (penyelenggaraan Demplot, Karyawisata)

Sumber pembiayaan BUMP dapat diperoleh dari:

- a) Kontrak pembelian/kredit sarana produksi (benih, pupuk, pestisida)
- b) Kontrak pembelian/persewaan alat/mesin pertanian
- c) Kontrak pembelian produk
- d) Kontrak pengolahan dan pemasaran produk

2. Strategi Pengembangan BUMP ke Depan

BUMP mengalami berbagai dinamika dalam proses pengembangannya, oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu adanya

penyempurnaan model baik dari aspek pembentukan, pengelolaan, pola kelembagaan, kemitraan, maupun lingkup pemberdayaannya. Beberapa aspek tersebut akan diuraikan seperti di bawah berikut ini:

a. Pembentukan BUMS

1) Pendiri BUMS

Menurut konsepnya, BUMS merupakan badan usaha yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh petani. Tetapi, dalam praktek, tidak mudah menggerakkan petani untuk menyerahkan “uang” guna membangun kegiatan yang “belum jelas” manfaatnya. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sekelompok individu yang memiliki kompetensi dan kepedulian untuk mendirikan BUMS. Oleh sebab itu, pembentukan BUMS dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a) Pelibatan petani sebagai pemegang saham perseroan sejak awal pembentukan BUMS
- b) Pelibatan petani sebagai pemegang saham perseroan yang diwakili oleh lembaga petani (kelompok, GAPOKTAN) dan atau lembaga ekonomi petani (Koperasi dan Asosiasi).
- c) Pembentukan BUMS diawali oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kompetensi mengelola bisnis dan komitmen untuk memberdayakan petani yang kemudian menawarkan sahamnya kepada petani dan atau warga masyarakat perdesaan pada umumnya yang berminat

2) Modal Awal BUMP

Modal awal BUMP sepenuhnya berasal dari saham yang ditanamkan oleh para pendiri, yang selama periode tertentu (3-5 tahun) menjadi pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini petani belum dilibatkan sebagai pemegang saham sejak awal pembentukan. Kepemilikan saham oleh petani dapat dilakukan secara bertahap, setelah mereka merasa manfaat BUMP melalui kemitraan yang dilakukannya. Untuk mempercepat kepemilikan saham oleh petani pemerintah dapat memberikan hibah kepada kelompok-tani/GAPOKTAN untuk membeli saham BUMP. Kepemilikan saham mayoritas BUMP oleh pendiri, bukan dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan petani, tetapi dalam rangka penyiapan SDM untuk benar-benar mampu mengelola BUMP secara profesional.

3) Pembuatan Akte Notaris

Pembuatan akte notaris menjadi hal mutlak dalam pendirian BUMP. Terkait dengan pembuatan Akte Notaris, harus dijaga agar saham mayoritas, secara bersama-sama tetap dimiliki para pendiri, karena kepemilikan saham mayoritas oleh (sekelompok) orang yang tidak memiliki kompetensi dan keberpihakaan kepada pemberdayaan masyarakat (petani) dikhawatirkan akan menyebabkan kegagalan BUMP. Selain itu, dalam Akte Notaris harus secara eksplisit disebutkan tentang:

- a) Pengutamakan beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harus lebih diutamakan dibanding kegiatan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.
- b) Pengalokasian sebagian keuntungan untuk dikembalikan kepada petani (kelompok-tani/GAPOKTAN) yang menjadi mitra-kerjanya, baik dalam bentuk pembelian saham, atau pembiayaan program pemberdayaan masyarakat (petani).

b. Pengelolaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

1) Bentuk Badan Usaha

BUMP diharapkan tetap bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan hibrid dari lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pilihan bentuk perseroan ini, dilandasi pemikiran agar:

- a) Lebih dapat diandalkan untuk mengembangkan profesionalitas SDM pengelola, dan meningkatkan citra BUMP di mata mitra-kerjanya, dibanding bentuk kelompok, GAPOKTAN, atau Koperasi.
- b) Lebih mudah menjalin kemitraan bisnis dengan pelaku agribisnis yang lain, yang pada umumnya berbentuk perseroan (PT).
- c) Lebih mampu *meleverage* modal
- d) Secara yuridis dituntut untuk melakukan kegiatan CSR bagi masyarakat (petani, kelompok-tani, dan GAPOKTAN).

- e) Dapat memanfaatkan program CSR yang (akan) dilakukan oleh mitra-bisnisnya, untuk pengembangan BUMP dan pemberdayaan petani penerima manfaat layanan BUMP.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BUMP bersifat dinamis, artinya, seiring dengan perkembangan ragam dan volume kegiatannya, struktur organisasi BUMP akan semakin berkembang pula untuk memenuhi kebutuhan organisasinya

- a) Pada tahap awal, cukup terdiri dari seorang Komisaris, Direktur Utama, dan seorang Direktur.
- b) Dalam perkembangannya, Komisaris dapat dikembangkan menjadi Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan beberapa Komisaris. Seiring dengan itu, Dewan Direksi dapat dikembangkan menjadi seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur (Direktur Operasi, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, dan lainnya)
- c) Selanjutnya, setiap Direktur dapat dilengkapi dengan beberapa Manajer
- d) Pada akhirnya, BUMP dapat mengembangkannya sebagai suatu kotporat atau Holding Company yang memiliki beberapa Divisi atau Anak Perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris, Dewan Direksi yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa Manajer.

3) Lingkup Kegiatan

BUMP PT. GFS di Sukoharjo masih memiliki keterbatasan pada lingkup usaha, yaitu pada area pemasaran produk pertanian dan sedikit menyentuh *on-farm*. Setiap unit agribisnis, pada umumnya memiliki kendala utama berupa: pembiayaan/permodalan, penyediaan input, dan peralatan, bimbingan teknis berproduksi, pemasaran produk, dan dukungan kebijakan. Oleh sebab itu, pada tahap awal, BUMP harus memfokuskan pada kelima kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh petani di wilayah kerjanya, seperti:

- a) Pembuatan benih, pupuk-organik
- b) Penyaluran pupuk bersubsidi
- c) Persewaan alat/mesin pertanian
- d) Kerjasama budidaya dan pemasaran produk dengan sistem syari'ah
- e) Pemasaran produk dengan sistim resi-gudang

BUMP Pada perkembangannya mulai melebarkan sayapnya untuk menggarap transportasi dan pergudangan. Tahap kemudian, mengembangkan usaha Kredit simpan-pinjam dan toko sembako; untuk kemudian pada akhirnya perlu mengembangkan lembaga pelatihan dan pengujian-lokal. Oleh sebab itu, jika pada tahap awal BUMP hanya memfokuskan kegiatannya pada budidaya dan pemasaran produk, pada akhirnya akan berkembang sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang terintegrasi, bahkan sampai menempatkan dirinya sebagai Pusat Layanan Pengembangan Usaha yang mencakup:

- a) Kajian dan Studi Kelayakan Usaha,
- b) Fasilitasi Pembiayaan,
- c) Bimbingan Teknis Produksi,
- d) Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran Produk,
- e) Konsultasi Hukum dan Perpajakan,
- f) Pengembangan Kelembagaan, dan lainnya.

4) Organisasi Kerjasama Operasi

Upaya pengembangan jalinan kerjasama kemitraaan, BUMP membentuk Organisasi Kerjasama Operasi (KSO), yang terdiri Pengawas, Koordinator, Manajer Operasional dan Manajer Keuangan, dan beberapa supervisor.

5) Wilayah Kerja BUMP

Wilayah kerja BUMP sebaiknya tidak terlalu luas, tetapi cukup memenuhi skala ekonomi (*economic of scale*) agar mampu mandiri dalam arti mampu mencukupi biaya pengelolaannya dan memberikan deviden (keuntungan) yang menarik (lebih banyak dibanding bunga deposito) bagi pemegang sahamnya, serta sisa keuntungan untuk investasi dan atau pengembangan usahanya. Mengacu kepada konsep Wilayah Unit Desa, luas wilayah-kerja setiap BUMP sekitar 500–1.000 Ha atau seluas satu kecamatan. Meskipun demikian, sebelum setiap kecamatan mampu membentuk satu

BUMP, pada tahap awal dapat ditetapkan per Kabupaten yang di kemudian hari dapat dikembangkan menjadi suatu **Holding Company**.

Penetapan wilayah kerja per Kecamatan (500 – 1.000 Ha.) tersebut, antara lain dengan mempertimbangkan:

- a) Kesesuaiannya dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan.
- b) Kesesuaiannya dengan kelembagaan penyuluhan pertanian yang menurut UU No. 16 Tahun 2006 ditetapkan bahwa dalam setiap kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian dan di setiap Desa dibentuk Pos Penyuluhan Pertanian.
- c) Prakiraan pendapatan BUMP untuk membiayai:
 - (1) Seorang Manajer BUMP
 - (2) Lima orang supervisor, yang terdiri dari:
 - Seorang Supervisor budidaya tanaman
 - Seorang Supervisor kegiatan pemupukan dan pengairan
 - Seorang Supervisor kegiatan perlindungan tanaman
 - Seorang Supervisor kegiatan panen, pasca-panen dan pemasaran hasil
 - Seorang supervisor kegiatan sekolah-lapang
 - (3) Seorang Ketua Kelompok tani per 50 Ha atau sedikitnya seorang Ketua Kelompok/desa.
 - (4) Seorang Kepala Regu per 10 Ha atau sedikitnya seorang/dusun.

c. Ketenagaan

BUMP sebagai sebuah perseroan harus dikelola secara profesional. Konsekuensinya adalah dalam pengelolaan BUMP dibutuhkan SDM dengan kualifikasi tertentu, yang tidak cukup mengandalkan jenjang pendidikan formal tertentu. Tentang hal ini, harus diingat bahwa manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni (*science and arts*). Karena itu, SDM yang disiapkan tidak cukup dipilih dan ditetapkan berdasarkan ijazah yang dimiliki, tetapi juga pengalaman kerja dan juga karakter pribadi, utamanya tentang keberpihakan dan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pendiri BUMP sebaiknya terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang dan atau memiliki pengalaman kerja sebagai: aparat birokrasi, pelaku agribisnis, akademisi, dan pegiat sosial/ kemasyarakatan yang memiliki (*track record* baik), kompetensi dan komitmen/keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, juga difasilitasi oleh sekelompok akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi dibidang: manajemen agribisnis, hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Pembiayaan

Sebagai sebuah perseroan, sumber pembiayaan kegiatan yang pertama-tama dapat dimanfaatkan adalah modal perseroan yang disetor oleh para pemegang sahamnya. Tetapi, tergantung kemampuan pengurus untuk menyusun dan meyakinkan program-kerja yang *prospectable*, pembiayaan kegiatan dapat diupayakan dari sumber-sumber lain yang menjadi mitra-

kerjanya, baik BUMN/BUMD, maupun swasta dan lembaga-lembaga keuangan yang lain (Bank dan Non-Bank).

Operasionalisasi kemitraan BUMP dengan petani (kelompok-tani/Gapoktan), pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Sebagai kolateral cukup dengan menunjukkan kelayakan usaha berupa *cash-flow*, jaminan keberhasilan produk, dan jaminan pembelian produk (*off-taker*).
- 2) Kepada petani dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan sekitar Rp. 5.000.000/Ha
- 3) Kepada BUMP dan mitra-kerja lain yang membeli produk petani (*off taker*), dapat diberikan kredit UKM maksimal Rp. 500.000.000,-
- 4) Kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan untuk meningkatkan nilai-tambah produk (alat/mesin pertanian, dan R&D) dapat diberikan pembiayaan PK-BL/CSR dari BUMN/Swasta.

Perkembangan BUMP selanjutnya harus mampu mandiri untuk membiayai seluruh pembiayaannya serta investasi bagi keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Karena itu, pengelolaan BUMP harus dilakukan secara profesional dan seefisien mungkin.

e. Pola Kelembagaan BUMP

Pola kelembagaan baik on-farm dan off-farm perlu dikembangkan dengan pola bisnis yang berbasis pada pemberdayaan. Untuk sementara ini,

BUMP di Kabupaten Sukoharjo cenderung ke arah off-farm. Oleh karena itu, ke depan pola kelembagaan harus diatur sebagai berikut:

1) Pola Kelembagaan *On Farm*

- a) Pengelolaan kegiatan on-farm sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh BUMP
- b) BUMP sebagai mitra strategis petani memfasilitasi :
- Penyediaan sarana produksi
 - Pembiayaan (kredit) usaha tani
 - Pendampingan kegiatan on-farm (pemupukan lahan dan irigasi, budidaya tanaman, perlindungan tanaman, dan sekolah lapang)
 - Supervisi dan pemantauan kegiatan on-farm
 - Koordinasi antara fasilitator BUMP dengan penyuluh PNS
- c) Dinas Pertanian berfungsi sebagai regulator, supervisor, dan fasilitator kegiatan on-farm.

2) Pola Kelembagaan *Of-farm (1)*

- a) Petani harus mengikuti SOP kegiatan panen dan pasca panen yang telah ditentukan oleh BUMP
- b) BUMP sebagai mitra strategis petani memfasilitasi:
- Pembelian produk (dengan atau tanpa bermitra dengan tengkulak)
 - Pembelian semua produk dengan kriteria-kriteria (kualitas) tertentu yang telah ditetapkan

- Harga pembelian minimal pada HPP (Harga Pembelian Pemerintah), pada harga pasar lebih tinggi dari HPP dibeli dengan harga pasar
- c) Tengkulak dan atau pengelola RMU membeli produk petani (dengan atau tanpa bermitra dengan BUMP) minimal dengan harga HPP
 - d) Pembelian produk dilakukan secara tunai di lahan usaha tani
 - e) Prakiraan harga tebasan (borongan) berdasarkan pada estimasi produksi yang dilakukan oleh kelompok tani
 - f) Pembayaran kepada petani langsung dipotong dengan kewajiban pembayaran kredit
- 3) Pola Kelembagaan *Of-farm* (2)
- a) Pembelian produk oleh BUMP sebelum diolah dapat disimpan terlebih dahulu dengan sistem resi gudang.
 - b) Pengolahan dan pemasaran produk oleh BUMP bermitra dengan pengelola RMU dilakukan sebagai berikut:
 - Kemitraan didasarkan pada kontrak yang diperbaharui 2 minggu sekali berdasarkan ketentuan mutu dan harga yang disepakati
 - Pengelola RMU wajib mematuhi SOP dan atau standar mutu yang ditetapkan oleh BUMP.
 - c) Penjualan produk oleh BUMP dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak ketiga (pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan swasta)

f. Pengembangan Kemitraan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

BUMP merupakan hibrid dari kelembagaan bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga bisnis, pengembangan BUMP mutlak perlu mengembangkan jejaring kemitraan bisnis dengan semua kelembagaan agrobisnis, yang terdiri dari:

- Kelembagaan produsen dan distribusi input (sarana produksi) maupun perlengkapan (alat/mesin pertanian) yang diperlukan.
- Kelembagaan sub-sistem budidaya tanaman
- Kelembagaan pasca-panen dan pemasaran hasil
- Kelembagaan pembiayaan/permodalan
- Kelembagaan riset dan penyuluhan pertanian

Peran lain sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, BUMP harus mengembangkan kemitraan dengan:

- Kelembagaan penelitian (percobaandan pengujian)
- Kelembagaan pendidikan dan pelatihan
- Kelembagaan sistem informasi (pers dan media)
- Kelembagaan fasilitasi dan advokasi
- Kelembagaan sistem pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat

1) Kemitraan Pengadaan Sarana Produksi dan Alat/mesin Pertanian

Upaya menjamin keberhasilan budidaya tanaman, dengan jumlah dan mutu produk seperti yang diharapkan, mutlak digunakannya sarana produksi (berupa: benih, pupuk, pestisida) yang telah dibakukan. Demikian

pula dengan peralatan/mesin (perontok, pengering, dan pengolah) yang telah dibakukan. Karena itu, kepada petani yang bermitra dengan BUMP wajib disediakan/mengikuti paket sarana produksi yang disepakati dan ditetapkan oleh BUMP. Oleh karena itu, paket sarana produksi yang disediakan/ditetapkan BUMP, harus telah teruji di lahan petani, serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.

Persyaratan-persyaratan tersebut mendorong BUMP untuk menjalin kemitraan dengan produsen dan atau penyalur/pengecer tertentu, yang baru dibayar pada musim panen (YARNEN), dan di pihak lain, produsen dan atau penyalur/ pengecer tersebut perlu menyediakan tenaga pendamping untuk memastikan mutu produknya, serta memberikan pendampingan teknis agar penerapannya benar-benar mengikuti SOP (*standard operasional dan prosedur*) yang ditetapkan.

2) *Kemitraan Pembiayaan*

Pnyediaan paket sarana produksi dan alat/mesin pertanian, BUMP perlu menjalin kemitraan dengan lembaga pembiayaan (Bank dan atau Non-Bank), sekaligus menyangkut penjaminan kreditnya. Terkait dengan kemitraan pembiayaan seperti ini, dapat diberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani dengan BUMP bertindak sebagai afalis (penjamin) keberhasilan produksi dan pembayarannya setelah panen. Selain itu, kepada BUMP dan atau pelaku *off-taker* (mitra BUMP) yang lain dapat diberikan kredit UKM untuk pembelian produk di masa panen. Sedang kepada pelaku pengolahan

produk yang memerlukan alat/mesin pertanian untuk memperbaiki nilai-tambah (*added value*) produk (seperti: mesin perontok/*thresher*, mesin pengering/*dryer*, dan mesin pemoles/*polisher* dapat diberikan Kredit Murah yang disalurkan melalui Program Kemitraan atau bahkan hibah Pengembangan kapasitas Lingkungan (PK-BL) dari BUMN.

3) *Kemitraan Pemasaran Produk*

Panen raya akan mampu mensuplai produksi beras yang berlimpah. Pada saat itulah, BUMN dan atau pelaku *off-taker* (mitra BUMN) yang lain, dapat melakukan kemitraan penjualan beras, baik dengan Swasta, BUMN (Bulog, Pertani) atau BUMD yang dikaitkan dengan Program Ketahanan Pangan Nasional/Daerah, pengadaan beras untuk kaum miskin (RASKIN), maupun kemitraan bagi golongan anggaran (PNS, TNI/Polisi, dan Karyawan Swasta).

4) *Kemitraan Pendampingan Petani*

BUMN perlu secara terus menerus menjamin keberhasilan produksi. Oleh karena itu, BUMN harus memperhatikan keberadaan “Penyuluh Swasta” (yang disediakan oleh produsen dan atau penyalur/pengecer sarana produksi) dan “Penyuluh Swadaya” yang praktek kegiatan di lapangan selalu berkoordinasi dengan “Penyuluh PNS”. Melalui kemitraan pendampingan seperti ini, selain akan mengurangi beban pemerintah untuk mengangkat

Penyuluh PNS (yang ditargetkan seorang/desa), juga akan membangun profesionalisme penyuluh di wilayah BUMP.

5) *Kemitraan Dengan Pelaku Agribisnis Yang Lain*

BUMP perlu menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan agribisnis yang lain, seperti: lembaga penelitian/pengujian, pusat informasi/media, pengangkutan, konstruksi, dan lainnya.

6) *Kemitraan antar ABG+M*

Sinergitas antara ABG, yaitu: *akademisi* (kalangan perguruan tinggi), *businessman* (pelaku usaha), dan *government* (pemerintah) sangat penting. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah kemitraan dengan kelompok masyarakat, utamanya: tokoh-tokoh potensial (rohaniawan, adat, politisi, guru, dan lainnya), pegiat LSM, serta media (pers). Hal ini disebabkan karena, meskipun sepanjang sejarah pembangunan pertanian di Indonesia, kegiatan penyuluhan pertanian/ pemberdayaan masyarakat lebih didominasi oleh aparat pemerintah atau Penyuluh PNS, tetapi peran penyuluhan/pemberdayaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat secara sukarela, penyuluh yang dibiayai oleh pelaku-usaha, dan penyuluh yang bekerja pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak bisa diabaikan. Bahkan pada saat gaung peran penyuluh PNS yang sejak dasawarsa 1990-an semakin menurun, peran penyuluh non-PNS terlihat semakin menonjol dan semakin lebih disukai masyarakat.

UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) sebenarnya secara tegas telah mengakui adanya 3 (tiga) kelompok penyuluh, yaitu: penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan oleh BUMP, perlu dibangun koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara penyuluh/fasilitator yang dibiayai oleh BUMP (supervisor, ketua kelompok, dan kepala regu) dengan penyuluh PNS, Penyuluh swasta, dan pegiat LSM, dan lainnya.

g. Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMP

BUMP sebagai inovasi kelembagaan, bukan sekedar memiliki arti ekonomi sebagai lembaga bisnis petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya, tetapi sebagai **hibrid kelembagaan bisnis dan pemberdayaan masyarakat**, BUMP juga melakukan upaya-upaya pemberdayaan petani dan masyarakat perdesaan, dalam bentuk:

- Penyebaran kesadaran masyarakat (petani) tentang pentingnya pengembangan kelembagaan bisnis dan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, yang tumbuh, dimiliki, dikelola, dan memberikan manfaat langsung dan tak-langsung kepada masyarakat.
- Pemberian kesempatan kepada masyarakat (petani) untuk membeli/memiliki saham BUMP yang tidak harus dalam bentuk uang yang disetor (*fresh money*), tetapi cukup dengan menunjukkan SIUP, Sertifikat Lahan, Komitmen, dan atau *expertise* yang dimilikinya.

- Memberikan beragam layanan yang terkait dengan usahatani (agrobisnis), pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi, konsultasi, advokasi, dan beragam kegiatan pemberdayaan yang lain kepada masyarakat (petani) yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam program/kegiatan BUMP.
- Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat (petani), utamanya yang terkait dengan pengembangan ekonomi perdesaan (*on-farm*, *off-farm* dan *non-farm*).
- Pengembangan jejaring dan kemitraan, baik untuk pengembangan bisnis maupun pemberdayaan masyarakat.

3. Model Pengembangan BUMP

Salah satu tujuan penelitian adalah merumuskan *model pengembangan BUMP di masa mendatang*. Terkait dengan tujuan tersebut, di bawah ini disampaikan rumusan model pengembangan BUMP sebagai berikut:

a. Model Pengembangan BUMP Sebagai Lembaga Bisnis yang Profesional

Pembentukan BUMP sebagai Perseroan, dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pelibatan petani sebagai pemegang saham perseroan sejak awal pembentukan BUMP

- 2) Pelibatan petani sebagai pemegang saham perseroan yang diwakili oleh lembaga petani (kelompok, GAPOKTAN) dan atau lembaga ekonomi petani (Koperasi dan Asosiasi).
- 3) Pembentukan BUMP diawali oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kompetensi mengelola bisnis dan komitmen untuk memberdayakan petani yang kemudian menawarkan sahamnya kepada petani dan atau warga masyarakat pedesaan pada umumnya yang berminat

b. Model Pengembangan BUMP Sebagai *hibrid* Lembaga Bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat

BUMP *hibrid* Lembaga Bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat dirumuskan dalam Anggaran Dasar harus mengatur tentang:

- 1) kepemilikan saham BUMP,
- 2) ragam kegiatan BUMP,
- 3) pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) BUMP dan Mitra-bisnis BUMP, dan
- 4) pemanfaatan keuntungan BUMP.

c. Model Pengembangan BUMP Sebagai Lembaga Bisnis Yang berbasis *Moral*

Model Pengembangan BUMP Sebagai Lembaga Bisnis yang berbasis *Moral*, dapat dilakukan melalui:

- 1) perumusan SOP (stabdar operasional dan prosedur) pembentukan BUMP,
- 2) persyaratan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi,
- 3) pengangkatan Komisaris Independen yang mewakili Tokoh Masyarakat, yang memiliki fungsi utama untuk mengawal dan mengendalikan praktek bisnis BUMP.

d. Model Pengembangan BUMP Sebagai Lembaga Pengembangan Penyuluhan Non-pemerintah.

BUMP sebagai Lembaga Pengembangan Penyuluhan Non-pemerintah, perlu dibangun sistem penyuluhan yang meliputi:

- 1) Kebijakan
Kebijakan pemberdayaan, harus dirumuskan dalam visi dan misi untuk memberdayakan petani menjadi pelaku agribisnis yang profesional
- 2) Kelembagaan
Kelembagaan penyuluhan yang dirumuskan dalam bentuk keberadaan Penyuluhan Swasta di tingkat BUMP (Kecamatan) dan Penyuluhan swadaya (Ketua Kelompok di tingkat Desa, dan Ketua Regu di tingkat hampan lahan)
- 3) Ketenagaan
Ketenagaan Penyuluh Swasta sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan BUMP. Ketenagaan Penyuluh Swadaya, diusulkan oleh petani di desa/hamparannya, dan ditetapkan oleh BUMP

4) Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penyuluhan dirancang sebagai penyuluhan partisipatif menggunakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan dengan menerapkan metoda Sekolah-lapang yang didukung oleh *cyber extension*.

Tentang hal ini, semua penyuluh BUMP dan penyuluh swadaya selalu berkoordinasi dengan penyuluh PNS dan penyuluh swasta yang lain (yang dimiliki produsen/ pedagang)

5) Sarana dan prasarana

Terkait dengan penerapan sistem kerja Latihan dan Kunjungan dengan metoda Sekolah-lapang yang didukung oleh *cyber extension*, maka sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi: sarana mobilitas, laptop, LCD, handpone, serta alat bantu dan alat peraga untuk sekolah-lapang.

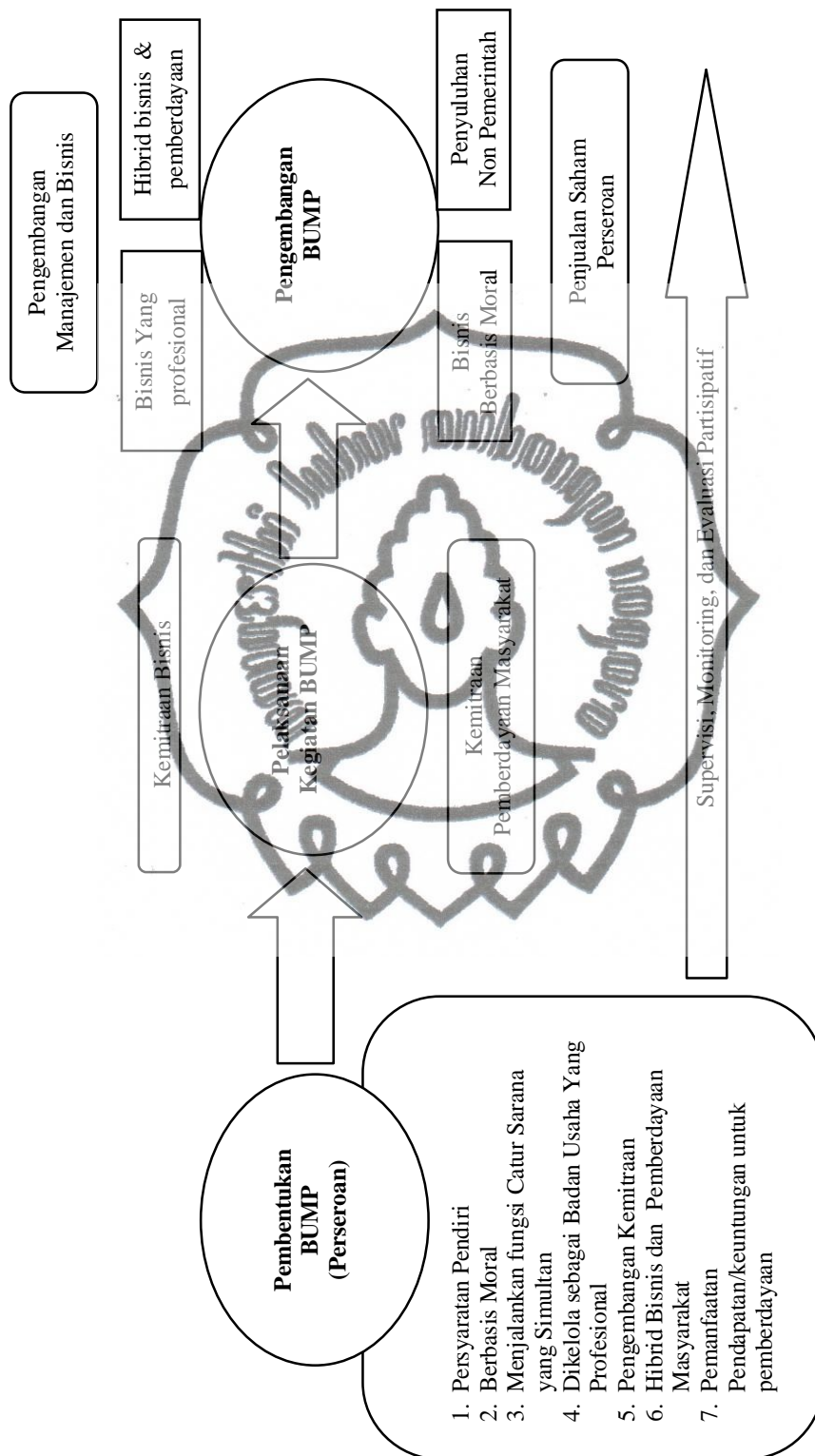
6) Pembiayaan

Pembiayaan penyuluhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab BUMP dengan memperhatikan masukan dari pemngku kepentingan terkait.

7) Pembinaan dan pengendalian

Pembinaan dan pengendalian dilakukan secara partisipatif yang melibatkan BUMP, petani, aparat Pemerintah, Mitra-kerja BUMP, dan pemangku kepentingan yang lain

Terkait dengan pengembangan BUMP seperti yang dikemukakan di atas, di bawah ini disampaikan bagan pengembangan Model BUMP.



Gambar 6.6. Proses Pengembangan BUMS

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. BUMP di Sukoharjo mengalami dinamika sebagai berikut:
 - a) Secara konseptual, BUMP merupakan perseroan yang selain mengejar keuntungan (berbasis bisnis) tetapi juga mengedepankan aktifitas pemberdayaan.
 - b) BUMP didirikan atas dasar beberapa kepentingan dari para pihak, yaitu: (1) kelompok tani/gapoktan (kesejahteraan petani, peningkatan jiwa kewirausahaan/*entrepreneurship*); (2) BPSDMP Kementerian Pertanian (upaya ujicoba pengembangan kelompok tani ke korporasi); (3) Pemerintah Daerah (ketahanan pangan daerah); dan (4) FACILITATOR (aplikasi ilmu pemberdayaan masyarakat)
 - c) Kegiatan BUMP Sukoharjo masih terbatas pada off-farm mengingat permasalahan utama petani pada aspek tersebut, namun demikian kedepan akan berkembang ke arah on-farm dan non farm.
 - d) Pada aspek pemberdayaan, BUMP mengembangkan empat catur pengembangan kapasitas, yaitu: pengembangan kapasitas manusia (pengembangan kapasitas manusia); pengembangan kapasitas usaha (pengembangan kapasitas usaha); pengembangan kapasitas lingkungan

(pengembangan kapasitas lingkungan; dan pengembangan kapasitas kelembagaan (pengembangan kapasitas kelembagaan).

- e) Dalam menjalankan aktifitasnya, BUMP didukung oleh kelembagaan agribisnis lainnya baik pada sisi off-farm (pembiayaan, pengolahan produk, dan pemasaran) maupun on-farm (pembiayaan dan asuransi kredit)
- f) BUMP hadir dalam rangka menutupi berbagai kelemahan mutu pelayanan kelembagaan agribisnis lainnya utamanya pada lembaga penyuluhan yang belum optimal dalam kinerjanya, minimnya lembaga pembiayaan (kredit dan asuransi pertanian), maupun lemahnya lembaga pemasaran produk pertanian.
- g) BUMP telah dirasakan manfaatnya baik oleh para pihak di Sukoharjo (RMU, PPL, Kelompok tani/Gapoktan) maupun di luar Sukoharjo (Pemerintah Propinsi Banten, LPPNU-Kabupaten Wonogiri, BPSDMP kementerian Pertanian melalui program FEATI, dan lainnya).

2. BUMP sebagai inovasi kelembagaan, dapat dilihat pada:

- a) Perbedaan BUMP dan catur Sarana Unit Desa
- b) BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional
- c) BUMP sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat
- d) BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral
- e) BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya)

3. Mendasarkan diri pada berbagai dinamika BUMPU di Kabupaten Sukoharjo, maka ke depan perlu adanya penyempurnaan model kelembagaan baik pada aspek pembentukan, pengelolaan, pola kelembagaan, kemitraan, dan lingkup pemberdayaan.
4. Model pengembangan BUMPU di masa mendatang, mencakup:
 - a) Model pengembangan BUMPU sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional, menggunakan pendekatan pelibatan petani dalam kepemilikan saham BUMPU.
 - b) Model pengembangan BUMPU sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat, dirumuskan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang:
 - 1) Kepemilikan saham BUMPU
 - 2) Ragam kegiatan BUMPU
 - 3) Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) BUMPU dan Mitra-bisnis BUMPU
 - 4) Pemanfaatan keuntungan BUMPU
 - c) Model pengembangan BUMPU sebagai lembaga bisnis berbasis moral, dilakukan melalui:
 - 1) Perumusan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) pembentukan BUMPU
 - 2) Persyaratan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi

- 3) Pengangkatan Komisaris Independen yang mewakili Tokoh Masyarakat, yang memiliki fungsi utama untuk mengawal dan mengendalikan praktek bisnis BUMP
- d) Model pengembangan BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluhan non-pemerintah (penyuluhan swasta dan swadaya) merupakan model pengembangan sistem penyuluhan yang meliputi: Kebijakan, Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pembinaan dan pengendalian

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMP sebagai inovasi kelembagaan, terbukti dapat diandalkan sebagai ranah baru upaya pemberdayaan petani yang selama ini masih terbatas pada pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha dan kapasitas lingkungan. Oleh sebab itu, kajian terhadap teori dan pengembangan model-model kelembagaan layak dilakukan.

2. Implikasi Praktis

- a) BUMP sebagai inovasi kelembagaan pertanian telah mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata untuk merintis dan mengembangkan pembentukan BUMP yang tidak terbatas dalam usahatani tanaman pangan, tetapi juga BUMP Peternakan, BUMP Perikanan, BUMP Kehutanan, BUMP Pengrajin,

bahkan juga BUMP Pedagang Kaki-lima, serta BUMP Usaha-mikro dan Usaha Kecil yang lain.

- b) Pengembangan BUMP memerlukan dukungan biaya operasional yang cukup, utamanya yang berkaitan dengan *off-taker* produk. Untuk itu, selain dukungan lembaga keuangan konvensional (Bank dan Non-Bank), diperlukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mendukung pengembangan BUMP.
- c) Kehadiran BUMP bisa menjadi model pengembangan kelembagaan petani sesuai yang diamanatkan dalam RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Sebagai inovasi kelembagaan baru, maka perlu adanya sosialisasi kepada pemangku kepentingan pembangunan pertanian, utamanya aparat birokrasi, lembaga keuangan (Bank dan Non-bank), Perguruan Tinggi, dan Pelaku Agrobisnis yang lain sebagai mitra-kerja dalam pengembangan kemitraan bisnis dan pemberdayaan masyarakat (petani).
2. Perlunya dukungan dan keberpihakan yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan bagi pengembangan BUMP.

3. Sebagai inovasi kelembagaan pembangunan pertanian, maka perlu temuan-temuan baru dalam menentukan kelembagaan BUMP yang lebih mantap baik dari aspek pembentukan, pengelolaan, pola kelembagaan, dan kemitraan.

